



APMD Press

# Dialektika Perubahan Kurikulum STPMD “APMD”

Sutoro Eko Yunanto, dkk



Editor:

MC. Candra Rusmala Dibyorini



APMD Press

# **DIALEKTIKA PERUBAHAN KURIKULUM STPMD “APMD”**

Oleh:

**Sutoro Eko Yunanto, dkk**

Editor:

**MC. Candra Rusmala Dibyorini**

---

# DIALEKTIKA PERUBAHAN KURIKULUM STPMD “APMD”

---

**Penulis:**

Sutoro Eko Yunanto, Muhammad Barori, RR. Leslie Retno Angeningsih, Tri Nugroho, E.W, Rini Dorojati, Hery Purnomo, Oktarina Albizzia, Aulia Widya Sakina, Habib Muhsin, Irsasri, Guno Tri Tjahjoko, Utami Sulistiana, Supardal, R. Widodo Triputro

**ISBN: 978-623-98584-1-4**

**Editor:**

MC. Candra Rusmala Dibyorini

**Penyunting:**

Tri Nugroho, E.W

**Desain Sampul dan Tata Letak:**

Michael Ewan Hari Wiyanto

**Penerbit:**

APMD Press.

Alamat:

- Jl. Timoho 317 Yogyakarta 55225  
Tlp./Faks. (0274) 561971  
e-mail: info@apmd.ac.id

Cetakan November 2021

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini ke dalam bentuk apapun, secara elektronik, maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), (2), dan (6).

# **PRAKATA:**

## **BERPIKIR KERAS BERHATI LEMBUT**

**Muhammad Barori**

Kalimat bijak dan sarat makna tersebut selalu dilontarkan oleh Ketua STPMD “APMD” dalam setiap proses diskusi peninjauan kurikulum 2021. Kurikulum merupakan jantung perguruan tinggi sekaligus menunjukkan posisi berdiri dan ideologi keilmuan perguruan tinggi. Kurikulum disusun dengan memperhatikan kaidah-kaidah keilmuan maupun kondisi empirik masyarakat, sehingga kurikulum harus inklusif dan senantiasa didialogkan dengan perkembangan keilmuan dan kondisi masyarakat. Ilmu yang baik adalah ilmu yang memberikan manfaat, ilmu amaliah dan amal ilmiah. Dialog dan debat keilmuan yang berlangsung selama proses peninjauan kurikulum 2021 baik pada tingkat program studi, sekolah tinggi, maupun di senat akademik yang saya ikuti, menunjukkan kesadaran yang semakin dewasa dan komitmen keilmuan para dosen STPMD “APMD”. Dengan semangat berpikir keras berhati lembut, kurikulum 2021 telah tersusun dan disepakati.

Tahun 1998 saya sampaikan bahwa STPMD “APMD” mengalami krisis/sakit jasmani maupun rohani. Krisis jasmani berkaitan dengan pengelolaan kelembagaan kampus sedangkan krisis rohani berkaitan dengan posisi keilmuan (*Body of knowledge*) yang belum memadai. Program Penguatan Kelembagaan yang didukung oleh *Ford Foundation* selama 2 periode sebagai pintu masuk untuk penguatan kelembagaan dan peneguhan, pembenahan keilmuan di STPMD “APMD”. Secara perlahan kelembagaan di

STPMD “APMD” mulai tertata dengan baik dan terus berbenah hingga sekarang. Dalam kurikulum 2021 posisi ideologi keilmuan mulai tampak. Peneguhan posisi keilmuan semakin tampak dari kurikulum yang dikembangkan oleh program studi-program studi di STPMD “APMD” dan dipersembahkan untuk memuliakan rakyat desa. Semangat itu sesuai dengan amanah pendirian kampus sebagai monumen hidup para pelajar pejuang yang mendedikasikan pengabdian mereka demi kesejahteraan dan kemajuan rakyat desa.

Tantangan kita selanjutnya melembagakan ideologi keilmuan kepada segenap sivitas akademika serta mempromosikannya kepada berbagai pihak. Penuangan kurikulum kedalam matakuliah, deskripsi masing-masing matakuliah, metode dan pendekatan pembelajaran merupakan tantangan yang terus kita dialogkan diantara sivitas akademika. Di hari terakhir sidang Senat Akademik untuk menetapkan kurikulum 2021, saya mengusulkan agar risalah/*proceeding* proses penyusunan kurikulum baik di tingkat program studi, sekolah tinggi, maupun Senat Akademik dibukukan sebagai penghargaan serta menandai momentum kebangkitan keilmuan di kampus STPMD “APMD”. Suatu kehormatan bagi diri saya untuk menuliskan salah satu prakata singkat dalam buku risalah ini. Semoga dokumen risalah penyusunan kurikulum 2021 ini merupakan tradisi keilmuan yang terus dikembangkan demi keberlanjutan dan kejayaan STPMD “APMD”.

Akhirnya jangan lelah untuk terus belajar, membaca, berdiskusi, dan menulis demi kepentingan STPMD “APMD”.

Timoho, 10 November 2021

# **PRAKATA:**

## **LINTASAN BALAP MENUJU KEMAJUAN**

**RR. Leslie Retno Angeningsih**

Kurikulum merupakan salah satu komponen penting dalam sistem pendidikan, khususnya pendidikan formal. Ibarat “jantung” dalam diri manusia, kurikulum memiliki peran signifikan yang menentukan efektif atau tidaknya suatu program pendidikan. Kata kurikulum berasal dari bahasa Latin “curere” yang berarti lari di lintasan atau lintasan balap (Pinar, 2011). Dalam bahasa Inggris, kurikulum muncul dari kata “course” atau kursus, dan “race-course” berarti kursus balap. Dalam bidang akademik, kurikulum digambarkan sebagai program studi, terdiri dari serangkaian kursus individu. Menurut Toombs dan Tierney (1993), kurikulum adalah desain yang sengaja dibuat untuk proses pembelajaran mengenai pengetahuan khusus yang telah disepakati fakultas dalam konteks harapan sosial dan kebutuhan mahasiswa.

Kurikulum tidak bersifat statis melainkan dinamis, karena kurikulum selalu mengalami peninjauan ulang, revisi, pengembangan, dan pembaharuan dalam kurun waktu tertentu. Peninjauan dan pengembangan kurikulum bertujuan untuk meningkatkan pembelajaran, keterlibatan, pengalaman, dan capaian hasil. Peninjauan kurikulum bermanfaat untuk: *Pertama* meningkatkan pengalaman belajar mahasiswa dengan mengartikulasikan kekuatan program. *Kedua*, mengidentifikasi tindakan khusus guna mengatasi kesenjangan dalam program akademik. *Ketiga*, meningkatkan diskusi

dan kolaborasi antara instruktur dan pihak-pihak lain yang berperan dalam program, praktik pengajaran dan pembelajaran. *Keempat*, memberikan kesempatan untuk refleksi kritis terhadap kurikulum program. *Kelima*, memberikan bukti untuk memandu pengambilan keputusan dalam program. *Keenam*, memahami hubungan antar beberapa matakuliah dalam suatu program. Pada umumnya, peninjauan kurikulum dilakukan dengan pendekatan sistematis, yaitu melalui penelitian dan seleksi, revisi dan pengembangan, penerapan, dan evaluasi serta pemantauan.

Peninjauan kurikulum Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” saat ini dilatar belakangi oleh empat alasan. *Pertama*, masa berlaku kurikulum STPMD “APMD” tahun 2016-2021 telah berakhir. *Kedua*, dorongan untuk mengkokohkan, menegaskan dan melestarikan ke“khas”an atau penciri lembaga. *Ketiga*, kesadaran akan tuntutan kritis pengembangan keilmuan berdaya saing “unggul” dan “profesional” dalam menghadapi perubahan serta tantangan kompleks kehidupan di era abad ke-21. *Keempat*, peneguhan komitmen bersama dalam pentingnya peningkatan proses pembelajaran, keterlibatan semua unsur pendidikan, perluasan pengalaman dan pencapaian hasil. Penjelasan untuk masing-masing alasan sebagai berikut:

*Pertama*, kurikulum STPMD “APMD” tahun 2016-2020 pada tahun ini telah habis masa berlakunya, sehingga perlu disusun kurikulum baru untuk tahun 2022-2026. Merespon tuntutan kebutuhan kurikulum baru, Pimpinan STPMD “APMD” beserta jajarannya, para Ketua Program Studi dan Direktur Program

Magister, para dosen, civitas akademika dan pihak-pihak terkait lain, segera mempersiapkan diri dan bersama-sama melakukan asesmen, evaluasi, refleksi diri, revisi, dan pembaharuan terhadap kurikulum lama 2016. Hasil peninjauan digunakan untuk menyusun visi, misi, tujuan lembaga, dan kurikulum Program Studi yang baru.

Asesmen terhadap luaran (*output*) dan hasil (*outcome*) proses pembelajaran kurikulum lama 2016, menunjukkan hasil sangat memuaskan. Namun, *impact* lulusan dalam kontribusi nyata terhadap desa dan daerah dirasakan kurang optimal dan “nendang”. Selanjutnya, evaluasi kurikulum dilakukan secara komprehensif terhadap tujuan kurikulum, isi, pendekatan pengajaran, dan pembelajaran. Hasil evaluasi dari tujuan kurikulum nampaknya kurang maksimal berorientasi secara tegas dalam bidang pekerjaan yang sejalan bidang studi dengan kebutuhan masa depan dan pengembangan jangka panjang. Isi kurikulum cenderung kurang *up to date* dalam perspektif dan cakupan keluasan serta kedalamannya. Pendekatan pengajaran menunjukkan hasil sangat baik, dalam hal fleksibilitas dan variasi, partisipasi mahasiswa, dan interaksi antara pengajar dan mahasiswa. Evaluasi pembelajaran menunjukkan hasil yang baik, adil dan wajar. Kurikulum menunjukkan cukup efektif dalam meningkatkan penguasaan dan kapasitas mahasiswa. Dari hasil temuan evaluasi akan menjadi masukan dalam melakukan revisi, pembaharuan, peningkatan, dan pengembangan kurikulum baru.

Refleksi diri dilakukan untuk pengembangan diri tenaga pengajar. Refleksi diri memberi kesempatan pengajar untuk berpikir tentang



apa yang berhasil dan tidak dalam proses pembelajaran mereka. Pada umumnya, pengajar menggunakan pengajaran reflektif sebagai cara menganalisis dan mengevaluasi praktik mereka, sehingga dapat fokus pada apa yang berhasil. Pengajar yang efektif akan mengakui bahwa tidak peduli seberapa bagus pelajarannya, strategi pengajaran selalu dapat ditingkatkan. Walaupun, pengajar terkadang harus menanggung resiko, karena mahasiswa membuat penilaian terlalu cepat tentang instruksi yang diberikan tanpa benar-benar memiliki konteks untuk mendukungnya. Tujuan akhir refleksi diri adalah meningkatkan cara pengajar dalam mengajar. Dari temuan yang didapatkan, pengajar akan memperoleh wawasan yang dibutuhkan dalam meningkatkan instruksi pengajaran ke tingkat yang lebih baik. Refleksi diri merupakan teknik yang dapat mengukur posisi pengajar dengan jujur dan pengajar harus berusaha menerapkannya sepanjang tahun. Kedepannya, pengajar akan memiliki perangkat yang jauh lebih baik dan komprehensif untuk digunakan pada saat harus mengajar matakuliah yang diampunya sekali lagi. Hasil refleksi diri menunjukkan para tenaga pengajar telah mengajar dengan baik. Hasil asesmen, evaluasi, dan refleksi diri digunakan untuk menyusun draft kurikulum baru. Selanjutnya, dilakukan beberapa kali diskusi dalam rangka merevisi, memperbaharui, dan mengembangkan kurikulum yang relevan dalam meningkatkan proses pembelajaran yang “*up to date*” dan “berkualitas”.

*Kedua*, penegasan dan pengukuhan ke“khas”an, “penciri” kelembagaan dilakukan untuk mewujudkan cita-cita luhur *founding fathers* dan komitmen STPMD “APMD” dalam memajukan desa. Upaya *founding fathers* dalam memajukan desa dilakukan melalui

jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan sebuah akademi yang diberi nama “Akademi Pembangunan Masyarakat Desa” disingkat menjadi APMD. Dalam perjalanan waktu, “APMD” berkembang pesat dan terus meningkat statusnya menjadi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa. Untuk mengenang kejayaan Akademi Pembangunan Masyarakat Desa, kata “APMD” dijadikan sebagai sebuah “*brand*” dan “ikon” yang tetap dilekatkan pada status barunya, yaitu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”.

Secara historis, STPMD “APMD” merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang konsisten dan memiliki komitmen terhadap “desa”. Desa dalam hierarkhis Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk pemerintahan terendah. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, terdapat 83.931 wilayah administrasi setingkat desa. Jumlah tersebut terdiri dari 75.436 desa (74.517 desa dan 919 nagari di Sumatera Barat), 8.444 kelurahan dan 51 Unit Permukiman Transmigrasi/ Satuan Permukiman Transmigrasi. Mengetahui jumlah desa yang sangat luar biasa banyak dan mencoba mengaitkan dengan “cita-cita luhur” *founding fathers* dalam memajukan desa, maka dapat dibayangkan, jika cita-cita itu benar-benar terwujud, berarti akan terwujud pula kemajuan bangsa.

Upaya memajukan desa secara eksplisit baru ditemukan pada era Pemerintahan Jokowi-JK periode pertama, yaitu dengan kebijakan “membangun Indonesia dari pinggiran”. Bersamaan dengan kebijakan tersebut, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, mulai

diimplementasikan. Sejak saat itu, desa-desa mulai menggeliat melakukan pembangunan, terutama infrastruktur secara massif. Pada periode kedua Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf, kebijakan difokuskan pada menyelesaikan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan demikian, memajukan desa menjadi kunci paling strategis, “jitu”, dan “menjanjikan” di dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, bila dikaitkan dengan STPMD “APMD” sebagai satu-satunya Perguruan Tinggi di Indonesia yang tetap konsisten dan komitmen terhadap “desa”, maka keberadaan STPMD “APMD” menjadi sangat penting karena STPMD “APMD” memiliki *bargaining power* tinggi dalam memajukan bangsa dan negara. Dengan satu catatan, apabila generasi penerus mampu mengelola secara serius, cerdas, bertanggungjawab, *visioner*, dan profesional. Inilah “Pekerjaan Rumah (PR)” bagi generasi penerus STPMD “APMD” untuk memperjuangkan dan mewujudkannya.

*Ketiga*, kesadaran akan tuntutan kritis pengembangan keilmuan berdaya saing “unggul” dan “profesional” dalam menghadapi perubahan dan tantangan kompleks kehidupan di abad ke-21, muncul ketika melakukan “*flashback*” perkembangan STPMD “APMD” sejak meningkat status lembaga menjadi Sekolah Tinggi dan dibuka Program Studi Ilmu Pemerintahan (S-1). Keberadaan Program Studi Ilmu Pemerintahan ini, melengkapi Program-Program Studi yang telah ada sebelumnya, yaitu Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa (D-III), Program Studi Pembangunan Sosial (S-1) yang dulunya dikenal sebagai Sosiatri, dan Program Studi Ilmu Komunikasi (S-1). Program Studi Ilmu Pemerintahan memiliki posisi

“sangat strategis” (secara kelembagaan, politis, dan pencapaian target cita-cita luhur), karena menjanjikan luaran Prodi IP sebagai calon-calon pemimpin desa (baik eksekutif maupun legislatif). Posisi strategis IP dibuktikan dengan animo mahasiswa masuk Prodi IP terus bertambah dari tahun ke tahun, tidak saja mahasiswa laki-laki juga mahasiswa perempuan. Merespon pangsa pasar yang luar biasa, Prodi IP dengan cekatan membuka Program Studi IP Strata-2 atau Magister dan menambahkan fokus perhatian pada “Daerah.”

Peningkatan jenjang pendidikan dan penambahan fokus perhatian memperkuat eksistensi Prodi Ilmu Pemerintahan. Luarannya Prodi IP juga meningkat yaitu mencetak calon-calon pemimpin Daerah. Disamping itu, juga menghasilkan calon-calon lulusan yang bisa bekerja di semua bidang berelasi langsung maupun tidak dengan pemerintahan, kekuasaan, politik, bahkan *social entrepreneur*. Dalam waktu singkat, Prodi Ilmu Pemerintahan berkibar benderanya dan menjadi “primadona” kampus. Sedang, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Pembangunan Sosial, dan Prodi Pembangunan Masyarakat Desa, memiliki pangsa pasar sendiri dan cukup eksis dalam bidangnya masing-masing. Akhir-akhir ini, animo mahasiswa masuk Program Studi Ilmu Komunikasi dan Program Studi Pembangunan Sosial merangkak naik dengan langkah pasti. Demikian juga, Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa memiliki daya tarik tersendiri di antara Pemerintah, Aparat, dan Perangkat Desa.

Posisi dari keempat Program Studi pada kurikulum lama sekalipun memfokuskan perhatian pada desa, namun dalam proses pembelajaran cenderung masih menekankan pada pengembangan

disiplin ilmu masing-masing. Secara kelembagaan keempat Prodi kurang memiliki jalinan ke “APMD”an yang utuh dan membentuk sinergitas penciri ke “khas”an lembaga. Untuk itu, pada kurikulum baru, dibuatlah sebuah paket pembelajaran tentang ke “APMD”an. Upaya tersebut dimaksudkan untuk membangun benang merah urat nadi yang menghubungkan antar Program Studi, mahasiswa, alumnus, dan lembaga dengan penciri ke “APMD”annya. Dengan terjalannya penciri lembaga, keempat Program Studi dapat saling bekerjasama di dalam mengisi, mengembangkan pengetahuan, dan ketrampilan secara berkesinambungan. Akumulasi dan sinergitas hasil kerjasama akan memberikan kontribusi lebih riil untuk perkembangan lembaga dan Program Studi dalam meng “*update*” (memperbaharui) pengetahuan dan ketrampilan, dengan pengetahuan dan ketrampilan yang “*up to date*” (terkini) untuk mencetak lulusan yang kompetitif, berkualitas, professional, unggul, berdedikasi, berkepribadian, bertanggung jawab, dan bermartabat.

Kesadaran terhadap tanggungjawab besar dan mulia dalam mencetak lulusan calon-calon pemimpin desa dan daerah, tidak cukup hanya dengan membekali pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa tentang *government*. Sebagai calon pemerintah atau pemimpin juga harus memahami tentang *governing*, *governability*, *governance* dan *governmentality*. Kelima “G” tersebut merupakan perspektif yang dibangun STPMD “APMD” dan dikenal dengan sebutan “Mazhab Timoho”. ”Mazhab Timoho” juga menjadi ciri lembaga. Internalisasi mazhab Timoho diharapkan tercermin dan mengejawantah dalam diri pribadi para lulusan STPMD “APMD” ke depan.

*Keempat*, tantangan sistem pendidikan di abad ke-21 berlipat ganda, terutama dalam hal mencetak lulusan kompetitif. Kemajuan pesat dalam pengetahuan, teknologi dan keterampilan menjadi pendorong utama untuk pembangunan. Ekonomi baru didorong oleh wirausahawan, teknologi, dan inovasi. Munculnya “masyarakat pengetahuan”, tenaga berpendidikan tinggi untuk pertumbuhan ekonomi, kebangkitan sektor jasa, dan ketergantungan pada produk pengetahuan merupakan fenomena baru. Kegiatan ekonomi padat pengetahuan didorong oleh revolusi teknologi informasi.

Di abad ke-21 menuntut transformasi holistik pendidikan untuk membimbing peta jalan komprehensif mencakup reformasi kurikuler dan penilaian, pengajar dengan pengetahuan baru, strategi pelatihan, pengembangan kepemimpinan transformatif dan visioner, dan integrasi teknologi kolaboratif. Para lulusan akan “membutuhkan kapasitas untuk penemuan dan kemampuan merespon secara efektif terhadap hal-hal baru. Dunia baru menuntut lulusan yang selalu haus pembelajaran untuk memperbarui pengetahuan, keterampilan, dan literasi informasi. Lulusan akan membutuhkan ketahanan pribadi dalam menghadapi ketidakpastian dan kegagalan. Lulusan akan membutuhkan kepercayaan pada nilai dan komitmennya sendiri terhadap kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

Di sini peran utama pengajar adalah sebagai pembelajar utama. Pengajar perlu memahami peran teknologi dalam proses pembelajaran dan prinsip-prinsip di balik pengintegrasian dengan cara yang mendorong pembelajaran mahasiswa mencapai potensi maksimal. Peneguhan komitmen bersama dalam pentingnya

peningkatan proses pembelajaran, keterlibatan semua unsur pendidikan, peluasan pengalaman dan pencapaian hasil. Hasil belajar merupakan kunci untuk pendidikan yang bermakna, dan fokus pada hasil belajar sangat penting untuk menginformasikan diagnosis dan meningkatkan proses pengajaran dan pembelajaran. Modal manusia dan keterampilan menjadi tulang punggung kemakmuran ekonomi dan kesejahteraan masyarakat abad ke-21.

Pengetahuan kontemporer, kemajuan individu dan masyarakat, semakin didorong oleh kemajuan teknologi. Kemakmuran mengharuskan masyarakat mempertahankan keunggulan kompetitif mereka melalui pengembangan dan mempertahankan tenaga kerja terampil, mempertahankan basis penelitian kompetitif, dan meningkatkan penyebaran pengetahuan untuk kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks ini, pendidikan merupakan faktor penting dalam inovasi dan memainkan peran sentral dalam keberhasilan dan keberlanjutan pengetahuan.

Pendidikan ibarat “kawah candradimuka” yaitu sebagai tempat penggodokan generasi penerus, calon-calon pemimpin bangsa. Kekuatan bangsa didasarkan pada kualitas pendidikannya. Pendidikan yang terkalibrasi sangat penting untuk mempersiapkan lulusan yang kompetitif. Kalibrasi didasarkan pada standar sosial yang melibatkan dialog, negosiasi, dan pengambilan keputusan bersama. Keunggulan kompetitif lulusan dibangun di atas keterampilan tenaga kerja inovasi, diseminasi yang cepat, akumulasi dan penerapan pengetahuan yang efektif.

Kurikulum diarahkan melalui penggabungan keterampilan berpikir tingkat tinggi, kecerdasan ganda, teknologi dan multimedia, literasi abad ke-21, dan penilaian otentik. Layanan pembelajaran merupakan komponen penting dan terintegrasi. Keterampilan dan konten tidak diajarkan sebagai tujuan itu sendiri, tetapi mahasiswa akan mempelajarinya melalui penelitian dan aplikasi dan yang terhubung dengan pengetahuan sebelumnya, pengalaman pribadi, minat, bakat, dan hasrat. Pengajar berubah peran utama sebagai pemberi informasi menjadi pengatur pembelajaran, dan membantu mahasiswa untuk mampu mengubah informasi menjadi pengetahuan, dan pengetahuan menjadi kebijaksanaan. Pendidikan abad ke-21 membutuhkan “generasi pengetahuan”, bukan sekedar “penyampai informasi”, dan kampus adalah “pencipta budaya penelitian”.

Berbekal pengetahuan tersebut, untuk mewujudkan kurikulum “kompetitif”, peninjauan kurikulum 2016 dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan, pertemuan, dan diskusi. Pertemuan awal adalah membicarakan tentang rencana peninjauan, di ikuti selanjutnya dengan penyusunan draft. STPMD “APMD” sebagai Lembaga membuat draft visi, misi, dan tujuan baru. Sedang, keempat Program Studi, yaitu: Pembangunan Masyarakat Desa, Ilmu Komunikasi, Pembangunan Sosial, dan Ilmu Pemerintahan menyusun draft kurikulum. Draft kurikulum memuat perubahan visi dan misi lembaga, dan perubahan matakuliah, mencakup Matakuliah Nasional, Matakuliah Lembaga, Matakuliah Baru dan Matakuliah Penciri Prodi.



Pada pertemuan-pertemuan selanjutnya, dilakukan pembahasan dari draft kurikulum masing-masing Prodi, untuk mendapatkan masukan dan kritikan dalam rangka mencapai kesepakatan. Kelegaan dan kebahagiaan menyelimuti seluruh warga, keluarga besar STPMD “APMD” ketika kurikulum tahun 2022-2026 disetujui oleh Senat Akademik.

Adapun uraian secara rinci terkait visi, misi, tujuan baru Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, dan kurikulum keempat Program Studi, yaitu Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa (Diploma III), Program Studi Sarjana Ilmu Komunikasi (Strata-1), Program Studi Sarjana Pembangunan Sosial (Strata-1), Program Studi Sarjana Ilmu Pemerintahan (Strata-1) dan Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan terdapat dalam Bab-Bab Buku ini.

Akhir kata, rasa syukur dipanjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Allah SWT atas kelimpahan RakhmatNya, sehingga Kurikulum 2022-2026 bisa terwujud. Kurikulum ini tentunya menjadi sebuah hadiah paling istimewa, sebagai simbol eksistensi lembaga. Sebuah wujud apresiasi dan rasa hormat seluruh warga, keluarga besar STPMD “APMD”, kepada *founding fathers* yang telah berhasil mewariskan “cita-cita luhur” kepada generasi penerus. Terbukti, cita-cita luhur itu tetap lestari hingga saat ini. Teriring doa, diucapkan “Selamat bekerja dan menjalankan tugas yang diamanahkan dalam Kurikulum”, kepada seluruh warga, Keluarga Besar STPMD “APMD”. Dengan niat tulus, semoga visi, misi “mulia” STPMD “APMD” dapat terwujud demi tercapainya kejayaan STPMD “APMD”, Bangsa dan Negeri tercinta “Indonesia.” Amin

## DAFTAR PUSTAKA

- Pinar, W. F. 2011. *The Character of Curriculum Studies: Bildung, Currere, and the Recurring Question of the Subject*. New York: Palgrave Macmillan.  
<https://doi.org/10.1057/9781137015839>
- Toombs, William E.; Tierney, William G. 1993. Curriculum Definitions and Reference Points. *Journal of Curriculum and Supervision*, Spring, 8, 3:175-195.

## **KATA PENGANTAR EDITOR**

### **MENGHADIRKAN KURIKULUM BARU**

Perubahan kurikulum sering terjebak pada rutinitas yang terkait dengan berakhirnya periode kurikulum sebelumnya. Biasanya perubahan kurikulum terjadi dalam kurun waktu lima tahunan, dan dikaitkan dengan perubahan atau dinamika masyarakat yang berkembang serta tuntutan standar akademik yang diwajibkan. Namun sesungguhnya perubahan kurikulum bukanlah sekedar kegiatan rutin semata. Banyak kepentingan menyertai perubahan kurikulum ini. Kadangkala Perguruan Tinggi gagal melakukan perubahan kurikulum karena tak berhasil mengakomodir berbagai kepentingan yang ada.

Berbeda dengan rutinitas yang terjadi, substansi perubahan kurikulum STPMD “APMD” ini menjadi momentum perubahan yang lebih “nendang” untuk tiga kepentingan yaitu keilmuan, kelembagaan dan kemakmuran. Perubahan kurikulum yang dilaksanakan STPMD “APMD” bergerak untuk menemukan atau memaknai kembali platform dari program studi-program studi yang ada di STPMD “APMD”. Refleksi kritis terhadap pengalaman dan pelaksanaan kurikulum selama lima tahun terakhir digunakan untuk menantang keberlanjutan program studi ke depannya. Masing-masing program studi menegaskan kembali posisi ilmu yang digeluti dan menghadirkan kekhasan program studi pada komunitas akademik secara luas. Kekhasan ini perlu senantiasa dimunculkan

sebagai sebuah gerakan mensinergikan antara ilmu, “jeneng” dan “jenang”.

Instrumentalisasi akademik tetap diperhatikan, kurikulum mesti dibumikan, namun tidak terjebak pada sisi prosedural belaka. Praktik kurikulum merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari “roh” ilmu dan bukan sekedar merupakan persoalan penamaan dan besaran sks matakuliah, pengaturan alur kurikulum dan masa studi mahasiswa.

Kurikulum merupakan tubuh pengetahuan atau jiwa-raga ilmu pengetahuan. Kurikulum haruslah melampaui seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran yang digunakan sebagai pedoman pembelajaran. Di dalam kurikulum mesti memuat ontologi, epistemologi, dan aksiologi ilmu yang mencakup hakekat, proses dan manfaat ilmu. Artinya, kurikulum seharusnya memuat apa yang harus ada dan argument mengapa ilmu ada, dan metode untuk mencapai kebenaran ilmu serta manfaat ilmu bagi kehidupan.

Tidak bisa dihindarkan dalam perubahan kurikulum baru ini terdapat tarik ulur berbagai kepentingan: Kepentingan menyikapi regulasi di satu sisi dan di sisi lain kepentingan STPMD “APMD” sebagai perguruan tinggi masyarakat. Belum lagi tarik ulur kepentingan kurikulum nasional, kurikulum asosiasi, kurikulum penciri Sekolah Tinggi, dan pemenuhan kurikulum kompetensi prodi. Secara internal program studi pun, penempatan matakuliah dan dosen pengampu matakuliah juga menjadi pertimbangan serius.

Berbagai kepentingan ini dikaji untuk menghindarkan kapling-kapling ilmu yang justru akan menyesatkan dalam pelaksanaannya.

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) menjadi isu yang menarik dalam perubahan kurikulum periode ini. Melalui program MBKM, mahasiswa memiliki kesempatan yang luas dan terbuka untuk memperkaya dan meningkatkan wawasan serta kompetensinya di dunia nyata sesuai dengan passion dan cita-citanya dengan belajar 3 semester di luar program studinya. Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak mahasiswa untuk mengembangkan dirinya. Untuk itu lah disediakan matakuliah dan mekanisme dalam melaksanakan program ini. Namun sebagai perguruan tinggi masyarakat termasuk STPMD “APMD” memerlukan inovasi dan kreativitas supaya tidak kehilangan kemerdekaannya.

Seru, dan penuh dinamika dalam perumusan kurikulum baru ini. Situasi dan kondisi pandemik covid-19 tidak menyurutkan proses-proses diskusi perubahan kurikulum. Proses diskusi kurikulum dilakukan melalui berbagai tahap dari tingkat program studi, tingkat Sekolah Tinggi dan Senat. Proses diskusi yang sebagian besar dilakukan secara daring justru bisa melibatkan seluruh dosen. Hal ini mungkin tidak akan terjadi apabila diskusi-diskusi dilakukan secara luring. Saling berbagi dalam pengetahuan dan pengalaman menjadikan proses diskusi tidak mengalami kejenuhan. Perdebatan dalam perumusan nama matakuliah dan isi matakuliah telah memperkuat posisi matakuliah itu sendiri. Proses dialektika menjadikan perumusan kurikulum menjadi lebih hidup dan bermakna.

Terbitnya buku ini sebagai upaya untuk menghadirkan dan mendokumentasikan proses-proses diskusi yang penuh makna serta menegaskan bahwa pergulatan perumumusan kurikulum bukanlah sekedar menghadirkan sederet matakuliah saja. Kehadiran buku ini juga sebagai upaya melembagakan kurikulum ke dalam sistem pendidikan di STPMD “APMD”.

Untuk itu kami ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya pada tim penulis buku yang terdiri dari Dr Sutoro Eko selaku Ketua Sekolah Tinggi yang telah memberikan energi baru bagi pengembangan kurikulum STPMD “APMD”, Dr. E.W. Tri Nugroho, Ketua Unit Jaminan Mutu yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing dan mendampingi program studi dalam perubahan kurikulum, seluruh pengurus program studi yang turut serta mengawal perubahan kurikulum dan menyumbangkan pemikirannya dalam penerbitan buku ini serta berbagai pihak yang telah memberikan sumbang saran atas terbitnya buku ini. Kepada Ir. M. Barori dan Leslie Angeningsih Ph.D yang telah memberikan prakata dengan kejernihan pemikirannya, kami juga menghaturkan terima kasih. Semoga dengan terbitnya buku ini memberikan inspirasi yang tidak pernah henti bahwa kurikulum merupakan nafas kehidupan program studi dan perguruan tinggi.

Yogyakarta, 10 November 2021

**MC. Candra Rusmala Dibyorini**



# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA: BERPIKIR KERAS BERHATI LEMBUT .....</b>	<b>iii</b>
Oleh: Muhammad Barori	
<b>PRAKATA: LINTASAN BALAP MENUJU KEMAJUAN...</b>	<b>v</b>
Oleh: RR. Leslie Retno Angeningsih	
<b>KATA PENGANTAR EDITOR.....</b>	<b>xviii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xxiii</b>
<b>BAB I KURIKULUM MERDEKA: KEBAJIKAN ILMU</b>	
<b>UNTUK KEPENTINGAN INSTITUSI .....</b>	<b>1</b>
Oleh: Sutoro Eko Yunanto	
<b>BAB II DIALEKTIKA KRITIS PERUBAHAN</b>	
<b>KURIKULUM .....</b>	<b>11</b>
Oleh: Tri Nugroho, E.W	
<b>BAB III PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT</b>	
<b>DESA MENGUTAMAKAN DESA.....</b>	<b>26</b>
Oleh: Rini Dorojati dan Hery Purnomo	
<b>BAB IV PEMBANGUNAN SOSIAL TRANSFORMATIF:</b>	
<b>INTEGRASI TIGA PILAR BESAR DALAM</b>	
<b>PRAKTIK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN</b>	<b>50</b>
Oleh: Oktarina Albizzia dan Aulia Widya Sakina	
<b>BAB V KELUAR DARI <i>MAINSTREAM</i>:</b>	
<b>MENGHADIRKAN KOMUNIKASI</b>	
<b>PEMBERDAYAAN .....</b>	<b>77</b>
Oleh: Habib Muhsin dan Irsasri	



<b>BAB VI MENGHADIRKAN <i>GOVERNMENT</i></b>	
<b>DAN <i>CITIZEN MAKING</i> .....</b>	<b>110</b>
Oleh: Guno Tri Tjahjoko dan Utami Sulistyana	
<b>BAB VII ILMU PEMERINTAHAN BERPIHAK</b>	
<b>PADA RAKYAT.....</b>	<b>126</b>
Oleh: Supardal dan R. Widodo Triputro	
<b>PENUTUP KITA BISA BERUBAH! .....</b>	<b>149</b>
Oleh: Sutoro Eko Yunanto	

**BAB I**  
**KURIKULUM MERDEKA:**  
**KEBAJIKAN ILMU UNTUK KEPENTINGAN INSTITUSI**  
**Sutoro Eko Yunanto**

Negara dan modal adalah dua kekuatan besar yang mengharubiru kehidupan ilmu dan kampus. Di bawah payung negara developmental-birokratik, ilmu-kampus diarahkan harus mengabdikan pada “pembangunan nasional” sekaligus dibuat sibuk dengan berbagai urusan administratif seperti kantor kecamatan. Pendidikan berubah menjadi pengajaran, penelitian berubah menjadi pelaporan. Tradisi ilmu liberatif dan moralitas intelektual yang membebaskan manusia menjadi tumpul. Sebagian kecil segmen insan kampus harus berjuang membuka ruang-ruang alternatif ketika hendak menumbuhkan tradisi moral intelektual.

Ketika neoliberalisme, yang membawa nalar “melucuti negara”, hadir selama dua dekade terakhir, tidak serta-merta meruntuhkan birokratisasi ilmu-kampus. Neoliberalisme justru menumpanginya negara (baca: rezim dikti) untuk merasuk ke dalam tubuh ilmu dan kampus, dengan membawa instrumentalasi akademik dan “tatakelola yang baik”, sebagai platform baru yang mengarahkan ilmu-kampus sebagai abdi pembentukan modal. Birokratisasi lama tidak hilang melainkan disepuh dengan teknokratisasi sebagai watak utama neoliberal, yang memaksa kampus sibuk dengan perencanaan, akuntabilitas, pangkalan data, digitalisasi, jurnalisisasi, dunia industri, akreditasi, dan lain-lain.

Birokratisasi dan teknokratisasi, termasuk interumentalisasi akademik, memang telah membuahkan gengsi dan prestasi gemilang, seperti indeks prestasi kumulatif, akreditasi dan *link* dengan dunia industri. Tetapi hakekat ilmu dan kampus yang menyemai tradisi intelektual, sarjana sujana dan pembebasan manusia, mengalami kelumpuhan. Elan pembebasan “ilmu amaliah, amal ilmiah”, yang diajarkan Soekarno, tidak menjadi tradisi bagi ilmu dan kampus. Bahkan “niat baik” teknokrasi mengandung kontradiksi, yakni tidak sanggup mencapai tujuan kualitas. Kuliah yang cepat selesai, indeks prestasi kumulatif yang tinggi, akreditasi yang unggul, data dan digitalisasi yang canggih, serta produksi jurnal yang melimpah, tidak menjadi jaminan sejati bagi kualitas keilmuan dan kesarjanaan. Semua itu mungkin menyumbang mobilitas sosial, yakni pergeseran dari “rakyat jelata” menjadi “rakyat jelita”, tetapi masih sulit menyumbang transformasi sosial.

Dua tahun lalu, dihadirkan oleh Mas Menteri Nadiem Makarim, “kampus merdeka” merupakan sebuah gagasan terobosan yang menarik, bertenaga dan menggairahkan. Ia hendak menembus batas, sembari membongkar sangkar besi teknokratik-birokratik yang membelenggu ilmu, kampus, dan para pembelajar. Kampus di seluruh negeri umumnya menyambut antusias terhadap jargon Mas Menteri, antara lain dengan menghadirkan “kampus merdeka” sebagai diskursus, logo baru, dan tagar bagi kampus. Semua berharap agar “kampus merdeka” bisa melucuti birokratisasi dan teknokratisasi.

Tetapi gagasan “kampus merdeka” mengalami kehilangan elan dan makna ketika hadir “standar nasional” kurikulum “Merdeka Belajar, Kampus Merdeka” (MBKM). Sebagai bentuk

teknokrasi, MBKM memiliki “niat baik” dengan cara teknikalisasi-instrumentalisasi proses belajar-mengajar, antara lain mengatur prosedur bagaimana mahasiswa bisa belajar merdeka keluar dari kampus. Lagi-lagi prosedur, sebagai ciri khas utama birokrasi-teknokrasi, yang tidak hadir semata sebagai cara tetapi sebagai proseduralisme (gagasan, nilai, dan tujuan), seperti positivisme yang lebih banyak sibuk dengan metode ketimbang pembentukan ilmu. Akibatnya kampus senang dengan “kampus merdeka” tetapi juga *senep* dengan MBKM sebagai proseduralisme.

Kampus merespons MBKM secara beragam. Tentu kampus loyalis harus melaksanakan MBKM dengan tegak lurus. Tetapi tidak jarang kampus merespons secara kritis. Kami sebagai perguruan tinggi masyarakat memberi respons secara kritis terhadap MBKM, bukan dengan kata melaksanakan melainkan menyipaki. Prinsip dasarnya jelas: kami mengikuti aturan yang *enabling*, kami patuh pada aturan yang *constraining*, dan kami bersikap kritis terhadap aturan yang *steering* seperti MBKM, misalnya dengan frasa melampaui (*beyond*) MBKM. Ketika di kampus muncul dua frasa (kurikulum konvensional vs kurikulum MBKM), saya menolak dengan tegas. Saya bilang, ini bukan kurikulum MBKM melainkan “kurikulum merdeka” APMD. Jika ada orang bertanya, “MBKM-nya dimana?”, kita bisa jawab: “Ini adalah kurikulum merdeka APMD yang diwarnai MBKM”. Inilah yang saya sebut *beyond* MBKM.

Saya ingin menegaskan bahwa kurikulum merdeka harus bersandar pada kebajikan ilmu untuk kepentingan institusi, yakni institusi Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. Apapun yang kita lakukan adalah untuk kepentingan APMD. Saya

menegaskan bahwa kepentingan APMD adalah ilmu, reputasi (jeneng), serta kepercayaan dan animo (jenang). Dengan ilmu (ilmu amaliah, amal ilmiah), APMD akan memperoleh reputasi, dan dengan reputasi, APMD akan memperoleh kepercayaan dan animo dari masyarakat. Reputasi dan kepercayaan di depan masyarakat, bagi saya, adalah paling utama, lebih utama ketimbang dunia kampus dan rezim dikti.

Ilmu adalah keutamaan, yang lebih esensial ketimbang akademik. Ilmu adalah harta yang sesungguhnya bagi manusia. Dengan kandungan nilai, pengetahuan, dan moral atau mengandung kebajikan (kebaikan dan kebenaran), ilmu berguna untuk membebaskan manusia, sekaligus memperkuat institusi seperti APMD sebagai wadah pergaulan hidup bersama. Tetapi jika ilmu mengalami instrumentalisasi secara akademik dengan positivisme dan teknokratisasi, maka ia akan mengerdilkan manusia, ia kerap menghasilkan kebenaran yang salah bahkan kebenaran yang buruk.

Saya hendak menegaskan bahwa kurikulum bukan sekadar instrumen dan aturan, melainkan jiwa-raga ilmu. Ada tiga makna penting: filsafat ilmu; praktik belajar ilmu (ilmu guru, ilmu buku, dan ilmu laku) serta dialektika kritis.

## **A. FILSAFAT ILMU UNTUK KURIKULUM**

Sebagai ekspresi ilmu, kurikulum setiap program studi bukan sekadar kumpulan matakuliah bukan pula sekadar kumpulan teori yang dihafal, melainkan menandung filsafat ontologi (hakekat), epistemologi (metodologi pembentukan pengetahuan) dan aksiologi (amal, tindakan dan manfaat). Semua orang kampus pasti tahu akan

tiga logi itu. Tetapi yang mereka tidak sadari adalah memahami tiga logi secara tekstual, tanpa kontekstual, tanpa pemahaman maknawi yang dalam. Sebagai contoh ada di Ilmu Pemerintahan yang saya pelajari. Menurut para sarjana tekstual, hakekat pemerintahan adalah pengaturan, obyek Ilmu Pemerintahan adalah eksekutif, dan Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari “hubungan antara yang memerintah dan diperintah”. Definisi tekstual itu terus-menerus diulang-ulang, sehingga tidak menyentuh makna, misalnya pemerintahan sebagai “kebijakan manusia untuk kepentingan manusia” atau pemerintahan sebagai “seni pergaulan hidup bersama”. Karena tekstual, maka Ilmu Pemerintahan terjebak menjadi “Ilmu Perkantoran”.

Karena itu saya menegaskan kepada lima program studi di APMD agar menghadirkan ontologi ilmu secara konstektual dan bermakna. Anda bisa menemukan makna ontologis program studi pada setiap narasi bab demi bab dalam buku ini. Setelah ontologi jelas dan tegas, maka langkah berikutnya adalah memperluas epistemologi dan memperdalam aksiologi. Bahkan saya mengatakan bahwa ilmu dan program studi akan menjadi hebat (dengan *jeneng* dan *jenang*) ketika memiliki epistemologi yang luas dan aksiologi yang dalam.

Apa maknanya? Epistemologi berbicara tentang teori, yang berguna untuk memahami dan menjelaskan realitas, sekaligus membimbing aksiologi. Semua ranah kehidupan dan tindakan manusia pasti mengandung teori, sehingga frasa “teori itu omong kosong” adalah cara berpikir sesat. Petani bercocok tanam pasti mengandung teori. Pupuk bersubsidi juga mengandung teori. Baik

konstitusi, legislasi, maupun regulasi yang dibuat pemerintah pasti mengandung teori. Masalahnya adalah, teori itu beragam: ada teori yang tajam dan berguna, ada pula teori dangkal yang tidak berguna. Saya sering mengkritik teori-teori teknokratik, mulai dari pembangunan hingga evidence based policy making, sebagai teori-teori yang benar di mata pembuat dan penggunaannya sendiri, tetapi tidak berguna untuk rakyat. Pembangunan yang padat teori, sekaligus diagungkan, tidak lain adalah bentuk kapitalisasi ekonomi, isolasi terhadap kehidupan lokal, dan eksklusivitas terhadap kaum marginal.

“Relasi sosial” (bahkan relasi kuasa) merupakan salah satu dimensi penting epistemologi (baca: teori) yang harus diperhatikan oleh lima program studi sebagai disiplin ilmu sosial-politik humaniora. Jika setiap prodi alpa pada relasi sosial, maka mereka tidak akan tajam membaca realitas, dan secara aksiologis malah bisa terjebak melakukan isolasi dan eksklusivitas pada subjek manusia. Artinya Pembangunan Sosial tidak hanya bicara subjek tunggal seperti pemulung, keluarga, difabel, fakir miskin, dan sebagainya, tetapi mereka memiliki relasi sosial secara luas, bahkan dengan negara dan masyarakat ekonomi. Ketika bicara “pemberdayaan”, Ilmu Komunikasi tidak hanya memampukan komunikasi, tetapi melihat subjek ketika masuk dalam relasi sosial secara luas, sehingga perspektif “pemberkuasaan” menjadi lebih penting. Demikian juga dengan Ilmu Pemerintahan tidak boleh sibuk bicara tentang “perkantoran” tetapi perlu melihat relasi kuasa dalam hal hajat hidup orang banyak. Ilmu Pemerintahan harus melihat pemerintahan dari sisi rakyat dan warga yang berhubungan dengan pemerintah dan negara.

Pengayaan perspektif (*middle range theory*) merupakan tugas penting setiap prodi untuk memperluas epistemologi. Penelitian dosen maupun skripsi/thesis mahasiswa bisa menjadi arena menarik, bukan hanya untuk menggunakan teori secara tekstual tetapi juga membentuk teori yang *novelty*. Setiap orang bisa melakukan falsifikasi teori, misalnya dengan cara “menggunakan kaki untuk menginjak pundak” orang lain yang sudah meneliti lebih dulu, untuk menghadirkan kaki-kaki baru yang berdiri secara kokoh, sehingga produksi dan akumulasi pengetahuan semakin kaya.

Dalam dunia keilmuan, ada koherensi antara epistemologi dan aksiologi. Pemisahan antara “ilmu murni” dan “ilmu terapan” atau antara teori dan praksis adalah cara berpikir sesat. Teori-teori, misalnya teori kritis, tidak hanya untuk dihafal tetapi bisa digunakan untuk mengkritisi praktik, sekaligus membuat praktik baru yang sesuai dengan teori kritis. Epistemologi yang luas bisa dikonkretkan menjadi aksiologi secara dalam. Berbagai argumen baru, sekurang-kurangnya, bisa dihadirkan ke ruang publik (tidak hanya jurnal) untuk mempengaruhi pemikiran, gerakan dan kebijakan. Sarjana juga bisa melakukan *transforming* (yang melampaui rekayasa) terhadap dunia nyata melalui kerja-kerja lapangan, seperti yang dilakukan oleh kegiatan organisasi masyarakat sipil.

## **B. PRAKTIK BERILMU: GURU, BUKU, DAN LAKU**

Para mahasiswa menempuh kuliah, menuntut ilmu, dan menjadi sarjana tidak harus menjadi ilmuwan. Mereka bisa “menjadi orang” dengan beragam profesi. Apapun profesinya, mereka harus berilmu, dan terus belajar. Orang tua masyarakat Jawa memberi petuah bahwa



ilmu diperoleh dengan *laku* (perbuatan dan perjuangan) bukan *tuku* (membeli). Bapak Pendidikan, Ki Hadjar Dewantoro juga mengajarkan kepada kita: “Setiap orang adalah guru, setiap tempat adalah sekolah”. Dari ini, saya mengatakan bahwa pembentukan ilmu maupun belajar berilmu bisa ditempuh dengan ilmu guru, ilmu buku, dan ilmu laku. Ketiganya niscaya akan membentuk kurikulum merdeka bahkan kampus merdeka.

Guru adalah kosakata universal, lebih dari sekadar *teacher*, yang hanya mengajar dan mengajak murid sebagai penghafal, atau seperti metafora “mengisi gelas kosong”. Jika konsultan bekerja memberi tahu yang sudah diketahui dan tidak penting untuk diketahui, guru memberi tahu yang belum diketahui dan penting untuk diketahui. Guru mencari dan membagi ilmu kepada muridnya dengan cara mendidik ditambah melayani. Bagaimanapun melayani adalah perbuatan mulia. Tanpa mengabaikan melayani, tetapi yang utama bagi guru adalah mendidik, atau melayani dengan mendidik. Jika guru lebih banyak melayani ketimbang mendidik, maka akan terjebak dengan memudahkan, menolong, dan memanjakan mahasiswa, sehingga proses penggemblengan dan pembebasan menjadi lemah.

Dosen adalah guru. Dalam proses keilmuan dan pendidikan, dosen sebagai guru, tidak mengisi gelas kosong melainkan membuka pintu rumah. Dosen adalah pembuka pintu, dengan cara memetakan teori, ilustrasi fakta, dan dialektika antara teori dan fakta. Mahasiswa masuk ke dalam rumah, ke setiap ruang dalam rumah, menggambarkan seluruh isi rumah. Artinya mahasiswa menjelajahi dan menguraikan teori lebih dalam dan tajam dengan dukungan

ilmu buku. Mahasiswa belajar lebih jauh ke dalam buku setelah ditunjukkan oleh guru. Belajar dengan buku, baik buku teks maupun buku analisis, terutama untuk memperoleh peta teori (perspektif) maupun posisi argumen penulis. Ketika orang memiliki perspektif maka dia akan dengan mudah membaca realitas, bahkan bisa memperoleh resolusi untuk penyelesaian masalah.

Dialektika mahasiswa dengan guru dan buku akan menempa kemampuan menulis dan berpendapat dalam diskusi. Saya juga mengarahkan agar mahasiswa memiliki kesiapan, kemauan, dan keberanian melakukan story telling, sebuah paparan cerita yang dihasilkan dari kristalisasi atas pembacaan fakta, pengalaman empirik, dan pengetahuan dari buku dan guru.

Tetapi guru bukan hanya dosen. Teman sejawat juga guru. Rakyat juga guru. Di sinilah pentingnya ilmu laku. Membaca buku yang banyak adalah laku. Pergi ke perpustakaan adalah laku. Pergi ke pasar, bergaul dengan petani, magang di dunia LSM, di desa, Pemda, partai politik, DPRD, dan sebagainya, merupakan serangkaian praktik ilmu laku. Semuanya akan menempa mahasiswa dalam pencarian ilmu sekaligus pembentukan menjadi orang, tentu bukan hanya orang untuk dirinya sendiri, melainkan menjadi orang yang berguna untuk orang lain, atau yang lazim disebut sebagai sarjana sujana, yakni sarjana yang memiliki kebajikan.

### **C. DILEKTIKA KRITIS**

“Orang bisa mengambil matakuliah tertentu dari perguruan tinggi lain, padahal tidak tahu petanya”, demikian ungkap sahabat saya, Suharyanto. Ini adalah tradisi copas atau replikasi, seperti

Pemda melakukan copas ketika menyusun Perda, atau mahasiswa bikin makalah dengan cara copas ketika menulis makalah. Dosen suka mengritik copas ala Pemda dan mahasiswa, tetapi ketika membikin kurikulum, juga melakukan copas dari tempat lain, tanpa mengetahui peta dan makna di balik di matakuliah.

Pembentukan kurikulum juga biasa seperti rapat pemegang saham. Setiap dosen memiliki *interest* dan kapling matakuliah, kemudian dituangkan ke dalam struktur matakuliah. Ketika dosen memperoleh matakuliah baru di luar interest dan kapling, maka yang bersangkutan tidak sanggup menjalani, karena harus belajar lagi. Karena itu dosen rajin mengajar tetapi malas belajar.

Baik copas maupun kapling itu adalah tradisi awet bagi prodi ketika melakukan penyusunan kurikulum. Saya berjuang membongkar tradisi hafalan yang diawetkan oleh birokratisasi-teknokratisasi itu. Bagi saya pembentukan kurikulum, terutama kurikulum merdeka, harus melandaskan pada kebajikan ilmu melalui proses dialektika kritis. Dialektika kritis berguna untuk menguraikan filsafat ilmu menjadi struktur, konten dan koherensi kurikulum, sekaligus juga menyusun platform (seperti visi dan misi prodi) yang *beyond* (melampaui) teks teknokratik-normatif. Bukan dengan rapat singkat meski berkali-kali, dialektika kritis berjalan dengan proses diskusi dan *tik-tok* yang tajam dan dalam, termasuk melakukan falsifikasi terhadap setiap gagasan.

## **BAB II**

# **DIALEKTIKA KRITIS PERUBAHAN KURIKULUM**

**Tri Nugroho, E.W**

### **A. SEKEDAR AKTIVITAS RUTIN?**

Perubahan kurikulum merupakan aktivitas rutin yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi, seperti disampaikan oleh Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Aris Junaidi: Perubahan kurikulum di perguruan tinggi merupakan aktivitas rutin yang harus dilakukan sebagai tanggapan terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) (*scientific vision*), kebutuhan masyarakat (*societal needs*), serta kebutuhan pengguna lulusan (*stakeholder needs*) (Dirjen Dikti, Kemendikbud, 2020, Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, viii).

STPMD “APMD” tidak memandang perubahan kurikulum Tahun 2021 semata-mata sebagai “aktivitas rutin” yang biasa, namun sebagai aktivitas yang esensial dan penting karena:

*Pertama*, STPMD “APMD” memahami kurikulum sebagai batang tubuh pengetahuan (Body of knowledge), jiwa-raga pengetahuan dan bukan sekedar “seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi” (Permendikbud RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang SNDikti, pasal 1).

*Kedua*, STPMD “APMD” merasa perlu mendudukkan (*positioning*) dan memperkuat (*empowering*) kedudukan Ilmu Pengetahuan agar Ilmu Pengetahuan mampu memberikan tanggapan secara tepat atas perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS), kebutuhan masyarakat, serta kebutuhan pengguna lulusan. Positioning dan empowering ini penting agar dalam memberikan tanggapan atas perkembangan dan menjawab kebutuhan yang ada, ilmu pengetahuan tidak larut, tidak menjadi obyek saja, namun dapat berdiri tegak lurus sebagai subyek atas perubahan dan memandang perubahan dalam perspektifnya.

## **B. PETA JALAN PERUBAHAN KURIKULUM**

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” memandang perubahan kurikulum Tahun 2021 sebagai aktivitas yang esensial dan penting. Oleh karenanya, perubahan kurikulum tahun 2021 dilakukan oleh STPMD “APMD” secara serius melalui serangkaian acara berikut:

*Pertama*: Ketua STPMD “APMD” pada pidato kelembagaan dalam rangka Dies Natalis STPMD “APMD”, tanggal 17 November 2019, menyatakan bahwa dirinya membawa misi perubahan secara menyeluruh di STPMD “APMD” sehingga STPMD “APMD” menjadi lebih bermartabat, maju dan sejahtera. Perubahan yang dimaksud termasuk perubahan kurikulum sebagai tubuh pengetahuan (*body of knowledge*), jiwa-raga pengetahuan. Tujuan perubahan kurikulum ialah mengembangkan keilmuan, menyikapi MBKM dan menjawab kebutuhan yang berkembang di masyarakat, serta mewujudkan visi-misi Sekolah Tinggi.

*Kedua*, kemudian misi untuk melakukan perubahan kurikulum ditindaklanjuti dengan pembicaraan mengenai platform kurikulum pada tingkat prodi bersama para pakar: Prodi Sarjana Ilmu Pemerintahan dengan Dr. Eko Sutoro Yunanto, M.Si, Prodi Sarjana Ilmu Komunikasi dengan Prof. Dr. Tukiman, Prodi Sarjana Pembangunan Sosial dengan Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si. Berkali-kali Ketua STPMD “APMD” menegaskan bahwa *Platform* kita adalah: *Positioning* institusi dan program studi, artinya mendudukkan institusi dan prodi pada “tempat” duduknya yang benar dan kokoh.

*Ketiga*, akhir Desember 2020, Wakil Ketua I mengajak seluruh prodi untuk mempelajari dokumen yang dikeluarkan oleh Dirjen Dikti, Kemendikbud, Tahun 2020 tentang Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka; dan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka. Pembicaraan yang berbasis dua dokumen tersebut bertujuan menyikapi kurikulum MBKM, yang akan dituangkan dalam kurikulum Tahun 2021 di STPMD “APMD”. Dengan mempelajari kedua dokumen tersebut, diharapkan para pengurus prodi dapat melakukan diskusi-diskusi dengan para dosen di tingkat prodi masing-masing dan menentukan arah perubahan kurikulum Tahun 2021.

*Keempat*: gerak bersama pada level institusi diadakan dalam rapat perubahan kurikulum pada tanggal 30 Juni, 15, 17 Juli 2021 dan diakhiri dengan Workshop Perubahan Kurikulum 2021 tanggal 19 Juli 2021. Dalam kesempatan tersebut, masing-masing prodi mempresentasikan hasil perubahan kurikulum 2021 dan kemudian

disarikan oleh Ketua STPMD “APMD”. Kemudian berdasarkan sari-sari pikiran Ketua STPMD “APMD”, masing-masing prodi diberi kesempatan untuk melakukan koreksi, pendalaman, dan penyusunan kurikulum lagi.

*Kelima:* tindak lanjut dari langkah keempat yang terlaksana pada tanggal 4 Agustus 2021 dimana masing-masing prodi menyampaikan laporan kemajuan yang telah dicapai. Pada kesempatan ini Kaprodi Ilmu Komunikasi menyampaikan bahwa laporan kemajuan yang disampaikan tersebut merupakan hasil pertemuan dengan para alumni, user dan dosen-dosen prodi IK secara daring tanggal 23 dan 30 Juli 2021. Kaprodi Pembangunan Sosial menyampaikan bahwa laporan kemajuan ini merupakan hasil pertemuan daring dari 7 dosen prodi Pembangunan Sosial ditambah Dr. Sugiyanto, MM dan Dr. Sriwidayanti, S.Pd.I., M.A, pada tanggal 21, 22, 23, dan 27 Juli 2021. Sementara itu Prodi Ilmu Pemerintahan melaporkan kemajuan yang telah dicapai melalui pertemuan dengan para alumni, user dan para dosen sebanyak 6 kali, dimana pertemuan tanggal 7 dan 14 Juni 2021 dihadiri pula oleh Dr. Tri Nugroho dan Dra. MC. Candra Rusmala, M.Si (Wakil Ketua I). Sementara itu Prodi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD-DIII) menyampaikan laporan kemajuan yang dicapai melalui pertemuan-pertemuan dengan para alumni, user, dan dosen-dosen prodi PMD yang diadakan tanggal 26, 27, 29 dan 30 Juli 2021. Sedangkan Prodi Magister Ilmu Pemerintahan menyampaikan laporan kemajuan berdasarkan pertemuan dosen-dosen Prodi Magister Ilmu Pemerintahan dan survey yang dilaksanakan oleh Ibu Dr. Sriwidayanti, S.Pd.I., M.A.

*Keenam*, pertemuan daring pada tahap ini diisi dengan penyampaian revisi kurikulum 2021 dari masing-masing prodi. Pada tanggal 9 Agustus 2021, pertemuan sesi 1, diisi dengan presentasi dari prodi Ilmu Komunikasi dan sesi 2 diisi dengan presentasi prodi Ilmu Pemerintahan. Pada tanggal 11 Agustus 2021, sesi 1 diisi dengan presentasi dari prodi Pembangunan Sosial dan sesi 2 diisi dengan acara presentasi dari Prodi PMD. Sedangkan pada tanggal 12 Agustus 2021, sesi 1 diisi dengan acara presentasi dari Prodi Magister Ilmu Pemerintahan dan sesi 2 diisi dengan acara pelipatan lokakarya Kurikulum oleh Ketua STPMD “APMD”.

*Ketujuh*, pertemuan daring pada tanggal 19 dan 23 Agustus 2021 diisi dengan acara koordinasi teknis kurikulum. Pada kesempatan ini disepakati bersama matakuliah-matakuliah tiap prodi yang akan dijadikan matakuliah MBKM.

*Kedelapan*, pertemuan tanggal 25 Agustus 2021 adalah pertemuan tingkat Senat dimana masing-masing prodi kembali mempresentasikan hasil revisi kurikulum. Berhubung masih perlu adanya revisi, maka pertemuan tingkat Senat dilanjutkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Pada acara ini dilakukan klarifikasi atas revisi yang dilakukan oleh masing-masing prodi. Pada kesempatan ini Senat memutuskan untuk dilakukan pertemuan terbatas antara Pimpinan dan Prodi IK dan PS guna merevisi kembali kurikulum kedua prodi tersebut.

*Kesembilan*, Tanggal 1 September 2021 dilakukan pertemuan terbatas antara Pimpinan dan Prodi Ilmu Komunikasi. Acara ini diadakan guna memastikan *content* kurikulum baru Prodi Ilmu



Komunikasi. Setelah dilakukan pembahasan bersama, kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi diterima sepenuhnya oleh Pimpinan. Perbaikan perumusan dan bahasa secara final diserahkan kepada pengurus Prodi Ilmu Komunikasi. Lalu pada tanggal 2 September 2021 diadakan pertemuan antara pimpinan dengan Prodi Pembangunan Sosial, guna menyempurnakan visi, misi sampai kurikulum. Setelah dilakukan pembahasan bersama, kurikulum Prodi Pembangunan Sosial diterima sepenuhnya oleh Pimpinan. Perbaikan perumusan dan bahasa secara final diserahkan kepada pengurus Prodi Pembangunan Sosial.

*Kesepuluh*, Tanggal 3 September 2021 diselenggarakan Rapat Senat guna menetapkan Kurikulum 2021 untuk seluruh Prodi.

### **C. DIALEKTIKA KRITIS**

Selama kegiatan yang panjang, proses dialektika kritis terjadi dalam melakukan perubahan kurikulum. Perubahan kurikulum tidak jarang terjebak dalam kebiasaan *copy paste*. STPMD “APMD” secara sadar ingin mengatasi kebiasaan itu dengan mengembangkan kebiasaan baru, yaitu kebiasaan dialektika kritis. Dialektika kritis diterapkan dalam memahami:

*Pertama*, keilmuan. Setiap mahasiswa memperoleh pengetahuan dari ilmu yang dipelajari. Ketua STPMD “APMD” memberi pencerahan bahwa ilmu tidak hanya diperoleh dari buku-buku pengetahuan, namun juga dari guru-guru yang hidup dekat dan bersama di sepanjang perjalanan hidup mahasiswa dan dari perilaku sendiri serta banyak pihak. Dengan kata lain, mahasiswa memperoleh pengetahuan dari ilmu guru, ilmu laku dan ilmu buku.

Ketiganya menggabungkan kenyataan dan cita-cita, antara praktek dan teori, antara rasio dan pengalaman empirik.

**Kedua**, ilmu, jeneng, jeneng. Banyak Perguruan Tinggi melakukan perubahan kurikulum atas dasar perubahan atau dinamika masyarakat yang berkembang serta tuntutan standar akademik yang diwajibkan. STPMD “APMD” sebagai Sekolah Tinggi Masyarakat lebih dari itu. Ia harus menghidupi dirinya. Melalui dialektika kritis, Sekolah Tinggi memahami pengembangan ilmu tidak terpisah dari kepercayaan (jeneng) dan kesejahteraan bersama (jeneng). Pengembangan ilmu dicapai melalui perubahan kurikulum, yang mengkokohkan, menegaskan dan melestarikan ke“khas”an atau penciri lembaga yang berdaya pikat untuk merebut pasar. Ini bukan idealisme semata. Idealisme dalam praktik dikerjakan dengan realisme, sebuah seni kemungkinan, atau apa yang mungkin bisa dilakukan. Realisme bukan pragmatis, sebuah tindakan “apa yang mudah dikerjakan”. Dialektika kritis dalam membaca, mendengarkan, membicarakan, meneliti, menulis, dan menceritakan adalah jalan realis yang ditempuh untuk menerobos rutinitas, sekaligus meraih perubahan dan kemajuan.

**Ketiga**, kompetensi Lulusan. Perubahan kurikulum yang dilakukan oleh Sekolah Tinggi diharapkan mampu menciptakan kompetensi baru bagi para mahasiswa. Untuk menghasilkan kompetensi lulusan yang dimaksud, STPMD “APMD” menggunakan perspektif ontologi, epistemologi dan aksiologi. Misalnya untuk prodi Ilmu Pemerintahan: kompetensi ontologis para lulusan menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang mempunyai kemampuan

memahami dan menghayati hakekat pemerintahan dari rakyat oleh pemerintah dan parlemen untuk warga. Kompetensi epistemologis menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang mempunyai kemampuan memahami pembentukan pemerintah (*government making*) dan pembentukan warga (*citizen making*) dengan kerangka 5 konsep besar (*government, governing, governability, governance* dan *governmentality*). Kompetensi aksiologis menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang mampu dan terampil dalam membuat produk-produk pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak.

***Keempat***, ilmu yang kokoh. Untuk merealisasikan kompetensi para lulusan, dibutuhkan ilmu yang utuh dan kokoh. Secara filosofis, ilmu yang utuh dan kokoh duduk di atas landasan ontologis, epistemologis dan aksiologis. Oleh karena itu, dalam perubahan kurikulum ketiga landasan didialektikkan secara kritis dengan kenyataan yang ada sehingga posisi ilmu semakin utuh dan kuat. Sebagai contoh Ilmu Pemerintahan. Secara ontologi ilmu pemerintahan dalam konteks Indonesia didasarkan pada sila ke empat. Secara epistemologi ilmu pemerintahan yang dikembangkan Mazhab Timoho memiliki lima paradigma (perspektif). Artinya dalam pandangan mazhab Timoho fenomena pemerintahan dalam masyarakat dikaji dan dibingkai dengan perspektif ilmu pemerintahan. Secara aksiologi ilmu pemerintahan berpihak pada rakyat sesuai sila ke lima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya Ilmu pemerintahan tidak melayani elite politik atau birokrat, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, melalui dialektika kritis, dihasilkan sebuah ilmu yang utuh dan kokoh karena jelas dasar keberadaannya, perspektif dan manfaatnya.

*Kelima*, kurikulum. Banyak pihak mendefinisikan kurikulum sebagai seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi. Lebih dari itu, STPMD “APMD” melalui dialektika kritis memaknai kurikulum sebagai *body of knowledge* (tubuh pengetahuan), jiwa-raga pengetahuan. Kurikulum bertujuan untuk mengembangkan keilmuan, menyikapi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, menjawab kebutuhan dan tuntutan yang sedang berkembang di masyarakat serta mewujudkan visi-misi Sekolah Tinggi. Ruang lingkup kurikulum mencakup: Ilmu (meliputi batang-tubuh pengetahuan, yang mencakup landasan ontologis, epistemologis, aksiologis); *Platform: Positioning* institusi dan program studi; dan Instrumen akademik (merupakan pengetahuan yang diinstrumentasi, yang disusun dengan menjabarkan ilmu dan *platform* (alur, kewajiban belajar, bentuk kegiatan, model pembelajaran, dan persyaratan).

Ternyata dalam proses perubahan kurikulum tahun 2021, kurikulum sebagai *body of knowledge* merupakan masalah yang panjang didiskusikan. Dalam rapat secara daring tanggal 4 Agustus 2021 saja, Ketua STPMD “APMD” sampai tiga kali mengatakan bahwa:

Prodi-prodi masih melihat kurikulum sebagai rangkaian matakuliah-matakuliah yang tak utuh, masih terpotong-potong. Kita dapat menyebut dan mengetahui masing-masing pohon namun kita tak memiliki pemahaman secara utuh tentang hutan. (Hasil transkrip dari rekaman rapat tanggal 4 Agustus 2021).

Ketua STPMD “APMD” menyampaikan pendapatnya ketika memberikan tanggapan atas penyampaian kemajuan perubahan kurikulum dari masing-masing prodi. Atas fakta itu, Ketua STPMD “APMD” meminta agar para pengurus prodi merivisi kembali kurikulum yang disusunnya, melalui proses pemikiran, refleksi dan renungan yang mendalam agar diperoleh sebuah kurikulum yang utuh, sebagai *body of knowledge*.

Ketika rapat perubahan kurikulum diadakan lagi secara daring tanggal 12 Agustus 2021, ternyata perbaikan yang dilakukan prodi-prodi masih belum “duduk” - sebuah istilah yang seringkali digunakan oleh Ketua STPMD “APMD” - sehingga masih perlu diperbaiki. Ketua mengatakan: “masih ada 1 minggu bagi setiap Prodi itu untuk mempertajam, untuk meng-*clear*-kan supaya duduk. Nanti secara umum saya akan melihat satu per satu tiap prodi”. Kepada Prodi Pembangunan Sosial Ketua mengatakan:

Untuk program studi pembangunan sosial silakan dibuka lagi, disesuaikan dulu visi misinya itu, bikin kalimat yang lebih sound bite, yang lebih bertenaga, jangan terlalu ilmiah kalimatnya, seperti: kalimat unggul, professional, kompeten, itu kan bahasa ilmiah banget. *Sing rodo nendang ngono lho* maksudku. Itu berlaku untuk semua juga ya. Nanti kita sesuaikan: kompetensi, profil lulusan, dan sebagainya, disesuaikan semuanya. Kalau nanti perlu diskusi dengan saya, saya dengan senang hati (Hasil transkrip dari rekaman rapat tanggal 12 Agustus 2021)

Ia menekankan: “kurikulum itu semuanya harus kita letakkan pada kepentingan APMD. Rezim Dikti tidak boleh di atasnya. Jadi yang sedang kita bangun adalah kurikulum Merdeka APMD”. Ketua

menjelaskan bahwa “Kepentingan itu artinya ada visi, misi, ada aspirasi, ada representasi, ada banyaklah”. Ketua STPMD “APMD” mengakui bahwa:

“*raw material* kita memang begitu, mahasiswa kita memang begitu. Itu harus menjadi tantangan kita. Itu menjadi keluhan kita, tapi sekaligus juga menjadi mandat dan tantangan bagi kita” (Hasil transkrip dari rekaman rapat tanggal 12 Agustus 2021)

Kata-kata terakhir Ketua menggariskan optimisme yang kuat, bahwa kita bisa membuat kurikulum yang dapat menjawab tantangan dan mandat yang diberikan oleh orang tua dan mahasiswa kepada kita.

Ketika memberikan masukan untuk perbaikan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi, Ketua mengatakan:

Sama juga ketika prodi komunikasi mengangkat isu atau platform komunikasi pemberdayaan, kalau memang yakin, teguh, maka cara berpikirnya dialektis, bukan hanya komunikasi melihat pemberdayaan, tapi pemberdayaan melihat komunikasi.... kita tidak hanya berbicara mengenai proses media, alat, dan sebagainya, tapi juga konten. Kontennya itu disumbang dari pemberdayaan juga, dari rakyat, dari pinggiran, dari adat, itu yang memang harus kita hadirkan...., *presenting*, menghadirkan rakyat di dalam kancan komunikasi. Jadi ini dialektika, antara komunikasi sama Rakyat (Hasil transkrip dari rekaman rapat tanggal 12 Agustus 2021).

Dialektika kritis dalam perubahan kurikulum 2021 sangat terasa, menggigit dan jelas. Pertemuan yang membahas perubahan kurikulum 2021 masih terus berjalan, dengan agenda merevisi

kurikulum masing-masing prodi. Pada tanggal 25 Agustus 2021 dilaksanakan pertemuan tingkat Senat dimana masing-masing prodi kembali mempresentasikan hasil revisi kurikulum. Ternyata hasil revisi kurikulum kali ini pun masih belum sepenuhnya diterima oleh Senat, setidaknya oleh Ketua Senat. Berhubung masih perlu adanya revisi, maka pertemuan tingkat Senat dilanjutkan pada tanggal 31 Agustus 2021. Pada tanggal ini dilakukan klarifikasi atas revisi yang dilakukan oleh masing-masing prodi. Pada kesempatan ini Senat memutuskan untuk menerima kurikulum seluruh prodi, dengan catatan bahwa masih perlu dilakukan pertemuan terbatas antara Pimpinan, Prodi Ilmu Komunikasi dan Pembangunan Sosial guna menyempurnakan kembali kurikulum kedua prodi tersebut.

Tanggal 1 September 2021 dilakukan pertemuan terbatas antara Pimpinan dan Prodi Ilmu Komunikasi. Acara ini diadakan guna memastikan content kurikulum baru Prodi Ilmu Komunikasi. Setelah dilakukan pembahasan bersama, dihasilkan rumusan visi-misi Prodi Ilmu Komunikasi sebagai berikut: Visi Prodi Ilmu Komunikasi ialah “Menjadi Pusat Pengembangan Komunikasi Pemberdayaan Yang Menghadirkan Keunikan & Keragaman Lokal Serta Memperjuangkan Daulat Rakyat”. Kemudian dua misi baru yang dihasilkan adalah misi kedua dan ketiga, yaitu: “Mengembangkan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang komunikasi pemberdayaan serta kompetensi peserta didik yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat”. Selanjutnya perbaikan rumusan dan bahasa kurikulum diserahkan kepada pengurus Prodi Ilmu Komunikasi.

Pada tanggal 2 September 2021 diselenggarakan pertemuan dengan Prodi Pembangunan Sosial. Setelah dilakukan pembahasan bersama, dihasilkan rumusan visi-misi Prodi Pembangunan Sosial sebagai berikut: Visi Prodi Pembangunan Sosial ialah “Menjadi program studi yang khas, unggul dan bermartabat dalam menghadirkan keilmuan pembangunan sosial untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial”. Sedangkan misi Prodi Pembangunan Sosial seluruhnya baru, jika dibandingkan dengan misi yang lama. Misi Prodi Pembangunan sosial: “Mencerahkan pengetahuan dan praksis pembangunan dengan pendekatan kritis-alternatif; Merajut sinergi antara Negara, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil dalam praktik pembangunan; dan Membentuk Sarjana Pembangunan Sosial yang sujana dan berpihak pada demokrasi dan kemanusiaan. Selanjutnya perbaikan rumusan dan bahasa kurikulum diserahkan kepada pengurus Prodi Pembangunan Sosial.

Baru pada tanggal 3 September, Rapat Senat menyetujui seluruh hasil perubahan kurikulum seluruh Prodi tahun 2021.

Dari seluruh catatan peristiwa penjualan kurikulum 2021 terlihat bahwa dialektika yang terjadi membuktikan bahwa STPMD “APMD” sangat serius dalam membahas kurikulum tahun 2021. Dialektika yang terjadi sangat konstruktif, meski melalui jalan panjang dan melelahkan. Hasil dialektika kritis kini dirasakan sebagai sebuah pencerahan, dimana kurikulum dirasakan sebagai jantung kehidupan *civitas accademica*, dan dipandang secara utuh sebagai *body of knowledge*, jiwa raga pengetahuan.



*Keenam*, evaluasi pembelajaran. Kurikulum yang utuh dan kokoh perlu dievaluasi terus menerus melalui evaluasi pembelajaran. Pembelajaran seringkali dimengerti sebagai proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Biasanya evaluasi pembelajaran dilakukan oleh mahasiswa terhadap para dosennya. Evaluasi semacam itu dangkal dan tak menyegarkan serta tak memperbaiki kurikulum. STPMD “APMD” meyakini bahwa evaluasi juga harus dilihat secara utuh berdasarkan tiga dasar keilmuan, yaitu ontologi, epistemologi dan aksiologi. Melalui dialektika kritis STPMD “APMD” melaksanakan evaluasi pembelajaran berdasarkan 4 aspek pembelajaran, yaitu: Ontologi, Epistemologi, Pedagogi dan Aksiologi. Secara konkrit, dari aspek ontologi diketahui apakah materi belajar yang diberikan dosen memberi pencerahan, membuka wawasan/pikiran mahasiswa menjadi lebih luas? Dari aspek epistemologi diketahui apakah metode dan media pembelajaran mudah dipahami dan mudah diakses? Dari aspek pedagogis diketahui apakah pelayanan dosen membuat mahasiswa berani membuka diri dan membantu pembentukan pribadi mahasiswa? Dari aspek aksiologis diketahui apakah dosen memberikan motivasi kepada mahasiswa untuk melakukan inovasi dan kreativitas. Dengan evaluasi pembelajaran semacam itu, kurikulum, senantiasa dalam dialektika kritis, yang menyegarkan dan memperbaharui.

Demikianlah dialektika kritis yang terjadi selama proses perubahan kurikulum tahun 2021. Sebuah proses pencerahan yang membuat seluruh *civitas accademica* *ajur, ajer*. Tak ada satu prodi pun ingin tinggal sendiri, apalagi ditinggalkan. Seluruh prodi ingin maju

bersama-sama. Selain itu kurikulum dari prodi-prodi ingin menjadi satu kesatuan yang utuh dan kokoh, sehingga membentuk *body of knowledge*, jiwa raga pengetahuan, yang menjadikan mahasiswa memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk masa depannya.

### **DAFTAR PUSTAKA:**

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang *Standar Nasional Pendidikan Tinggi*.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2020, *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*.

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. 2016. *Panduan Akademik dan Kemahasiswaan*, Yogyakarta.

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”. 2016. *Visi-Misi STPMD “APMD” 2022-2026*, Yogyakarta.

Panitia Peninjauan Kurikulum 2021 STPMD “APMD”. *Transkrip Rekaman Rapat Peninjauan Kurikulum 2021*, Tanggal 4 dan 12 Agustus 2021.

# **BAB III**

## **PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA MENGUTAMAKAN DESA**

**Rini Dorojati dan Hery Purnomo**

### **A. PENGANTAR**

Program Studi Pembangunan Masyarakat Desa jenjang pendidikan Diploma Tiga merupakan salah satu Program Studi (Prodi) di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat “APMD” pada tahun 2021 melaksanakan peninjauan kurikulum bersama dengan prodi lainnya yakni Prodi Pembangunan Sosial, Prodi Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Pemerintahan semuanya jenjang pendidikan S1 dan Program Magister Pemerintahan Jenjang Pendidikan S2. Agenda peninjauan kurikulum memang menjadi agenda prioritas dari lembaga, terutama terkait dengan masa berlaku kurikulum 2016 serta Kurikulum Kampus Merdeka. Pada tahun ini pula Prodi PMD genap berusia 56 tahun sesuai dengan perjalanan dari pendirian Akademi Pembangunan Masyarakat Desa menjadi STPMD “APMD”.

Usia yang panjang telah memberikan banyak pengalaman dalam pengelolaan maupun dari segi jumlah lulusan yang mencapai lebih dari 13.000 orang tersebar di wilayah nusantara. Pendiri APMD Bapak Drs. M. Soetopo telah menentukan pilihan jenjang pendidikan diploma tiga pada waktu itu karena lulusan jenjang pendidikan diploma tiga terbuka luas peluang kerja dalam membantu pemerintah memakmurkan desa. Lulusan APMD langsung tertampung di instansi

pemerintah menempati posisi pada pekerjaan yang berhubungan dengan pembangunan desa dan pembangunan masyarakat desa.

Lulusan APMD jenjang diploma tiga memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam mengembangkan kapasitas masyarakat desa. Sebagai cikal bakal APMD, Prodi PMD Diploma Tiga sebagai jalur profesional merespon regulasi berproses dan berkembang menyesuaikan jaman menjadi D4, SP1, SP2 disamping pendidikan akademik S1, S2 dan S3 dan secara kelembagaan APMD menjadi institut. Pemikiran pendiri tersebut menjadi warna perjalanan APMD hingga STPMD “APMD” saat ini dan perhatian bagi setiap pimpinan lembaga perguruan tinggi serta lingkungan Prodi PMD.

Perkembangan kehidupan masyarakat akibat dari perkembangan pengetahuan, peningkatan pendidikan, gaya hidup serta teknologi informasi, memberikan perubahan di berbagai sektor kehidupan. Kondisi tersebut perlu disikapi oleh perguruan tinggi dengan melakukan evaluasi serta prediksi atas perubahan-perubahan yang terjadi. Disamping itu, perkembangan kehidupan masyarakat berkonsekwensi menghadirkan regulasi yang memberikan pedoman dan arah pendidikan tinggi. Bagi Prodi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD), jenjang diploma tiga termasuk dalam jenjang pendidikan vokasi dimana pengelolaan berada di Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi (Diksi). Ciri khas pendidikan tinggi vokasi memberikan kemampuan aplikatif dan kemampuan inovatif. Transformasi jenjang pendidikan diploma tiga menjadi diploma empat merupakan program kerja Diksi saat ini. Program tersebut telah sejalan dengan pemikiran Drs. M. Soetopo bahwa pendidikan

diploma merupakan jenjang pendidikan yang lebih dekat dengan dunia kerja. Untuk itu program tersebut mendapat sambutan dan diperjuangkan. Prodi PMD jenjang diploma tiga pernah mencoba untuk *upgrade* ke arah jenjang pendidikan diploma empat, namun belum berhasil sebagaimana yang diharapkan. Prodi PMD jenjang diploma tiga dengan kesempatan perancangan kurikulum baru 2021 pada menyiapkan modal dasar sebagai rekam jejak menjadi basis data dalam upaya melakukan transformasi ke jenjang diploma empat.

Peninjauan kurikulum 2021 merupakan momentum Prodi PMD meningkatkan kualitas pengelolaan tridarma perguruan tinggi dalam menyongsong perubahan jaman. Capaian Pembelajaran lulusan PMD memiliki kemampuan dan ketrampilan dalam pembangunan desa dan masyarakat desa, maka bagi lulusan tetap mengacu pada keterampilan yang dibutuhkan untuk kemajuan desa yakni keterampilan dalam pemerintahan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan pembangunan kemasyarakatan. Selama proses peninjauan kurikulum Prodi PMD penuh dinamika, yakni upaya penyadaran diri bahwa Prodi PMD merupakan program pendidikan tinggi vokasi yang berbeda dengan jenjang pendidikan akademisi. Program pendidikan diploma atau vokasi merupakan pendidikan yang dekat dengan dunia kerja, maka kurikulum disusun mendekati diri dengan dunia kerja yang mampu memberikan pengetahuan dan keterampilan bagi mahasiswa tentang medan tempur di desa. Berbagai pertanyaan dan saran kurikulum 2021 menjadi pembelajaran bersama seluruh dosen STPMD “APMD” cikal bakal ini diharapkan bertransformasi sebagaimana cita-cita pendiri.

## **B. KURIKULUM 2016 DAN KURIKULUM 2021**

Kurikulum merupakan hal yang penting untuk sebuah institusi pendidikan terutama program studi. Kurikulum diibaratkan sebagai nyawa sehingga memerlukan perancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara sistematis dan matang. Kurikulum yang ada tentu bersifat dinamis dengan melihat berbagai aspek seperti perkembangan zaman, pengetahuan, teknologi, kompetensi, dan kebutuhan masyarakat dan tuntutan pengguna Prodi PMD yang fokus kajian keilmuan tentang desa. Secara historis disajikan beberapa peristiwa yang mewarnai perjalanan penyusunan kurikulum 2021 prodi. Penyusunan kurikulum 2021 secara tidak langsung dimulai pada saat penyusunan RKA Prodi PMD tahun 2020-2021. Penyusunan RKA menghasilkan kegiatan yang mengarah ke alumni. Kegiatan bersama dengan alumni merupakan sebuah cara untuk mengetahui dan mengidentifikasi lulusan Prodi PMD berhasil di masyarakat atau dunia kerja. Kegiatan temu alumni bertujuan untuk mendengar masukan dari alumni bahkan temu pengguna alumni atau *user* terkait dengan perkembangan prodi.

Proses peninjauan kurikulum 2016 diawali dengan mempersiapkan berbagai hal yaitu menyiapkan dokumen-dokumen yang perlu dipelajari dan dipahami bersama sebagai bahan pembahasan di tingkat prodi. Selain itu melakukan kegiatan dengan pihak eksternal prodi yang bertujuan memperoleh masukan dengan menyelenggarakan webinar dengan mengundang narasumber yang ahli tentang desa, sarasehan dengan alumni dan sarasehan dengan pengguna lulusan. Prodi PMD menyelenggarakan kegiatan

sarasehan dilaksanakan pada 21-22 April 2021. Kegiatan sarasehan dengan *stakeholders* dilakukan secara online. Memang dua tahun belakangan ini kondisi dunia disibukkan dengan pandemi Covid 19, sehingga aktivitas yang dijalankan mengalami pembatasan-pembatasan. Kegiatan yang berhubungan dengan pihak luar Prodi PMD dilakukan secara daring. Sedangkan dengan warga prodi dilakukan secara luring dan daring. Hasil dari sarasehan dengan *stakeholders* yang kemudian menjadi bahan bagi pengurus dan dosen dalam merancang kurikulum. Kegiatan diskusi prodi ada yang dilakukan secara luring dengan memperhatikan protokol kesehatan di ruang prodi.

Kurikulum 2016 Prodi Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Diploma Tiga merupakan formulasi yang sudah tersusun dengan baik dan sistematis dengan roh adalah pengimplementasian Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014. Pembangunan masyarakat desa dalam konteks undang-undang desa dapat dimaknai menjadi penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penyelenggaraan desa mulai dari aktivitas pemerintahan desa hingga bagaimana aktivitas berdesa dijalankan. Pemberdayaan masyarakat desa menyoar pada upaya peningkatan kapasitas masyarakat desa baik dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya.

Peninjauan kurikulum Prodi PMD tahun 2016 didasarkan kepada perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat serta semakin masif penggunaan teknologi digital akibat bencana yakni pandemi covid 19 serta dampak pandemi yang berimbas pada aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat yang melemah. Desa menjadi tumpuan

penyelamatan ekonomi masyarakat dan negara karena ekspor hasil-hasil pertanian naik. Akses desa semakin terbuka dengan digitalisasi dan perubahan pada tatanan kehidupan menjadi bahan diskusi di tingkat prodi.

Prodi PMD dalam merancang kurikulum materi pembelajaran kepada mahasiswa yaitu menyiapkan materi yang adaptif terhadap perubahan yang terjadi di desa, antara lain pemerintah desa harus paham tentang regulasi, masalah lingkungan hidup, tuntutan pemenuhan kebutuhan masyarakat tanpa menimbulkan konflik, ekonomi yang mensejahterakan semua warga. Matakuliah tentang pemetaan desa secara geografi, sosial, ekonomi, dan kebencanaan merupakan matakuliah usulan alumni sebagai penguat kapasitas mereka di masyarakat. Hal ini menjadi perhatian dalam pembentukan matakuliah. Peluang dan tantangan yang terjadi di desa saat ini dan yang akan datang semakin kompleks. Tata kehidupan masyarakat yang berubah menjadi perhatian.

Pengalaman kerja alumni Prodi PMD di beberapa instansi pemerintah, pemerintahan desa, pendamping masyarakat dan pembangunan. serta mandiri berwirausaha memberikan pengetahuan tentang arah penyusunan kurikulum prodi PMD tahun 2021 dengan menyiapkan kajian tentang desa dan perubahan yang terjadi di desa, dari segi sumber daya, tata pemerintahan, lembaga ekonomi dan masyarakat. Kemajuan teknologi dengan penggunaan komunikasi dan aplikasi digital dalam mengerjakan tugas perangkat desa serta mitigasi bencana di berbagai sendi kehidupan masyarakat, dan institusi perlu didiskusikan dari sudut pandang desa.



Tantangan penyusunan kurikulum Prodi 2021 yaitu pembentukan matakuliah dengan menyiapkan bahan kajian untuk capaian pembelajaran matakuliah dan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dengan memperhatikan KKNi merupakan upaya kerja keras yang harus dijalani. Matakuliah dengan bahan kajian yang saling mendukung merupakan usaha yang dilakukan sebagai penguat capaian pembelajaran dalam Matakuliah

### **C. ARAH PERUBAHAN KURIKULUM DAN *STANDING POSITION***

Kurikulum baru atau kurikulum 2021 merupakan penguatan dari kurikulum 2016. Perancangan kurikulum baru dilakukan agar kurikulum yang sudah ada dapat semakin kuat dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan sains, serta kebutuhan masyarakat. Perubahan yang signifikan terjadi dalam perkembangan sosial politik di negara kita, tentu membutuhkan penyesuaian. Penyesuaian yang dilakukan bukan berarti prodi “latah” ataupun takut tertinggal, tetapi penyesuaian ini berdasarkan landasan yang jelas terkait dengan regulasi yang ada. Prodi PMD memang tetap “*compliance*” terhadap rezim Dikti, tetapi spirit prodi mengarah pada “*beyond*” dimana Prodi PMD bisa melakukan terobosan dan inovasi dalam pembangunan masyarakat desa. Undang-Undang Desa menjadi pijakan prodi dalam penyusunan kurikulum baik 2016 maupun 2021, tetapi hal yang utama bagaimana menerjemahkan dan mengejawantahkan spirit dan roh undang-undang tersebut ke dalam kurikulum prodi. Keberadaan kurikulum 2021 tidak serta merta berubah drastis. Lokus dan fokus Prodi PMD

tetap desa dimana Prodi PMD memaknai bahwa pengetahuan dan keterampilan yang di angkat terkait desa adalah keterampilan pada bidang penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Keterampilan dan kemampuan dalam bidang penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa menjadi kompetensi yang harus dimiliki dalam aktivitas berdesa. Penyelenggaraan desa merupakan bagian dari penguatan instusi desa dan tata pemerintahan penyelenggaraan desa. Pemberdayaan masyarakat desa, bukan berarti masyarakat tidak memiliki daya, tetapi bagaimana daya yang dimiliki dapat diasah dan dikelola menjadi sebuah kekuatan untuk kemaslahatan dan kemakmuran desa. Kedua aspek bidang ini tidak berjalan sendiri-sendiri tetapi seiring sejalan dan saling bertautan, sehingga jelas bahwa Prodi PMD mengutamakan desa, dengan ciri khas yaitu bagaimana menyiapkan lulusan mampu dan terampil dalam berdesa. Menurut Sutoro Eko, tradisi berdesa mengandung unsur bermasyarakat dan bernegara di ranah desa. Desa di Indonesia menjadi wadah kolektif dalam bernegara dan bermasyarakat. Pertama, desa menjadi basis sosial atau menjadi basis memupuk modal sosial, yakni memupuk tradisi solidaritas, kerjasama, swadaya, gotong royong secara inklusif yang melampaui batas-batas eksklusif seperti kekerabatan, suku, agama, aliran atau sejenisnya. Kedua, desa memiliki kekuasaan dan berpemerintahan, yang di dalamnya mengandung otoritas (kewenangan) dan akuntabilitas untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.

Peran lulusan pendidikan tinggi vokasi menurut Dirjen pembelajaran dan Kemahasiswaan (2015) selain dituntut dapat bekerja

dengan kompeten namun harus juga dapat berperan sebagai “agen pejuang kedaulatan” yang memiliki kemampuan *entrepreneurial* dan juga harus menjadi “*trend setter*” dalam menjawab berbagai aspek tantangan bangsa Indonesia kedepan. Khususnya tentang desa, perubahan di Indonesia telah menjadi diskusi pakar melalui media massa sebagaimana dinyatakan Melani Budianta (Guru Besar Fakultas Ilmu Budaya UI) bahwa menyikapi perubahan yang terjadi di Indonesia dan desa telah terjadi arus balik dalam memandang desa, sehingga tidak punya pilihan untuk membangun desa ke arah peradaban baru yang berbasis pada tatanan yang ramah pada alam dan lingkungan.

Peradaban baru berbasis pada komunitas yang mempunyai ketahanan pangan dan ketangguhan budaya lokal yang dapat dikembangkan menjadi pengetahuan, wawasan dan nilai untuk menjaga keanekaragaman hayati, solidaritas dan keguyuban sosial yang mampu menjaga, merawat relasi antar manusia dan memanusiaikan manusia. Dengan kata lain, yang sangat menentukan untuk membangun peradaban desa dimasa depan adalah tatanan sosial atau pengorganisasian masyarakat desa secara kolektif yang melihat kesejahteraan tiap warga desa menjadi kepentingan bersama. Lebih lanjut dinyatakan bahwa pengaturan tatanan sosial desa telah mempunyai perangkat hukum yakni Undang Undang Desa No. 6/2014 yang mengakui desa dan komunitas ada. Peradaban desa di masa depan bertumpu pada pengorganisasian sosial yang sehat dan bergairah di desa. Nilai keguyuban sosial dan kolektivitas di desa, terkait dengan adat istiadat dan tradisi lokal terutama di desa adat.

Kurniawan (2020) menjelaskan bahwa implementasi Undang Undang Desa merupakan tuntutan agar masyarakat desa mau secara berdaya mengembangkan potensi yang dimiliki. Potensi ini adalah proses belajar dan pembelajaran sehingga secara pendidikan dan pemahaman sosial masyarakat desa menjadi lebih berisi substansi bermasyarakat dan hidup mencapai kemakmuran bersama. Siwi Nugraheni (2021), dosen dari Fakultas Ekonomi Universitas Katholik Parahiyangan, mengamati kondisi desa dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa banyak anak muda usia produktif meninggalkan pekerjaan mereka terdahulu untuk pindah dan melanjutkan hidup di desa. Mereka terbuka terhadap perubahan, dengan bantuan internet informasi dan pengetahuan lebih mudah. Kolaborasi antara sumber daya manusia dan teknologi memungkinkan penduduk desa mengakses pekerjaan di luar wilayah mereka dengan tetap tinggal di desa. Fenomena penduduk usia produktif kembali ke desa menjadi peluang sumberdaya potensial bagi desa. Geliat desa akan menimbulkan optimisme dengan catatan bahwa pertumbuhan ekonomi pedesaan tidak boleh mengorbankan alam lingkungan dan nilai-nilai sosial budaya masyarakat.

Menghadapi tantangan ke depan sangat luar biasa, yang tidak dapat diprediksi dan tidak menentu dalam era perubahan saat ini. Disamping tuntutan pendidikan tinggi menghasilkan ahli yang mampu menyelesaikan masalah sangat diperlukan dalam mencapai kemajuan bangsa melalui perkembangan sumberdaya manusia berkualitas, berpengetahuan, memiliki keterampilan yang dibutuhkan serta terpercaya dan bertanggungjawab menjadi hal yang mutlak. Prodi PMD yang selama ini fokus keilmuan pada

pembangunan masyarakat dan desa menduduki posisi yang strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

#### **D. RANGKAIAN DISKUSI INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYUSUNAN KURIKULUM 2021**

##### *Mempelajari Materi Transformasi D3 Menjadi D4*

Bulan Mei 2021, Prodi PMD mengikuti Bimbingan Teknis (bimtek) *upgrading* diploma tiga menjadi diploma empat yang diadakan oleh Ditjen Diksi. Pengurus dan dosen prodi mengikuti kegiatan tersebut. Bimbingan teknis yang diselenggarakan Ditjen Diksi mendorong prodi diploma tiga di Indonesia menjadi diploma empat. Hal mendasar yang dipenuhi prodi dalam *upgrading* tersebut adalah memenuhi persyaratan wajib, administratif, dan teknis. Beberapa hal yang menjadi catatan khusus yaitu prodi yang terdaftar terakreditasi minimal B, prodi memiliki *link* dengan dunia usaha dan industri (Dudi) baik terkait dengan kurikulum, aktivitas akademik.

Bimtek yang diselenggarakan oleh ditjen diksi kami respon secara positif. Pengembangan prodi menjadi hal yang diperjuangkan, tetapi prodi sendiri juga harus menakar dan menimbang sumber daya yang ada. Pengembangan diploma tiga menjadi diploma empat tidak dapat berjalan secara cepat butuh proses dan rancangan yang matang. Dari penjabaran bimtek, banyak hal yang Prodi PMD harus lakukan bahkan menjadi tantangan yang besar untuk dijalankan. Pengembangan prodi tidak semata-mata menjadi tanggung jawab prodi, tetapi dukungan dari civitas akademik, sekolah tinggi, yayasan, dan bahkan *stakeholder* yang terkait.

Sebelum masuk diskusi kurikulum 2016 ke kurikulum 2021, semua dosen mencermati materi Bintek Tranformasi D3 Menjadi D4. Kegiatan dilakukan agar memiliki pengetahuan yang sama dan memiliki kesiapan menghadapi perubahan jenjang pendidikan tersebut. Sebagaimana pernyataan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi yang telah menetapkan sasaran pengembangan Pendidikan Tinggi Vokasi (PTV) diantaranya: 1) Meningkatnya jumlah lulusan pendidikan vokasi yang memperoleh pekerjaan dan berwirausaha dalam satu tahun setelah kelulusan; 2) Persentase dosen pada pendidikan tinggi vokasi yang mempunyai pengalaman kerja di industri atau sertifikasi kompetensi yang diakui oleh industri; dan 3) Terwujudnya pendidikan tinggi vokasi yang berkualitas dan berstandar industri. Perguruan tinggi diharapkan dapat memanifestasikan ketiga sasaran ini melalui peningkatan kapasitas dan kualitas proses dan pengelolaan pendidikan. Setelah mempelajari bersama tentang pendidikan vokasi, selanjutnya melakukan proses diskusi dengan berbagai materi yang ada dalam bintek. Inti dari pembahasan D3 dan D4 menyadarkan prodi untuk menyiapkan kurikulum yang mampu merespon proses transformasi tersebut.

Tranformasi jenjang diploma tiga menjadi diploma empat harus melihat rekam sejak prodi, maka tim kurikulum Prodi PMD mulai memikirkan penyusunan kurikulum. Setelah diskusi pencermatan kurikulum 2016, pengurus prodi dan dosen melaksanakan diskusi penggalan visi misi baru dan profil lulusan. Masing-masing dosen memberikan argumen dan masukan dalam penggalan visi misi. Proses penggalan visi dan misi berjalan secara cair dan serius. Diskusi penggalan visi dan misi yang pertama belum menemukan

keputusan, tetapi penyamaan persepsi dan arah tujuan sudah terbangun. Selain diskusi penggalian visi dan misi juga pembahasan terkait dengan profil lulusan. Pembahasan profil lulusan didasari dari hasil *treasure* ataupun kegiatan sarasehan dengan alumni yang sudah dijalankan.

Bulan Juli 2021 merupakan periode intens oleh tim Prodi PMD dalam upaya penguatan kurikulum baru. Diskusi dan rapat rutin yang dilakukan pada bulan ini frekuensi kegiatan cukup tinggi. Diskusi secara formal dan non formal dilakukan baik antar pengurus dengan dosen prodi. Bahan dan materi penyusunan kurikulum seperti rasionalisasi program, penyusunan CPL, Inovasi Pembelajaran, Penyusunan RPS menjadi bahan kami dalam membangun diskusi. Bulan Juli, juga menjadi momen yang luar biasa bagi prodi berkaitan dengan pandemi covid 19 yang meningkat. Pengurus dan dosen tak luput dari badai covid 19. Satu persatu dosen terpapar dari Pak Hardjono, Bu Rema, Pak Hery. Pembahasan kurikulum yang mulai intens disiasati dengan diskusi secara daring baik menggunakan *Zoom* ataupun *WhatsApp* grup.

Pembahasan kurikulum baru tidak hanya dijalankan oleh Prodi PMD, tetapi prodi yang lain juga. Agenda kurikulum baru memang menjadi agenda prioritas dari lembaga, terutama terkait dengan kampus merdeka. Masing-masing prodi bekerja keras dalam perancangan kurikulum baru. Setelah mendapatkan arahan dari lembaga, kami Prodi PMD mulai bergerak cepat dan mengerahkan sumber daya yang ada. Penyiapan bahan rapat dan agenda rapat kami jalankan.

### *Menyusun Visi, Misi dan Tujuan Prodi*

Diskusi penyusunan kurikulum Prodi PMD alur prosesnya terdiri dari penyusunan visi misi, profil lulusan, capaian pembelajaran prodi, capaian pembelajaran matakuliah, rumusan kurikulum, dan alur matakuliah. Diskusi awal sebelum masuk proses penyusunan kurikulum yaitu mencermati kurikulum 2016. Pencermatan yang dilakukan menghasilkan beberapa temuan yaitu, ada beberapa matakuliah yang tema dan materi hampir sama, kegiatan praktik matakuliah masih belum optimal, materi dari beberapa matakuliah belum terupdate, ada matakuliah yang sudah tidak relevan dengan prodi.

Setelah diskusi pencermatan kurikulum 2016, pengurus prodi dan dosen melaksanakan diskusi penggalan visi misi baru dan profil lulusan. Masing-masing dosen memberikan argumen dan masukan dalam penggalan visi misi. Proses penggalan visi dan misi berjalan secara cair dan serius. Diskusi penggalan visi dan misi yang pertama belum menemukan keputusan, tetapi penyamaan persepsi dan arah tujuan sudah terbangun. Visi Prodi mengacu kepada Visi STPMD “APMD”. Berkaitan Visi Institusi yang juga dilakukan pembaharuan maka oleh tim prodi PMD dilakukan dengan membandingkan antara Visi STPMD dan Visi Prodi PMD Kurikulum 2016 dengan Visi STPMD “APMD” 2021 dengan Visi prodi yang disusun. Tujuannya agar mengetahui kesesuaian antara Visi STPMD “APMD” dengan Visi Prodi PMD. Hal ini sekaligus sebagai proses pembelajaran bagi dosen muda (2 dosen) yang belum pernah mengalami penyusunan kurikulum. Dalam proses menyusun visi Prodi PMD membutuhkan



diskusi cukup panjang karena susunan pernyataan visi memunculkan persepsi yang beragam, sehingga masing-masing dosen mencoba berargumentasi hingga dicapai kesepakatan. Namun demikian diskusi eksternal prodi yaitu di forum penyusunan kurikulum, visi prodi PMD dipandang masih belum kuat sehingga ada saran dari Pak Toro yang menyatakan apabila ditambahkan tentang aset desa maka visi Prodi PMD akan memiliki nilai lebih. Aset desa menjadi muatan pada Visi Prodi PMD yang memiliki nilai lebih karena selama ini aset desa masih belum optimal, sehingga desa yang menikmati hasil dari aset justru menjadi desa yang lemah.

### *Profil Lulusan, CPL dan Menyusun Peta Kurikulum*

Selain diskusi penggalan visi dan misi juga pembahasan terkait dengan profil lulusan. Pembahasan profil lulusan didasari dari hasil *treasure* ataupun sarasehan dengan *stakeholders* yang melibatkan alumni dan pengguna. Diskusi yang cair melalui *zoom* ternyata tidak terasa sampai sore. Berdasarkan *treasure study*, bahwa lulusan Prodi PMD bekerja yang sesuai dengan bidang ilmu PMD yang fokus pada desa yaitu sebagai ASN, pendamping masyarakat bekerja di LSM, perangkat desa, dan wirausaha desa. Untuk itu profil Prodi PMD yang telah didiskusikan dengan peluang kerja di desa ditetapkan berdasarkan data alumni maka ditetapkan profil Prodi. Dengan memperhatikan mahasiswa Prodi PMD termasuk dalam generasi millennial dan perubahan yang terjadi di desa mengarah kepada era digital, maka pilihan menjadi talenta wirausahawan desa diperkirakan akan menjadi peluang kerja yang menjanjikan karena memiliki pengetahuan dan ketrampilan tentang potensi desa,

pengelolaan aset desa, disamping menjadi perangkat desa, ASN, fasilitator pemberdayaan masyarakat. Namun demikian belum semua menerima bahwa wirausahawan desa merupakan profil lulusan Prodi PMD, namun perangkat desa itu yang utama. Karena vokasi ideal jika satu tahun setelah lulus memperoleh pekerjaan, maka jarak waktu lulus dengan profil menjadi pertimbangan.

Tahap menentukan capaian pembelajaran berdasarkan profil lulusan, walaupun telah dibaca panduan dalam menyusun kalimat CPL ternyata tidak lah mudah. Penyusunan CPL memerlukan teknik mengintegrasikan pengetahuan ketrampilan dalam bentuk kalimat dengan rumusan baku. Tim prodi merumuskan CPL yang kemudian diturunkan dalam kajian-kajian dan pembentukan matakuliah. Ketentuan tujuh matakuliah yang dapat dirubah dalam penyusunan kurikulum 2021 ini, maka membutuhkan pencermatan terhadap matakuliah yang akan digantikan atau penghapusan matakuliah tertentu, atau menjadi bahan kajian dalam matakuliah baru. Pendidikan vokasi yang mensyaratkan 40 persen teori dan 60 persen praktik selanjutnya menentukan capaian pembelajaran matakuliah dengan sks.

Pembahasan kompetensi lulusan menyepakati bahwa lulusan Prodi PMD harus memiliki keterampilan dalam bidang penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Keterampilan dalam bidang penyelenggaraan desa meliputi keterampilan dalam hal perencanaan, penganggaran, regulasi, dan evaluasi (terdapat laporan pertanggung jawaban penyelenggaraan desa). Keterampilan dalam bidang pemberdayaan masyarakat desa

meliputi keterampilan dalam pengorganisasian masyarakat, fasilitasi, identifikasi potensi, pemmasalahan, dan strategi penyelesaian masalah di desa.

Perancangan dan pembahasan road map kurikulum menjadi hal yang menarik. Masing-masing dosen memberikan masukan terkait dengan alur kurikulum yang dijalankan. Diskusi yang cair dengan adu argumen yang saling membangun tercipta dalam ruangan forum. Hasil diskusi menghasilkan roadmap sebagai berikut:



Gambar Road Map Kurikulum Prodi PMD

Gambar roadmap diatas menunjukkan bahwa terdapat 6 tahapan dalam kurikulum baru Prodi PMD untuk mahasiswa dari awal masuk hingga menyelesaikan Studi. Tahap 1, tahap ini mahasiswa diharapkan dapat memiliki kemampuan dan keterampilan dasar untuk berkomunikasi dan memahami desa. Kemampuan berkomunikasi dianggap penting guna mahasiswa bergaul dan belajar di desa. Memahami desa dimaknai bahwa mahasiswa memiliki pengetahuan dan wawasan tentang desa, baik segala

aspek yang ada didesa maupun sejarah dan perkembangan desa. Tahap 2, tahap ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dan keterampilan dalam mengidentifikasi potensi desa. Identifikasi potensi desa berkolerasi dengan penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa, Tahap 3, tahap ini mahasiswa diharapkan memiliki kemampuan dalam menginventarisasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa. Inventarisasi permasalahan dan kebutuhan masyarakat desa tentu berkaitan dengan bidang penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahap 4, mahasiswa mampu dan terampil dalam menyusun strategi dan penyelesaian masalah. Tahap ini membutuhkan pendalaman terkait dengan strategi dan alternatif pemecahan masalah. Tahap 5, mahasiswa diharapkan mampu dan terampil dalam penyelenggaraan desa. Keterampilan dan kemampuan dalam penyelenggaraan desa terkait dengan 4 hal yaitu perencanaan, penganggaran, regulasi, dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintah desa. Tahap 6, mahasiswa terampil dalam bidang penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Tahap terakhir ini mahasiswa melaksanakan magang dan menyusun laporan tugas akhir.

Roadmap kurikulum Prodi PMD yang disepakati bersama, kemudian melanjutkan pembahasan mengenai penjabaran matakuliah. Penjabaran matakuliah berdasarkan bahan dari pencermatan kurikulum 2016. Matakuliah kurikulum 2016 ada yang dihilangkan dan muncul matakuliah baru. Matakuliah yang dihilangkan bahwa matakuliah tersebut masuk menjadi bahan kajian pada matakuliah lain dengan kebutuhan ilmu pengetahuan, misal matakuliah Sejarah Pergerakan Nasional menjadi bahan

kajian pada matakuliah Kewarganegaraan. Matakuliah yang pada kurikulum 2016 seperti matakuliah Pengelolaan Keuangan Desa 1 dan 2, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa 1 dan 2 pada kurikulum 2021 menjadi Pengelolaan Keuangan Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Matakuliah praktik lapangan yang kurikulum 2016 sebanyak 6 sks, dalam kurikulum 2021 jumlah sks dilakukan penambahan sebanyak 14 sks sehingga menjadi 20 sks untuk kegiatan praktik di lapangan atau matakuliah praktikum. Penempatan praktikum tersebut dibagi dalam dua semester yakni semester 3 dan 4. Dalam diskusi forum penyusunan kurikulum, Bu Candra menyampaikan bagaimana pelaksanaan praktikum apakah tidak terlalu membebani mahasiswa. Dasar pemikiran sebelum presentasi tersebut, tim prodi memperhitungkan bahwa pelaksanaan praktikum dapat dijalankan oleh mahasiswa dengan bersamaan pengambilan beberapa matakuliah, waktu praktikum lapangan bisa diatur dengan memperhatikan hari yang lain dengan menghitung total jam kerja berdasarkan jumlah sks. Tim mempertimbangkan praktikum dilaksanakan setiap semester dengan mengukur kemampuan dan keterampilan dalam mendukung CPL secara serial menurut alur peta kurikulum.

Matakuliah dalam kurikulum 2021 juga terdapat matakuliah baru. Matakuliah baru ini merupakan respon dalam pengembangan pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Bencana alam dan pandemi yang terjadi mengingatkan kita untuk bisa memahami dan bersanding dengan alam, kemudian upaya memperkuat keterampilan mahasiswa

dalam bidang penyelenggaraan dan pemberdayaan masyarakat desa perlu matakuliah khusus yang lebih menunjang. Matakuliah baru terdiri dari matakuliah Geografi dan Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat, Analisis Sosial, Manajemen Proyek, dan Manajemen Bencana.

Matakuliah Geografi dan Kependudukan merupakan gabungan dari matakuliah yang ada pada kurikulum 2009 dan kurikulum 2016. Perpaduan yang dilakukan ini merupakan pencermatan dan refleksi dari kurikulum 2016 dan kebutuhan ilmu pengetahuan. Keterampilan dalam mengidentifikasi kehidupan bermasyarakat di desa berdasarkan aspek geografi dan kependudukan diharapkan dapat memperdalam kemampuan mahasiswa dalam mengidentifikasi potensi dan inventarisasi masalah di desa. Matakuliah Pemberdayaan Masyarakat muncul dalam kurikulum baru dengan harapan menjadi bekal mahasiswa dalam menyusun strategi pemecahan permasalahan di desa.

Matakuliah Analisis Sosial merupakan matakuliah yang sudah ada pada kurikulum 2009 dihadirkan kembali pada kurikulum baru. Kemampuan mahasiswa dalam melakukan analisis sosial sangat dibutuhkan dalam rangka upaya menyelesaikan permasalahan di desa baik pada bidang penyelenggaraan desa dan pembangunan masyarakat desa. Matakuliah Manajemen Proyek juga merupakan matakuliah pada kurikulum 2009 yang kembali dihadirkan di kurikulum baru. Pengurus dan dosen mencermati bahwa mata manajemen proyek menjadi kebutuhan dan bekal mahasiswa dalam melaksanakan kegiatan berdesa, baik di kegiatan praktik dan

magang. Matakuliah Manajemen Bencana merupakan matakuliah baru di Prodi PMD dengan mempertimbangkan isu kebencanaan secara global maupun nasional. Matakuliah ini menjadi hal penting untuk bekal mahasiswa bagaimana harus merespon dan bertindak dalam pengelolaan bencana.

Diskusi yang dijalankan secara maraton tiap minggu di bulan Agustus 2021 bermuara pada presentasi di tingkat sekolah tinggi yang dilaksanakan pada tanggal 11 Agustus 2021. Ketua Prodi PMD Ir. Rini Dorojati, MS memaparkan presentasi berkaitan dengan pemaparan rancangan kurikulum 2021. Perancangan kurikulum 2021 merujuk berbagai macam petunjuk dan prosedur, baik aturan hukum ataupun aturan dari kementerian. Selain hal tersebut, kurikulum baru dirancang dengan memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan masyarakat. Forum tingkat sekolah tinggi memberikan berbagai macam masukan untuk Prodi PMD. Bangun rancang kurikulum 2021 harus tegas dan jangan “*minggrang- minggring*” untuk mengutamakan desa. Catatan untuk prodi secara filosofis bahwa Prodi PMD diharapkan “epistemologi sempit aksiologi dalam” yaitu keterampilan dan kemampuan mahasiswa dalam aktivitas berdesa harus kuat. Berdesa dalam hal ini yaitu bagaimana mahasiswa terampil dan mampu dalam bidang penyelenggaraan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Masukan dalam forum sekolah tinggi memberikan berbagai macam masukan dan penguatan. Hasil dari forum sekolah tinggi kemudian pengurus sampaikan ke dosen prodi dalam agenda rapat rutin bulanan. Beberapa hal catatan dan perbaikan pengurus prodi

sampaikan dan tindak lanjuti. Penyusunan kurikulum 2021 berjalan hingga sampai tahap teknis. Sekolah tinggi melalui wakil ketua satu, Dra. MC. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si mengawal dan mendampingi prodi-prodi hingga pelaksanaan teknis kurikulum. Pendampingan yang dilakukan membantu pengurus prodi dalam memantapkan keberadaan kurikulum baru.

#### *Penyeleasaras Akhir Kurikulum Prodi PMD*

Rapat senat pada akhir Agustus merupakan forum dalam penetapan kurikulum 2021. Kurikulum 2021 menghasilkan Lulusan Prodi PMD yang peka terhadap persoalan desa, sehingga aktivitas yang dilakukan sebagai penyelenggara desa menjadikan desa semakin makmur dan sejahtera.

### **E. PENUTUP**

Penyusunan kurikulum 2021 Prodi PMD merupakan penyusunan kurikulum yang transformatif dan dinamis. Karena terjadi kondisi perubahan regulasi sehingga cara memandang jati diri Prodi PMD sebagai pendidikan vokasi belum semua memahami, namun upaya tranformasi pemikiran maupun pengelolaan prodi yang semakin profesional sebagaimana yang diharapkan menjadi bagian dari proses pembelajaran yang sangat memberikan inspiratif posisi Prodi PMD ke depan. Memberikan energi yang besar ditengah suasana pandemi Covid 19 dengan tingkat kesakitan dan kematian yang sangat tinggi, namun semangat untuk menyelesaikan tugas menyiapkan kurikulum untuk generasi akan datang yang unggul mulai dari visi, misi, tujuan, profil, capaian pembelajaran lulusan, kajian, dan pembentukan



matakuliah serta pemetaan kurikulum merupakan kerja keras dan kerja cerdas. Jika masih banyak kekurangan harap dimaklumi. Proses perjalanan kurikulum akan selalu dikawal dan di evaluasi. Terimakasih kepada semua yang pihak terlibat dalam menyelesaikan kurikulum Prodi PMD tahun 2021-2026, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah bagi kita semua.

## DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Pembelajaran, *Modul Rasionalisasi Proses Pengembangan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)*, Dirjen Pembelajaran dan kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi
- Direktorat Pembelajaran, *Modul Penyusunan Capaian Pembelajaran*, Dirjen Pembelajaran dan kemahasiswaan Kementerian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi
- Drs. M. Soetopo. 2015, *APMD Lahir dan Berkembang*, Yogyakarta, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”
- Junaedi, Aris dkk. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi*, Jakarta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kurikulum Prodi PMD 2016
- Kurniawan, Setia Budi. 2020. Pemberdayaan dan Tantangan Desa: Implementasi Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. <https://www.iaijawatimur.or.id/course/interest/detail/4>
- Melani Budianta. 2020. Peradaban Desa Masa Depan. Guru Besar Fak. Ilmu Budaya Universitas Indonesia, <https://adil.or.id/buku-kongres-kebudayaan-desa-arus-balik-membangun-peradaban-desa-masa-depan/>
- Modul Inovasi Pembelajaran
- Nugraheni, Siwi. 2021. Desa-desanya yang Menggeliat. *Kompas*: Selasa 2 November 2021

- Paristiyanti Nurwardani, dkk. 2016. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi*, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Pembelajaran 2016.
- Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran untuk Meningkatkan Kualitas Lulusan Pendidikan Vokasi, Bahan Seminar-Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud No 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Desa No 6 Tahun 2014
- Yunanto, Sutoro Eko dkk. 2014. *Desa Membangunan Indonesia*, Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD)

# **BAB IV**

## **PEMBANGUNAN SOSIAL TRANSFORMATIF: INTEGRASI TIGA PILAR BESAR DALAM PRAKTIK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN**

Oktarina Albizzia dan Aulia Widya Sakina

### **A. PENGANTAR**

Proses pembangunan sosial tidak terlepas dari pembangunan ekonomi. Tujuan pembangunan sosial hanya akan tercapai jika pembangunan ekonomi berkembang, dan pembangunan sosial yang dilakukan harus melibatkan berbagai disiplin ilmu khususnya ilmu sosial. Keberhasilan pembangunan sosial dipengaruhi oleh peran politik dan ekonomi dari suatu Negara dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat.

Istilah “Pembangunan Sosial” terdiri dari dua kata pembangunan dan sosial yang keduanya memiliki pengertian sendiri yang harus diuji. Kata pembangunan, memiliki konotasi dinamis yang merujuk kepada proses perubahan, pertumbuhan, kemajuan, dan evolusi. Istilah pembangunan digunakan untuk menjelaskan proses perubahan sosial, yang juga dihubungkan dengan proses industrialisasi dan modernisasi ekonomi di negara-negara berkembang.

Sedangkan istilah sosial digunakan oleh para sosiolog dan ilmuwan sosial lain untuk merujuk kepada interaksi manusia dan fenomena kompleks yang dihasilkan dari interaksi tersebut, seperti *peer group* dan asosiasi lain seperti keluarga, organisasi formal,

komunitas, hingga masyarakat. Interaksi tersebut memunculkan jaringan sosial, nilai-nilai, budaya, dan institusi. Istilah sosial juga memiliki konotasi kesejahteraan yang mengarah kepada kesejahteraan manusia dan usaha kolektif untuk meningkatkan kondisi sosial.

Menurut James Midgley (2020) Pembangunan Sosial seringkali disosialisasikan dengan proyek berbasis komunitas di negara-negara berkembang, seperti usaha mikro ekonomi, kelompok pemberdayaan perempuan, koperasi, program kesejahteraan ibu dan anak, penyediaan air minum, dan pembangunan sekolah serta klinik. Istilah Pembangunan sosial juga merujuk kepada kebijakan dan program pemerintah yang memperhatikan aspek sosial dalam pembangunan, seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan keaksaraan, memerangi malnutrisi, dan memperluas akses untuk kesehatan dan pendidikan yang merujuk pada kesejahteraan dan keadilan sosial.

Istilah pembangunan sosial sering digunakan dan sering dipengaruhi oleh studi sosiologi, studi pekerjaan sosial, dan studi kebijakan sosial. Sosiologi menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan proses perubahan sosial yang terkendali untuk memperbaiki masyarakat, sedangkan para pekerja sosial menghubungkan pembangunan sosial dengan proyek berbasis masyarakat. Dalam arena kebijakan sosial, istilah pembangunan sosial merujuk kepada perbaikan sosial yang dibawa dari inisiatif pemerintah negara sejahtera (*welfare state*), dan sekaligus menjadi penanda dalam diskursus pembangunan kesejahteraan (*welfare developmentalism*).

Konsep pembangunan sosial melibatkan ide tentang sebuah proses. Kondisi dinamis dari pembangunan sosial dan fokusnya terhadap transformasi haruslah ditekankan. Proses perubahan sosial dalam pembangunan sosial bersifat progresif. Dalam konteks pembangunan sosial, gagasan perubahan sosial yang progresif dapat dilihat ke dalam tiga tahap. *Pertama*, Kondisi sosial yang perlu diubah oleh pembangunan sosial; *Kedua*, Proses perubahan itu sendiri; dan *Ketiga*, Keadaan akhir yang memuat tujuan perubahan telah dicapai. Oleh karena itu, keilmuan pembangunan sosial diharapkan bisa mewadahi proses perubahan sosial terencana dan terarah agar bisa mempromosikan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan keadilan sosial.

## **B. REFLEKSI KRITIS ARAH BARU PEMBANGUNAN SOSIAL**

Program Studi Pembangunan Sosial STPMD "APMD" lahir dengan nama Ilmu Sosiatri pada Tanggal 9 Januari 1987 berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pendidikan "Tujuh Belas" Nomor: 17/YP-17. Program Studi ini memiliki *distinctive advantage* sebagai prodi yang memiliki kepedulian dan *concern* terhadap pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kapasitas individu untuk meningkatkan kesejahteraan diri dan masyarakat. Proses perubahan nama Ilmu Sosiatri menjadi Pembangunan Sosial mulai dilakukan setelah mendapatkan rumusan yang tepat dari segi substansi keilmuan, metode dan tujuan yang diciptakan pada Tahun 2011.

Proses perubahan Program Studi Ilmu Sosiatri menjadi Pembangunan Sosial di STPMD "APMD" Yogyakarta dimulai pada

Tahun 2016 yang didasarkan pada Nomenklatur DIKTI. Capaian Pembelajaran (CP) program studi dan *subject matters* Pembangunan Sosial telah disepakati bersama Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI) yang dikendarai oleh Universitas Gadjah Mada dengan mengaplikasikan 20 matakuliah inti asosiasi. Pada Tahun 2020 Ilmu Sosiatri STPMD “APMD” resmi berganti nama menjadi Pembangunan Sosial, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 78/M/2020. Proses perubahan ini juga mendorong prodi untuk melakukan pengembangan kurikulum agar lebih dinamis sehingga lulusan Pembangunan Sosial bisa berkiprah di level Nasional maupun Internasional.

Gagasan reorientasi pengembangan kurikulum tercetus dari proses refleksi kritis yang dipaparkan dalam webinar “Refleksi Kritis Proses Alterasi Ilmu Sosiatri Menuju Arah Baru Pembangunan Sosial” oleh Mahasiswa, Alumni, dan Penggunaan Lulusan yang dilaksanakan pada Tanggal 22 Juli 2020. Berikut masukan-masukan terkait arah baru Prodi Pembangunan Sosial, yang menjadi cambuk prodi untuk mulai berbenah dan mengembangkan kurikulum secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi.

Bruder Yohanes Kedang, S.Sos., MTB. (Alumni dan Tenaga Pemberdayaan Masyarakat Orang Asli Papua “OAP”), berpendapat bahwa pemahaman tentang Ilmu Sosiatri menjadikan alumni mampu mengeksplor daya atau kemampuan masyarakat, membaca

dan memahami gejala sosial, memetakan situasi dan menyusun rencana program sesuai kebutuhan masyarakat, menjadi kreatif dalam mencari solusi untuk *problem solving* di masyarakat sehingga masyarakat sadar dalam memanfaatkan sumber daya, mampu berinovasi, mampu membangun jaringan dan mempunyai bargaining yang baik dengan pemerintah. Keberadaan Alumni Ilmu Sosiatri di masyarakat mampu mengangkat harkat dan martabat individu dalam masyarakat agar berdaulat secara ekonomi dan sosial. Inilah yang harus kita jaga dan tingkatkan, meskipun Ilmu Sosiatri telah berubah nama menjadi Pembangunan Sosial.

Hal ini sejalan dengan pendapat Nanang Kosim, A.Md., S.H. (Alumni dan Pelaku Wisatapreneur), bahwa perubahan Ilmu Sosiatri menjadi Pembangunan Sosial bukanlah hal besar yang akan merubah totalitas dari idealisme tradisi ilmu itu sendiri. Perubahan justru membawa warna baru dalam perkembangan ilmu pengetahuan, sekaligus autokritik bagi kita untuk bekerja lebih keras lagi di era globalisasi saat ini. Tidak hanya sekedar menambah “gelar” keilmuan tanpa menghasilkan karya dan karsa, namun harus lebih dinamis mengikuti perkembangan zaman agar bisa memberikan penguatan makna Pembangunan Sosial.

Rosaria Renyaan, S.Sos., M.Si., (Alumni dan Birokrat) memaparkan bahwa alterasi Ilmu Sosiatri ke Pembangunan Sosial merupakan pergeseran fokus dari penanganan kondisi patologis masyarakat pada awal kemunculan Ilmu Sosiatri, hingga bertransformasi menjadi pembangunan sosial yang merupakan refleksi atas evaluasi terhadap jalannya pembangunan ekonomi yang

dinilai menyisakan distorsi masalah sosial, seperti kemiskinan, disparitas desa-kota, dll. Proses alterasi ini diharapkan bisa melahirkan intelektual muda yang mampu berkontribusi dalam menyelesaikan problematika sosial yang lebih kompleks sehingga terwujud tatanan kehidupan yang seimbang.

Berdasarkan hal tersebut maka Pembangunan Sosial hadir untuk mempromosikan kesejahteraan manusia. Istilah Pembangunan Sosial menjadi tema besar dalam pembangunan manusia menjelang *World Summit for Social Development 1995* di Kopenhagen, yang merupakan komitmen untuk meletakkan manusia sebagai pusat perhatian pembangunan dan kerjasama internasional (Boer & Koekkoek 1994; Midgley 1994, Macarov 1995). Proses Alterasi Ilmu Sosiatri ke Pembangunan Sosial bukan hanya memberi barang, pelayanan atau pemulihan bagi penyandang masalah sosial saja, tetapi ditujukan kepada masyarakat yang lebih luas, untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup manusia, dengan mempromosikan pentingnya kesejahteraan manusia. Pembangunan Sosial berusaha menggabungkan berbagai pendekatan, saintifik maupun kemanusiaan, yang berorientasi praktis dalam pembangunan terpadu. Upaya membangun suatu model pendekatan, perlu satu strategi pembangunan berkelanjutan, yang dikenal sebagai komitmen dan strategi global (Dr. Sugiyanto, M.M., Alumni, Dosen STPMD “APMD” dan Pengguna Lulusan Pembangunan Sosial).

Perubahan nama ini diharapkan bisa menyukseskan pembelajaran yang terbaik untuk mahasiswa, melahirkan mahasiswa yang berprestasi dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap



masyarakat dan lingkungan, serta mampu mencetak lulusan yang dapat berkontribusi dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat secara lokal maupun nasional, serta berperan sebagai warga dunia yang berwawasan global. (Rina Ardianti, S.Sos., Ketua HMPS Pembangunan Sosial Periode 2019-2021).

The poster is for a webinar titled "REFLEKSI KRITIS PROSES ALTERASI ILMU SOSIATRI MENUJU ARAH BARU PEMBANGUNAN SOSIAL". It is organized by the "KEMAHAMBARAN STPMMD" and "PEMBANGUNAN SOSIAL" departments. The event is held on Wednesday, July 22, 2020, from 12:30 to 15:00 WIB. The format is a discussion on the Zoom platform, with meeting ID 355 347 9498 and password pemsos22. The speakers are: Dr. Sugianto, M.H. (Ketua Umum STPMMD "Pegadaian"); Nengsih Kurni, A.Md., SH (Ketumahnya "Wahid" STPMMD "Rakyat Baru" Hutan); Rizka Nurjanah, S.Sos., M.Si (Ketumahnya "Berkah" STPMMD "Pembangunan Sosial"); Dr. Taharuk Hasyim, S.Sos., M.HB (Ketumahnya "Pembangunan Sosial" STPMMD "Gengsi" STPMMD "Gengsi"); Dra. Diklatina Afizka, M.Si (Ketumahnya "Pembangunan Sosial" STPMMD "Pembangunan Sosial"); Wika Andani (Ketumahnya "Pembangunan Sosial" STPMMD "Pembangunan Sosial"); and Dr. Dedi Mulyantoro, M.Si (Ketumahnya "Pembangunan Sosial" STPMMD "Pembangunan Sosial"). The moderator is "Moderator". Contact information for Aslini WS (065228323000) is provided. Registration is at https://bit.ly/3jcnock. Benefits include a certificate and a door prize ball holiday.

Momen “Refleksi Kritis Proses Alterasi Ilmu Sosiatri Menuju Arah Baru Pembangunan Sosial” ini sangat penting untuk merefleksikan perjalanan 3 dasawarsa keberadaan Ilmu Sosiatri STPMMD “APMD” oleh para *founding fathers*. Meskipun saat ini

Ilmu Sosiatri telah berubah nama menjadi Pembangunan Sosial tetapi semangat yang dibawa sivitas akademika Pembangunan Sosial tidak berubah dari semangat yang dulu dibawa oleh para *founding fathers*. Yakni untuk menjawab permasalahan sosial di Indonesia, yang secara komprehensif dikembangkan melalui tridharma perguruan tinggi di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sehingga materi-materi perkuliahan, kajian-kajian dalam penelitian, maupun aksi-aksi langsung dalam pengabdian masyarakat selalu memiliki keberpihakan untuk memecahkan persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Tujuan dari semangat ini adalah untuk mengembangkan serta memberdayakan masyarakat agar menjadi masyarakat yang sejahtera dan mandiri.

### **C. KERANGKA KURIKULUM BARU**

Perjalanan kurikulum Program Studi Pembangunan Sosial tidak lepas dari pengaruh globalisasi dan pembangunan yang menyebabkan terjadinya peralihan tujuan pendidikan nasional. Globalisasi yang melanda seluruh dunia menyebabkan tujuan pendidikan nasional tidak lagi hanya untuk mencerdaskan bangsa dan memerdekakan manusia namun juga bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) dan memiliki penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) sehingga tidak hanya berorientasi pada pragmatis dan materialis (Junaidi, 2020). Pergeseran tujuan pendidikan nasional tersebut semakin terasa saat ini dengan terjadinya krisis karakter di bidang pendidikan, karena pragmatis dalam merespon kebutuhan pasar kerja lebih menekankan kepada hal hal yang bersifat materialisme sehingga melupakan

pengajaran dengan semangat kebangsaan, keadilan sosial, serta sifat-sifat kemanusiaan yang memiliki moral luhur sebagai warga negara.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang diungkapkan oleh Dr. Istiana Hermawanti, M.Sos. (Peneliti Ahli Utama B2P3KS Kemensos RI dan Dosen STPMD “APMD” Yogyakarta) dalam Webinar yang diselenggarakan Prodi Pembangunan Sosial dengan tajuk “Dinamika Pelayanan Sosial Menghadapi Tantangan Society 5.0” pada Tanggal 17 Juni 2021, yang memaparkan bahwa proses pendidikan dituntut secara langsung untuk tidak hanya melakukan *transfer of knowledge*, melainkan juga memastikan terjadinya *transfer of value* dan *transfer of attitude* kepada para peserta didik.

Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi mengamanatkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi harus dikembangkan oleh Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) untuk setiap Program Studi mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Program studi harus bisa menjadi penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, sehingga memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kompetensi’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan oleh Program Studi dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Program Studi Pembangunan Sosial Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta berupaya untuk menjawab tantangan pengembangan kurikulum di era Industri 4.0 sehingga

bisa menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan literasi baru meliputi literasi data, literasi teknologi, dan literasi manusia yang berakhlak mulia. Kurikulum merupakan nyawa program studi sehingga keberadaannya memerlukan rancangan, pelaksanaan serta evaluasi secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman, kebutuhan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) serta kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat, maupun pengguna lulusan perguruan tinggi. Upaya tersebut bermuara pada proses reorientasi pengembangan kurikulum yang mulai dilakukan oleh Prodi Pembangunan Sosial pada tahun 2020, setelah melalui proses panjang perubahan nama dari Ilmu Sosiatri.

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan evaluasi komponen kurikulum, proses pembelajaran dan suasana akademik. Evaluasi ini dilakukan *sebagai sebuah proses atau serangkaian proses pengumpulan data dan informasi, kemudian dianalisis dan hasilnya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kinerja kurikulum yang lebih optimal dan efektif (evaluasi formatif), atau digunakan sebagai dasar untuk menyimpulkan dan pengambilan keputusan (evaluasi sumatif) (Ornstein & Hunkins, 2004). Evaluasi kurikulum yang dilakukan Prodi Pembangunan sosial secara ringkas menghasilkan deskripsi SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, dan Threats) komponen kurikulum, proses pembelajaran dan suasana akademik berikut ini:*

**Table 1. Deskripsi SWOT Program Studi Sarjana Pembangunan Sosial  
Komponen Kurikulum, Proses Pembelajaran, dan Suasana Akademik**

<b>Strengths (Kekuatan)</b>	<b>Weaknesses (Kelemahan)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurikulum yang disusun prodi sesuai dengan isu-isu yang berkembang saat ini dan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran prodi.</li> <li>2. Metode pembelajaran SCL.</li> <li>3. Ketersediaan RPS pada semua matakuliah.</li> <li>4. Kurikulum dievaluasi setiap 5 tahun.</li> <li>5. Proses pembelajaran didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang memadai.</li> <li>6. Monitoring dan evaluasi terhadap dosen dilakukan tiap semester.</li> <li>7. Interaksi akademik antara dosen dan mahasiswa baik.</li> <li>8. Banyaknya kegiatan akademik, misalnya: seminar, kuliah tamu, kuliah umum, diskusi dan lain-lain.</li> <li>9. Tersedia platform pembelajaran daring selama masa pandemi COVID-19</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring dan evaluasi terhadap kurikulum, proses pembelajaran dan suasana akademik belum maksimal.</li> <li>2. Kemampuan sebagian mahasiswa untuk mengakses sumber belajar dari internet masih terbatas.</li> <li>3. Tradisi diskusi ilmiah antar mahasiswa masih kurang.</li> <li>4. Sumber daya manusia Dosen S3 masih kurang.</li> </ol>

<b><i>Opportunities (Peluang)</i></b>	<b><i>Threaths (Ancaman)</i></b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Adanya keleluasaan menyusun kurikulum yang sesuai dengan visi misi sekolah tinggi dan prodi agar mendukung program MBKM.</li> <li>2. Sumber informasi dari berbagai media tentang isu-isu yang berkaitan dengan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat dan desa mudah diakses.</li> <li>3. Adanya regulasi pemerintah yang dapat digunakan sebagai pedoman penyusunan kurikulum yang mendukung program MBKM.</li> <li>4. Banyak tersedia sumber belajar dari internet.</li> <li>5. Teknologi media pembelajaran semakin canggih, terjangkau, dan mudah diakses.</li> <li>6. Tersedianya hibah-hibah kompetisi yang mendukung program MBKM untuk peningkatan mutu tridharma perguruan tinggi.</li> <li>7. Kesempatan berpartisipasi dalam forum-forum ilmiah secara daring semakin banyak dan tidak berbayar.</li> <li>8. Dosen dan Mahasiswa mulai melek teknologi dan informasi digital karena situasi Pandemi Covid-19 yang mengharuskan pertemuan secara daring.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Semakin tingginya tuntutan pengguna atas kualitas lulusan.</li> <li>2. Semakin tingginya kompetisi antar perguruan tinggi.</li> <li>3. Semakin cepatnya perkembangan referensi bahan ajar.</li> <li>4. Situasi dan Kondisi Pandemi yang tidak terkontrol.</li> </ol>

Dari hasil evaluasi komponen kurikulum, proses pembelajaran dan suasana akademik maka dilakukan diskusi platform prodi pada tahun 2019 yang menghasilkan tentang gambaran, deskripsi dan *tagline* prodi, serta merencanakan peninjauan kurikulum pada Tahun 2020. Namun, peninjauan kurikulum urung terlaksana di Tahun 2020 karena kondisi pandemi Covid-19 membuat fokus Dosen Prodi terkonsentrasi pada peningkatan mutu pembelajaran daring karena adanya pembatasan sosial berskala besar. Pembatasan sosial dan pemberlakuan protokol kesehatan selama pandemi Covid-19 telah menciptakan batasan-batasan dalam berinteraksi secara luring sehingga membuat proses diskusi peninjauan kurikulum menjadi terhambat. Akhirnya proses peninjauan kurikulum prodi baru bisa dilaksanakan pada bulan Juli-Agustus 2021. Proses ini diikuti oleh seluruh dosen prodi, yaitu: Dra. Oktarina Albizzia, M.Si., Aulia Widya Sakina, S.Sos., M.A., Dra. MC. Candra Rusmala Dibyorini, M.Si, Drs. AY Oelin Marliantoro, M.Si., Dra. Widati, Lic. Rer. Reg., Dra. Anastasia Adiwirahayu, M.Si., Ratna Sesotya Wedjajati, S.Psi., M.Si., Psi., dan melibatkan Dosen yang memiliki penguasaan di bidang Pembangunan Sosial, antara lain: Dr. Sri Widayanti, M.A., Dr. Sugiyanto, M.M., dan Dr. Istiana Hermawati, M.Sos.

Diskusi peninjauan kurikulum Prodi Pembangunan Sosial berlangsung secara dinamis dan cukup “*gayeng*”. Meskipun banyak terjadi perdebatan dan perbedaan pendapat, namun secara keseluruhan proses ini telah berlangsung dengan lancar dan seluruh dosen terlibat secara penuh. Proses awal peninjauan kurikulum Prodi Pembangunan Sosial menghasilkan kesepakatan untuk mengembangkan dan melaksanakan pembelajaran berkualitas

berbasis kompetensi, yang antisipatif terhadap perubahan sosial dan kebutuhan masyarakat; mengembangkan berbagai kegiatan penelitian di bidang pembangunan sosial untuk merespon tantangan dan kebutuhan masyarakat; mengembangkan berbagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat di bidang pembangunan sosial yang berbasis pada sumber daya, kekuatan, dan potensi lokal dalam rangka menyelesaikan permasalahan sosial untuk menjawab tantangan global yang dihadapi masyarakat; serta membina kerjasama untuk mendukung peningkatan kualitas pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, sekaligus pembaharuan informasi dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat.

Dalam diskusi ini juga disepakati tentang ruang lingkup Prodi Pembangunan Sosial, yaitu mempelajari tentang permasalahan sosial secara komprehensif dan memberikan alternatif solusi melalui pemberdayaan masyarakat sehingga tercapai keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Komitmen untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial dapat direalisasikan melalui proses pembangunan multifaset yang dinamis dengan menggunakan investasi sosial dan mengambil kekuatan pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan sosial. Prodi Pembangunan Sosial menggagas strategi pemecahan masalah yang efektif karena tidak hanya berfokus pada pemecahan masalah, namun juga pada strategi pasca penanganan masalah. Oleh karena itu, upaya mempromosikan pemberdayaan masyarakat dilakukan untuk memecahkan berbagai macam persoalan sosial yang terjadi karena perubahan sosial.

Seiring diskusi yang panjang dan masukan dari Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta dalam Workshop Kurikulum 2021 serta Diskusi



dengan Ketua dan Pimpinan STPMD “APMD” pada Tanggal 2 September 2021 maka disepakati bahwa pada Kurikulum Tahun 2021 Prodi Pembangunan Sosial tidak memiliki peminatan. Berdasarkan hal tersebut maka visi, misi dan tujuan, Prodi Pembangunan Sosial mengalami perubahan. Visi Prodi Pembangunan Sosial yang baru adalah: *“Menjadi program studi yang khas, unggul dan bermartabat dalam menghadirkan keilmuan pembangunan sosial untuk memperjuangkan kesejahteraan dan keadilan sosial”*.

Untuk mencapai Visi yang telah ditetapkan, maka misi program studi harus dinyatakan secara spesifik untuk memberikan dukungan terhadap tercapainya Visi tersebut. Hal ini karena Misi program studi pada prinsipnya merupakan cerminan dari pelaksanaan tridharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat). Misi yang dibawa oleh Prodi Pembangunan Sosial untuk mencapai Visi adalah: *Pertama, “Mencerahkan pengetahuan dan praksis pembangunan dengan pendekatan kritis-alternatif”. Kedua, “Merajut sinergi antara Negara, masyarakat ekonomi dan masyarakat sipil dalam praktik pembangunan”. Ketiga, “Membentuk Sarjana Pembangunan Sosial yang berintegritas dan berpihak pada demokrasi dan kemanusiaan”*. Misi tersebut dimanifestasikan dalam kerangka pengetahuan dan praksis keilmuan pembangunan sosial yang meletakkan tiga pilar besar, yaitu negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi dalam mempromosikan kesejahteraan dan memperjuangkan keadilan sosial, sesuai arahan dari Ketua STPMD “APMD”, Dr. Sutoro Eko Yunanto.

Tujuan prodi juga berkaitan dengan Visi dan Misi. Tujuan ini merupakan penentu kurikulum yang disusun untuk mencapai Visi

dan Misi prodi yang telah ditetapkan. Berikut dijabarkan tujuan dari Prodi Pembangunan Sosial: *Pertama*, Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang mampu melahirkan pengetahuan relevan bagi upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan; *Kedua*, Menyelenggarakan penelitian berkualitas di bidang pembangunan sosial yang dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan; *Ketiga*, Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat berbasis partisipatif di bidang pembangunan sosial untuk menyelesaikan masalah pembangunan; *Keempat*, Merajut kerjasama yang berkelanjutan dengan pemangku kepentingan dalam kerja-kerja pembangunan, *Kelima*, Menghasilkan lulusan yang berintegritas, memiliki pemahaman teoritis dan metodologis yang mumpuni dalam praksis pembangunan sosial. Tujuan prodi kemudian direfleksikan dalam bentuk *output* dan *outcome* program studi (lulusan), penelitian yang dilakukan, dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Untuk mencapai Visi, Misi, dan juga dirumuskan strategi-strategi untuk pencapaiannya yang melibatkan semua dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan.

Visi, Misi, dan Tujuan prodi diwujudkan-nyatakan dalam bentuk kurikulum akan selalu berkembang dan diperbaharui. Visi Prodi Pembangunan Sosial disosialisasikan kepada banyak pihak agar dapat dipahami oleh internal prodi (Dosen, Mahasiswa, dan Tenaga Kependidikan), dan pihak eksternal (instansi pemerintah/swasta, *stakeholders* dan masyarakat luas). Sosialisasi Visi dilakukan dengan pembuatan *leaflet*, buku profil prodi, *board*, *website*, promosi PMB, dan berbagai kegiatan yang diikuti oleh sivitas akademika Prodi Pembangunan Sosial.

Setelah disepakati Visi, Misi, dan Tujuan selanjutnya disepakati juga kompetensi lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL). Tahap ini merupakan penentu dari tahap-tahap selanjutnya. Artinya penentuan kompetensi dalam capaian pembelajaran (CP) merupakan titik tolak bagi kelancaran dan keberhasilan dalam mengembangkan tahapan-tahapan berikutnya pengembangan kurikulum. Rumusan kompetensi pada deskriptor KKNI dinyatakan dengan istilah capaian pembelajaran, di dalamnya harus kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP).

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) juga disesuaikan dengan fokus kajian prodi yang baru sehingga kompetensi yang ada di dalam CPL sesuai dengan profil lulusan prodi yang baru. Kriteria minimal kualifikasi kemampuan lulusan juga disesuaikan dengan Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang SN-DIKTI pasal 5, ayat (1), yaitu mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Perumusan CPL mengacu pada deskriptor KKNI khususnya pada bagian Pengetahuan dan Keterampilan khusus, sedangkan pada bagian Sikap dan Keterampilan Umum dapat diadopsi dari SN-Dikti.

Berikut beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh lulusan prodi berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi S-1 Pembangunan Sosial dalam Kurikulum 2021: menguasai konsep-konsep dalam teori sosial (*social theories*) dan teori pembangunan (*development theories*); menguasai etika sosial dan prinsip-prinsip kemanusiaan; menguasai metode survai (kuantitatif) dan metode deskriptif interpretative (kualitatif), parametrik dan non-parametrik;

serta mampu memahami konsep dasar, teori dan perspektif tiga pilar pembangunan sosial; sedangkan dalam penguasaan keterampilan lulusan Prodi Pembangunan Sosial harus: mampu melakukan penelitian sosial atau mampu menerapkan metode penelitian sosial di bidang pembangunan sosial; mampu mengidentifikasi masalah sosial dan membuat pemetaan sosial berdasarkan sumber daya dan potensi wilayah/*locality*; mampu mengidentifikasi kebutuhan masyarakat sebagai basis penyusunan program aksi bersama para pemangku kepentingan; mampu membuat desain model dan pendekatan pemberdayaan masyarakat; mampu merumuskan berbagai alternatif kebijakan sosial; serta mampu memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terkini untuk melakukan intervensi upaya pembangunan sosial.

Prodi Pembangunan Sosial diharapkan bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten dan dibutuhkan oleh lembaga pemerintahan, masyarakat, dan perusahaan swasta. Profil lulusan Prodi Pembangunan Sosial antara lain: *Community Facilitator*, *Social Development Officer*, Pengamat dan Peneliti Sosial, Penggerak dan Perancang Usaha Sosial, Konsultan Sosial, Analis Pemberdayaan Masyarakat, Analis Kebijakan Sosial, dan Analis Program Tanggung jawab Sosial Perusahaan.

Untuk mewujudkan hal tersebut maka Prodi Pembangunan Sosial mengaplikasikan 20 matakuliah inti Asosiasi Pembangunan Sosial Indonesia (APSI), sehingga prodi memiliki 31 matakuliah wajib prodi, dan matakuliah wajib lainnya adalah matakuliah negara dan sekolah tinggi. Untuk matakuliah pilihan, Program Studi

Pembangunan Sosial memiliki 6, antara lain: Pendidikan Masyarakat, Pluralisme dan Kesejahteraan, Pendekatan Kritis Intervensi Sosial, Manajemen Pelayanan Sosial, Pembangunan Kepariwisata, Sistem Usaha Kesejahteraan Sosial. Program Studi Pembangunan Sosial juga memiliki 5 (lima) matakuliah yang mendukung program MBKM, yaitu: Pengorganisasian Masyarakat, Kebijakan Sosial, Gerakan Sosial, dan Korporasi Rakyat. Matakuliah baru yang disepakati bersama dengan Pimpinan STPMD “APMD” adalah: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Korporasi Rakyat, Sosiologi Politik, Tatakelola Usaha Kesejahteraan Sosial, Pendekatan Kritis Intervensi Sosial, Manajemen Pelayanan Sosial, serta Sistem Informasi dan Masyarakat Digital.

Matakuliah tersebut merupakan pengejawantahan kerangka tiga relasi besar antara negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Pembangunan Sosial dalam pilar negara dijalankan oleh lembaga-lembaga dalam organisasi pemerintahan. Pendekatan ini lebih dikenal dengan nama pendekatan statis (*statist approach*). Pembangunan Sosial dalam kerangka masyarakat sipil merupakan strategi masyarakat secara bersama-sama mengembangkan komunitas lokalnya. Kerangka ini lebih dikenal dengan nama pendekatan komunitarian (*communitarian approach*). Pembangunan sosial dalam kerangka masyarakat ekonomi bertujuan untuk membangun kemampuan individu-individu dalam masyarakat agar individu-individu tersebut bisa mandiri dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Pendekatan ini lebih mengarah pada pendekatan perusahaan (*enterprise approach*) (Midgley, 1997).

Ketika berbicara tentang pilar negara maka mahasiswa akan disugahi matakuliah Kebijakan Sosial maupun Manajemen Pelayanan Sosial, kemudian ketika membahas pilar masyarakat sipil maka mahasiswa akan diberikan pemahaman tentang berbagai tipologi Gerakan Sosial dan matakuliah pendukungnya. Dan ketika ingin memahami tentang pilar masyarakat ekonomi maka mahasiswa bisa mengikuti matakuliah Koorporasi Rakyat, Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pembangunan Kepariwisata, dsb. Interseksi dari ketiga pilar tersebut berada pada ranah Pemberdayaan Masyarakat.

Pemberdayaan Masyarakat menjadi interseksi dari tiga relasi besar antara negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi. Melalui proses pemberdayaan yang dilakukan oleh *stakeholders* tersebut masyarakat diharapkan bisa secara mandiri dan berkelanjutan mengelola lembaga, sumber daya dan potensi lokal. Dalam konteks Indonesia, ketiga strategi diatas harus digunakan sekaligus. Artinya, ketika pemerintah (negara) melakukan pembangunan sosial dalam rangka mengentaskan masalah kemiskinan, maka peran-peran dari swasta (masyarakat ekonomi) dan sektor ketiga (masyarakat sipil) sebagai 3 (tiga) pilar pembangunan sosial harus dilibatkan, sehingga penanganan permasalahan sosial bisa berjalan secara efektif.

Pemahaman tiga pilar tersebut menghasilkan kesepakatan tentang ruang lingkup pengembangan kurikulum dan keilmuan Prodi Pembangunan Sosial, yakni: prodi pembangunan sosial diharapkan bisa menciptakan harmonisasi antar *stakeholders* sebagai upaya intervensi pembangunan sosial dengan kegiatan ekonomi dan dimensi lain dalam proses pembangunan yang lebih

luas. Melalui proses pembangunan sosial diharapkan lulusan mampu merumuskan kebijakan dan program ekonomi berkelanjutan yang selaras dengan konsep investasi sosial dan produktivisme yang secara khusus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Program-program pembangunan sosial memerlukan intervensi yang membutuhkan partisipasi dan tindakan manusia dalam bentuk proyek, program, kebijakan, dan rencana yang mampu mencapai tujuan pembangunan sosial. Dengan kata lain, manusia tidaklah terseret arus peristiwa secara sembarangan, namun memberikan pengaruh terhadap masa depannya dalam konteks yang lebih luas di bidang sosial, ekonomi, dan perubahan politik dengan menekankan peranan tiga pilar utama dalam praktik pembangunan sosial.

Cakupan pembangunan sosial bersifat universal dan berfokus pada keseluruhan masyarakat. Meski demikian secara historis Prodi Pembangunan Sosial cenderung *concern* terhadap sumber daya kelompok-kelompok masyarakat yang mendapat keuntungan kecil dari pembangunan ekonomi, seperti kelompok miskin pedesaan dan perkotaan, etnis minoritas, individu dengan keterbatasan, dan buruh. Kurikulum pembangunan sosial juga memberikan perhatian terhadap perempuan dan isu gender, serta memberikan perhatian terhadap masyarakat lokal yang sering kali terpinggirkan dan terdiskriminasikan (kelompok marginal).

Pengembangan kurikulum Prodi Pembangunan Sosial bertujuan untuk meningkatkan dan mempromosikan usaha-usaha kesejahteraan sosial masyarakat. Gagasan dari kesejahteraan sosial masyarakat antara lain adalah: pemenuhan kebutuhan sosial,

masalah sosial teratasi, dan kesempatan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh keluarga, komunitas, dan masyarakat. Komitmen untuk mencapai kesejahteraan sosial dapat direalisasikan melalui proses pembangunan multifaset yang dinamis dengan menggunakan investasi sosial dan mengambil kekuatan pertumbuhan ekonomi untuk kepentingan sosial dalam kerangka tiga pilar utama; negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi.

#### **D. SISTEMATISASI KURIKULUM PROGRAM STUDI SARJANA PEMBANGUNAN SOSIAL**

Proses Perubahan kurikulum terus berlangsung secara perlahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Prodi Pembangunan Sosial. Sistematisasi pengembangan kurikulum prodi mulai terarah sejak perubahan nama di tahun 2019. Dalam proses penataan itu ada beberapa faktor yang menjadi orientasi pengembangan kurikulum Prodi Pembangunan Sosial. *Pertama*, kurikulum perguruan tinggi di Era Industri 4.0 harus mengalami perubahan yang sistematis dalam rangka mendukung program Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Dengan demikian penerapan kurikulum berbasis kompetensi yang berorientasi pada program MBKM harus dilakukan oleh Prodi Pembangunan Sosial untuk menjawab tantangan tersebut. Sehingga kurikulum yang ada di prodi lebih menekankan pada penguasaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni (IPTEKS) untuk membentuk manusia yang memiliki iman dan taqwa (IMTAQ) sehingga tidak hanya berorientasi pada pragmatis dan materialis yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan harus disesuaikan dengan kompetensi yang



dipaparkan dalam CPL dan semakin tingginya tuntutan pengguna atas kualitas lulusan.

*Kedua*, Semakin tingginya kompetisi antar perguruan tinggi mengakibatkan Prodi Pembangunan Sosial berbenah dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan *branding* prodi. Terlebih perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat disparitas interaksi masyarakat di dunia nyata dan maya begitu tipis. Mungkin tidak semua masyarakat “*melek*” internet. Namun semua kampus harus bisa bermain secara lihai di ranah ini. Pasar mereka tidak hanya yang “buta” internet, tapi juga masyarakat yang sudah “*melek*” internet, sehingga pendidikan tinggi harus menjadi garda terdepan untuk segala kemajuan teknologi. Di era digital ini, upaya branding atau penguatan citra suatu perguruan tinggi dimensinya menjadi luas. Baik *offline* maupun *online*. Baik turun langsung dengan berkiprah di masyarakat, maupun melalui kegemaran “berkampanye” di dunia maya. Porsinya harus sama dan harus bisa saling mendukung upaya *branding* kampus.

Pengembangan kurikulum prodi yang berorientasi pada program MBKM akan berbanding lurus dengan upaya *branding* prodi dan menjadi salah satu ujung tombak bagi publikasi dan promosi prodi. Oleh karena itu keberadaan kurikulum yang dinamis diharapkan bisa meningkatkan animo lulusan SMA/SMK untuk berkuliah di Prodi Pembangunan Sosial. Hal ini terbukti dari adanya 100% tingkat kenaikan jumlah mahasiswa baru di T.A. 2021/2022 karena *branding* Prodi Pembangunan Sosial dilakukan secara lebih menarik dan tertata rapi. Hal tersebut menggambarkan bahwa terobosan pengembangan

kurikulum prodi merupakan keniscayaan bagi prodi. Pengembangan Kurikulum 2021 dilakukan sebagai upaya penyempurnaan *branding* media, baik melalui desain komunikasi visual, perancangan konten dan visual branding serta mengelola pesan dan komentar pengunjung yang didukung dengan adanya kegiatan *assessment* media publikasi prodi. Kegiatan ini diharapkan bisa peningkatan *standing position* prodi di mata khalayak sehingga bisa bersaing dengan perguruan tinggi lain dalam menjaring mahasiswa.

*Ketiga*, pengembangan kurikulum prodi dilakukan dengan untuk mencetak lulusan yang memiliki keunggulan yang khas (*distinctive advantage*) dan kompetensi akademik di bidang pembangunan sosial, yang mampu memahami dan menguasai berbagai persoalan/ isu-isu sosial dalam konteks pemberdayaan masyarakat melalui kebijakan sosial, pengembangan masyarakat dan pelayanan sosial. Untuk mencapai keunggulan/kompetensi tersebut, program studi Pembangunan Sosial berusaha melakukan pengembangan kurikulum dengan melibatkan pihak-pihak eksternal, sehingga kurikulum yang dihasilkan dapat selalu mengikuti perkembangan ilmu pembangunan sosial, pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik, dan bisa meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan prodi.

Pengembangan kurikulum pada T.A. 2021/2022 ini dilakukan untuk penyempurnaan kurikulum 2021, assesment konten matakuliah, pengayaan bahan ajar, memperkuat kompetensi keilmuan dengan memasukkan komponen *softskill* pada capaian pembelajaran, penyusunan *draft* standar operasional prosedur pelaksanaan praktikum, refreshing topik skripsi, penguatan program

Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) dan merencanakan sertifikasi keahlian (profesi) lulusan Pembangunan Sosial. Proses pengembangan kurikulum 2021 dilakukan dengan metode FGD dan analisis hasil diskusi secara teratur. Kegiatan ini dilakukan oleh internal prodi untuk menyempurnakan kurikulum yang telah disusun agar bisa digunakan secara utuh dalam kerangka program MBKM, sehingga bisa diimplementasi secara sistematis dan menghasilkan output yang selaras dengan kebutuhan masyarakat.

Sebagai upaya sistematisasi pengembangan kurikulum maka Program Studi Pembangunan Sosial STPMD “APMD” meletakkan kerangka pembangunan sosial pada kerangka tiga relasi besar, yaitu pilar negara, masyarakat sipil dan masyarakat ekonomi melalui proses pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan. Keberadaan Prodi Pembangunan sosial dengan kurikulum baru diharapkan bisa mengintegrasikan, menyeimbangkan, dan menyatukan pembangunan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, serta mengekspresikan nilai martabat manusia, persamaan, dan keadilan sosial sehingga tercipta masyarakat humanis dan sejahtera.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boer L & Keokkoek A. 1994. Development and Human Security. *Third World Quarterly Journal of Emerging Areas*, 15 (3).
- Junaidi, Aris, et.al. 2020. *Panduan Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi di Era Industri 4.0 untuk Mendukung Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Macarov, David. 1995. *Social Welfare: Structure and Practice*. London: Sage Publication.

- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2013. *Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013*. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. 2020. *Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020*. Jakarta, Jakarta, Indonesia: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.
- Midgley James. 1994. *The Challenge of Social Development: Their Third World and Ours 1993, Daniels S. Sanders Peace and Social Justice Lecture*. Social Development Issues, Vol. 16 (2).
- Midgley, James. 1997. *Social Welfare in Global Context*. California: SAGE Publications.
- Midgley, James. 2020. *Pembangunan Sosial: Teori dan Praktik*. Yogyakarta: UGM Press.
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. 2004. *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues* (4 ed.). New York: Pearson.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. *Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012*. Jakarta: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. 2012. *Pendidikan Tinggi. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012*. Jakarta: Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.



## **BAB V**

# **KELUAR DARI *MAINSTREAM*: MENGHADIRKAN KOMUNIKASI PEMBERDAYAAN**

**Habib Muhsin dan Irsasri**

Program studi (Prodi) Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” pada awal mula berdirinya bernama Jurusan Ilmu Komunikasi dengan Program studi yang dimiliki yaitu Ilmu Penerangan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 015/0/1989 dengan status terdaftar tertanggal 16 Maret 1989. Pada saat itu lulusan Prodi Penerangan STPMD “APMD” dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan tenaga juru penerangan di Departemen Penerangan RI. Dewasa ini Prodi Ilmu Komunikasi berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks. Status Akreditasi Prodi Ilmu Komunikasi dengan predikat B berdasarkan SK Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1929/SK/BANT-PT/Akred/S/VII/2018. Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” saat ini memiliki Visi “Menjadi Pusat Pengembangan Komunikasi Pemberdayaan yang Menghadirkan Keunikan dan Keragaman Lokal serta Memperjuangkan Daulat Rakyat”. Visi ini sudah mengalami perubahan guna revitalisasi dalam rangka penguatan *positioning* Komunikasi Pemberdayaan yang menjadi *platform* Prodi Ilmu Komunikasi. Sementara visi yang lama adalah “Menjadi Pusat Pengembangan Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa”. Kini, Prodi Ilmu Komunikasi memiliki Misi yang baru yaitu: Pertama, Terwujudnya Tata Kelola Prodi

Ilmu Komunikasi yang Baik. Kedua, Mengembangkan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Komunikasi Pemberdayaan yang Menghadirkan Keunikan dan Keragaman Lokal serta Memperjuangkan Daulat Rakyat. Ketiga, Mengembangkan Kompetensi Peserta Didik dengan Spirit Komunikasi Pemberdayaan yang Menghadirkan Keunikan dan Keragaman Lokal serta Memperjuangkan Daulat Rakyat. Perubahan yang terjadi tidak hanya pada visi dan misi namun juga pada kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi. Selain itu, Prodi Ilmu Komunikasi juga terus meningkatkan kualitas akademik dan keterampilan teknis. Salah satunya sektor yang ditingkatkan adalah dengan menambah fasilitas pendukung seperti Laboratorium Sosial dan Komunikasi, ruang multimedia, serta Studio Radio Ganesha FM.

Dinamika perumusan visi misi dan kurikulum berjalan seru dan panjang bahkan dimulai sejak tahun 2020 yang lalu dengan menggelar diskusi *platform* prodi komunikasi pada tanggal 7 Maret 2020 dengan mengundang tiga narasumber sebagai berikut: Pertama, Dr. JC Tukiman Taruna Sayoga, Ketua Dewan Penyantun UNIKA Soegijapranata Semarang sekaligus dosen Pascasarjana UNDIP dan UNS dalam matakuliah *Community Development Planning*. Narasumber kedua, Nissa Cita A, S.Sos., M.commun, dosen Prodi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia dan narasumber ketiga Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si, Ketua STPMD “APMD”.



Foto 1. Diskusi *Platform* Prodi Ilmu Komunikasi

Para narasumber tersebut memaparkan berbagai pandangan yang menarik dalam rangka memberikan masukan dan sekaligus penguatan *platform* Prodi Ilmu Komunikasi yaitu “Komunikasi Pemberdayaan”. Dr. Tukiman mengungkapkan: “mimpi Prodi Ilmu Komunikasi pemberdayaan berarti kita akan dan harus bergelut setidaknya pada enam ranah kajian berikut, yaitu: Pertama, apa, mengapa, dan bagaimana komunikasi mengembangkan matabat manusia. Kedua, apa, mengapa dan bagaimana komunikasi meningkatkan partisipasi masyarakat. Ketiga, apa, mengapa dan bagaimana komunikasi mengembangkan keadilan dan berlaku adil. Keempat, apa, mengapa, dan bagaimana komunikasi memberdayakan masyarakat secara berkesinambungan. Kelima, apa, mengapa, dan bagaimana komunikasi dapat meningkatkan pemahaman dan rasa percaya diri. Keenam, apa, mengapa, dan bagaimana komunikasi mendorong semakin kuatnya cita-cita menjadi tuan rumahnya



sendiri”. Sedangkan Nissa Cita lebih menekankan pada peluang dan tantangan Prodi Ilmu Komunikasi saat ini, yaitu: “ peluangnya adalah komitmen Indonesia untuk SDGs, program dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah yang terus meningkat, peminat jurusan komunikasi secara umum meningkat 200%, sementara tantangan yang dihadapi adalah komunikasi pemberdayaan kurang seksi (baca: menarik), lapangan kerja dan alumni terbatas”. Menurut Nissa bukan berarti dengan *platform* komunikasi pemberdayaan menjadi tidak menarik, justru ini menjadi kekhasan sendiri di STPMD “APMD”. Nissa memberikan strategi yang bisa ditempuh agar Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” menjadi *leading sector* dengan menawarkan beberapa strategi yaitu : memahami “*the big player*” (pemerintah, NGO, dan CSR-swasta), penguatan kurikulum, memastikan ketertarikan dengan lapangan kerja dan mengembangkan kemitraan dan publikasi. Sedangkan narasumber ketiga Dr. Sutoro Eko mengemukakan pandangan-pandangan yang mengarah pada ranah komunikasi emansipatoris, nusantara, lokal, dan rakyat. Menurut Ketua STPMD “APMD” tersebut, komunikasi pemberdayaan hadir untuk alternatif atas komunikasi pembangunan yang mengubah masyarakat sebagai komunikan menjadi masyarakat sebagai komunikator, sesuai spirit komunikasi kritis, posmodernis, dan poskolonial. Dalam kesempatan tersebut Sutoro Eko menawarkan sudut pandang lain dengan istilah komunikasi nusantara, “Komunikasi nusantara yaitu urat nadi komunikasi dan darah informasi tidak hanya terjadi di ruang-ruang modern dan global, tapi juga menyebar ke ruang kehidupan lokal di seluruh negeri dan desa di nusantara”. Peta jalan komunikasi nusantara ini menampung

dan memiliki cakupan yang kompleks terutama benang merah dan intisari komunikasi pemberdayaan. Komunikasi nusantara pun memiliki kunci-kunci komunikasi strategis seperti keindonesiaan, komunikasi antarbudaya, khazanah lokal atau kedaerahan, serta komunikasi kerakyatan/kedaulatan rakyat.



Foto 2. Diskusi *Platform* Prodi Ilmu Komunikasi

Lulusan Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” bergelar Sarjana Ilmu Komunikasi (S.I.Kom) dan tersebar di berbagai daerah di Indonesia dengan profesi di berbagai bidang komunikasi. Hal ini dikarenakan mahasiswa Prodi Ilmu komunikasi juga banyak yang berasal dari daerah-daerah di seluruh Indonesia. Tentu dengan adanya *input* mahasiswa yang berasal dari berbagai latar belakang kultur, sosial, kemasyarakatan menjadi poin keunggulan tersendiri bagi khasanah keilmuan dan produktivitas Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD”. Untuk itu profil lulusan Prodi Ilmu Komunikasi dapat dijabarkan sebagai berikut: *Communication officer, Social*

*Marketer, Narator/story teller, Jurnalis, Fasilitator Pemberdayaan, Entrepreneur, Broadcaster, Konsultan komunikasi, dan Content Creator.* Sebagai penegasan posisi serta bentuk pergaulan yang luas dan kaya, Prodi Ilmu Komunikasi masuk dalam kepengurusan Asosiasi Pendidikan Tinggi Komunikasi (ASPIKOM) di departemen kurikulum. Dengan demikian, kompetensi utama lulusan Prodi Ilmu Komunikasi mengikuti apa yang sudah dirumuskan oleh Tim Penyusun ASPIKOM (2010) yaitu: Pertama, memiliki kesadaran dan wawasan tentang luas pengaruh ilmu komunikasi dalam konteks kehidupan sosial, budaya, ekonomi dan politik. Kedua, mempunyai pengetahuan dan keterampilan merencanakan, menerapkan dan mengevaluasi program komunikasi dalam berbagai konteks komunikasi. Ketiga, memiliki keterampilan dalam memanfaatkan kemajuan teknologi komunikasi dan memahami efek sosial-komunikasi yang ditimbulkan akibat pemanfaatan teknologi tersebut. Keempat, memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan sistem informasi dan komunikasi sesuai kebutuhan profesi dan organisasi. Kelima, memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar komunikasi yang ditunjang oleh kemampuan *human relations*, persuasi dan negosiasi dalam menangani berbagai masalah komunikasi dan membangun relasi dengan berbagai bidang profesi dan institusi komunikasi lainnya. Keenam, memiliki motivasi, sikap dan perilaku sesuai dengan etika profesi dalam mengembangkan profesionalisme di bidang komunikasi.

Pada bagian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Prodi Ilmu Komunikasi menetapkan aspek-aspek sesuai dengan rumusan CPL ASPIKOM (2010) meliputi: Pertama sikap: bertakwa kepada Tuhan

Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika; berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain; bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan; menjalankan tugas dengan penuh tanggungjawab dengan menghasilkan produk isi pesan komunikasi, kajian bidang komunikasi, dan program komunikasi yang memberi manfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial dan etika yang berlaku. Kedua Penguasaan pengetahuan: konsep teoritis ilmu komunikasi secara umum; konsep teoritis komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa secara mendalam; konsep teoritis berbagai media (saluran) komunikasi, yang meliputi media cetak, media elektronik (audio/audio-visual), dan media digital; konsep, kaidah, dan proses pengembangan isi pesan untuk mencapai berbagai tujuan komunikasi menggunakan beragam jenis saluran komunikasi; konsep, kaidah, dan proses penyusunan rencana dan implementasi program komunikasi;

konsep, kaidah, dan proses penelitian komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan monodisipliner; konsep umum dan metode aplikasi etika dalam proses komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi, dan komunikasi massa; sejarah perkembangan, penggunaan, dan dampak teknologi di bidang komunikasi dan media; dan pengetahuan faktual tentang jenis dan regulasi penyiaran, pers, jurnalistik, periklanan, informasi publik, dan Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketiga keterampilan khusus: mampu memproduksi isi pesan untuk berbagai tujuan komunikasi menggunakan berbagai jenis saluran komunikasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan sesuai dengan norma hukum, norma sosial, dan etika yang berlaku; mampu membuat kajian atau analisis atas masalah atau isu komunikasi interpersonal, komunikasi kelompok, komunikasi organisasi dan komunikasi massa menggunakan konsep dan teori komunikasi yang relevan; mampu menjalankan program komunikasi untuk mencapai tujuan melalui tahap perencanaan, implementasi, dan evaluasi pelaksanaan program komunikasi; mampu menjalankan kegiatan penelitian di bidang komunikasi menggunakan berbagai metode penelitian komunikasi kuantitatif maupun kualitatif dengan pendekatan monodisipliner; dan mampu menyusun tulisan ilmiah di bidang komunikasi sesuai dengan kaidah ilmiah yang berlaku dan mempublikasikannya dalam berkala ilmiah dan/atau forum pertemuan ilmiah. Keempat keterampilan umum: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan

nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian tersebut di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi; mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya; mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya; mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; dan mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi.

Pencapaian rumusan visi misi dan kurikulum 2021 Prodi Ilmu Komunikasi melalui proses dinamika yang panjang dan menarik. Kegiatan ini merupakan salah satu upaya untuk peningkatan dan membarui kualitas pelayanan akademik maupun menegaskan *standing position* Prodi Ilmu Komunikasi. Perjalanan yang begitu dinamis terjadi pada lingkup internal maupun eksternal. Diskusi

kurikulum dilakukan secara maraton mulai bulan Juli hingga September 2021 baik secara *offline* (tatap muka) maupun *online* (*zoom meeting*).



Foto 3. Diskusi Internal Prodi Ilmu Komunikasi dilakukan secara tatap muka

Setiap kali pembahasan kurikulum melibatkan seluruh *stakeholders* Prodi Ilmu Komunikasi yang meliputi para dosen Prodi Ilmu Komunikasi yaitu: Habib Muhsin, Irsari, Fadjarini Sulistyowati, Yuli Setyowati, Ade Candra, Tri Agus Susanta, Sugiyanto dan Irvan Riyadi. Unsur alumni dan sekaligus dosen tidak tetap yang dilibatkan yaitu Umi Muaf (Ketua PRSNI Yogyakarta) dan Agustinus Dwi Nugroho (Dosen Komunikasi ISI Yogyakarta). Masa pandemi Covid-19 saat ini tentu tidak mudah untuk bisa membahas kurikulum secara tatap muka, namun demikian pengurus Prodi berupaya maksimal melibatkan mahasiswa dan alumni meskipun melalui jaringan media *sosial group WhatsApp*. Pada kesempatan forum diskusi peninjauan kurikulum 2021 disampaikan beberapa

perubahan status matakuliah maupun penambahan matakuliah baru seperti manajemen jaringan dan kerjasama dari matakuliah pilihan menjadimatakuliahwajib,menambahmatakuliahmagang,matakuliah komunikasi pariwisata, matakuliah komunikasi kreatif, matakuliah seminar proposal dan tugas akhir berupa dua jalur tidak hanya jalur skripsi namun bisa dengan jalur membuat karya komunikasi. Hasil rumusan kurikulum tersebut mendapatkan dukungan yang positif dari para mahasiswa dan alumni. Mereka berpendapat bahwa sudah saatnya Prodi Ilmu Komunikasi meningkatkan kualitas akademik dan siap menghadapi dunia kerja dengan mewajibkan mahasiswa untuk magang di perusahaan atau institusi media. Selama ini magang memang belum diwajibkan. Dalam rangka memperkuat rencana program magang dan jalur alternatif selain skripsi berupa tugas akhir/karya, Prodi Ilmu Komunikasi berdiskusi dengan salah satu alumni yang bekerja di UII yaitu Sdr Marjito Tri Gunawan, tentang bagaimana teknis pembuatan tugas akhir dalam bentuk karya yang sudah diterapkan di Prodi Komunikasi UII sejak tahun 2015, pengurus Prodi Ilmu Komunikasi juga berdiskusi melalui *WhatsApp* dengan beberapa pengurus Prodi Ilmu Komunikasi lain di UTY, UAD, dan melakukan penelusuran melalui *website-website* perguruan tinggi lain yang menerapkan program yang sama.





Foto 4. Pengurus Prodi Berdiskusi dengan Alumni yang Bekerja di UII

Diskusi awal tingkat Prodi pada tanggal 15 Juli 2021 disepakati tidak mengubah visi misi Prodi karena visi misi Prodi masih relevan dengan visi misi STPMD “APMD” yang tertuang dalam Statuta Sekolah Tinggi (2014) yaitu: menjadi Sekolah Tinggi yang mendorong kemandirian masyarakat dan dan desa secara konsisten dan terpercaya. Pada peninjauan kurikulum 2021 ini ditawarkan penambahan matakuliah baru atau menambah muatan baru pada matakuliah tertentu misalnya menambah muatan jurnalisme *online* pada matakuliah jurnalistik, menambah muatan *cyber* media pada matakuliah hukum komunikasi, menambah muatan komunikasi desa pada matakuliah Sistem Informasi Desa. *Workshop* peninjauan kurikulum tanggal 19 Juli 2021 yang difasilitasi oleh Unit Jaminan Mutu (UJM) dijelaskan bahwa mahasiswa baru 2021 akan diterapkan kurikulum baru 2021 dan mulai semester 5 mahasiswa dapat mengikuti kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). Struktur

matakuliah harus mengandung matakuliah wajib nasional (Agama, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia), kurikulum baru harus memuat matakuliah wajib institusi (Desa dan Pembaharuan, Tata Kelola Desa, Teknik Fasilitasi dan Kepemimpinan). Penambahan muatan teori sosial pada matakuliah Sistem Sosial Budaya Indonesia, teori ekonomi di matakuliah Sistem Ekonomi Indonesia dan teori politik pada matakuliah Sistem Politik dan Pemerintahan RI. Momentum peninjauan kurikulum 2021, Prodi Ilmu Komunikasi diizinkan menambah matakuliah baru maksimal 21 sks, untuk itu Prodi merumuskan penambahan matakuliah baru antara lain: komunikasi pariwisata, magang, tugas akhir jalur skripsi/jalur karya, jurnalistik online, komunikasi kreatif, seminar proposal dan mengubah matakuliah manajemen jaringan kerjasama dari matakuliah pilihan menjadi matakuliah wajib, sehingga jumlah sks yang harus ditempuh menjadi 146 sks. Penambahan matakuliah baru tersebut dengan pertimbangan Prodi Ilmu Komunikasi harus mengikuti perkembangan dunia komunikasi saat ini dan kemampuan menjalin jaringan komunikasi harus dimiliki setiap lulusan Prodi Ilmu Komunikasi. Dalam forum diskusi tersebut tugas akhir dalam bentuk karya masih menjadi perdebatan di tingkat Prodi, karena harus disiapkan metodologinya, SDM, dan fasilitas pendukung untuk membuat karya sebagai tugas akhir. Aspek-aspek yang masih belum terpenuhi tersebut tidak mengurangi semangat dalam perubahan kurikulum 2021 yang lebih baik. Sesungguhnya tradisi mahasiswa membuat karya video pendek sudah diberlakukan dalam satu tahun terakhir, setiap mahasiswa yang ujian skripsi diwajibkan membuat *karya video* yang mengulas skripsi ataupun mengangkat isu lain

yang menarik. Video karya mahasiswa tersebut kemudian diunggah ke media sosial dan *website* Prodi Ilmu Komunikasi [www//ikom.apmd.ac.id](http://www//ikom.apmd.ac.id). Kekhasan komunikasi pemberdayaan diwujudkan dalam karya-karya nyata Prodi yang berbeda dengan Prodi komunikasi *mainstream* lain yang lebih mengarah modern dan industri, sementara Prodi komunikasi STPMD “APMD” lebih ke arah masyarakat dan desa yang menjadi roh dalam komunikasi pemberdayaan. Melalui karya yang dihasilkan martabat desa dapat terangkat dengan tidak menghilangkan keilmuan tapi unsur keilmiahannya diperkuat dengan melakukan riset lapangan, bergaul, berdesa, dan *story telling*.

Hasil rumusan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi kemudian dipresentasikan dan dibahas di forum *workshop* kurikulum pada tanggal 4 Agustus 2021 yang difasilitasi oleh UJM dan dilakukan secara daring.



Foto 5. *Workshop* Kurikulum Prodi-Prodi STPMD “APMD”

Dalam forum *workshop* kurikulum tersebut rumusan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi tidak serta merta diterima secara baik karena beberapa hal seperti jumlah sks yang terlalu banyak 146 sks, kurang memberi porsi pada kepentingan minoritas (kaum marjinal), masih minimnya karya-karya dosen yang bisa menjadi acuan dalam membuat tugas karya mahasiswa. Matakuliah magang apabila ditawarkan di semester 7 terlalu berat bagi mahasiswa karena harus mengikuti KKN dan tugas akhir/skripsi. Ketua STPMD “APMD” menyoroti bahwa penyusunan kurikulum tidak boleh biasa-biasa saja karena merupakan jiwa raga pengetahuan sehingga lulusannya harus bisa “ *thinking, talking, dan working*”, tugas akhir skripsi tidak boleh dihilangkan dan kalau mahasiswa membuat karya komunikasi sifatnya tambahan bukan menjadi kewajiban di tugas akhir di samping itu kekhasan komunikasi pemberdayaan harus diperkuat keilmuannya. Atas masukan-masukan tersebut Prodi Ilmu Komunikasi segera merespons dengan menyelenggarakan diskusi Prodi pada tanggal 5 Agustus 2021 secara luring (tatap muka) dan menghasilkan beberapa keputusan yaitu kekhasan Prodi dengan mengusung komunikasi pemberdayaan masih dipertahankan namun perlu diperkuat dari aspek epistemologi, ontologi, dan aksiologinya, pada bagian profil lulusan perlu ditambahkan profesi *content creator*, matakuliah seminar proposal tidak lagi menjadi matakuliah wajib namun dimasukkan pada bagian penyusunan tugas akhir/skripsi, menambahkan muatan komunikasi desa di matakuliah Sistem Informasi Desa (SID), menambahkan jurnalisme *online* pada matakuliah jurnalistik, dan menambahkan muatan komunikasi nusantara pada matakuliah komunikasi lintas budaya.

Berbagai diskusi menarik (terutama kurikulum) tersaji sebagai bentuk dinamika dialogis kebebasan di mimbar akademik. Supaya lebih memperkuat kewajiban mahasiswa membuat karya sebagai alternatif pembuatan tugas akhir, Prodi perlu mempunyai data Prodi Ilmu Komunikasi di Perguruan Tinggi (PT) lain yang sudah menerapkan pembuatan karya. Berdasarkan penelusuran yang sudah dilakukan, ada beberapa Prodi Ilmu Komunikasi perguruan tinggi lain yang sudah menerapkan pembuatan karya sebagai alternatif pengganti skripsi antara lain: Prodi Ilmu Komunikasi UII, Prodi Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi UTY, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Mercubuna Yogyakarta, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Multi Media Nusantara. Namun dalam presentasi *workshop* peninjauan kurikulum pada tanggal 9 Agustus 2021, rumusan visi misi dan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi belum sepenuhnya diterima penuh oleh forum *workshop*. Beberapa poin masukan dalam forum tersebut antara lain : penerapan jalur karya sebagai pengganti skripsi belum didukung dengan kapasitas dosen yang mumpuni dan butuh tenaga praktisi yang kapabel di samping itu Prodi Ilmu Komunikasi lebih menekankan keilmuan bukan terapan. Nuansa akademis dan metodologis dalam penerapan jalur karya harus dikuatkan terlebih dahulu. Sedangkan ketua STPMD “APMD” menekankan visi misi Prodi Ilmu Komunikasi belum berubah dan belum mengadopsi pemikiran ketua dan Prodi Ilmu Komunikasi jangan sebagai *follower* perguruan tinggi lain namun harus menjadi pesaing (*contender*). Visi komunikasi pemberdayaan perlu diperkuat dengan memperbanyak dialektika. Dalam kurikulum citra rasa komunikasi pemberdayaan

dirasakan masih kurang dan perlu diperkuat lagi dengan menambah matakuliah baru yang berhubungan dengan pemberdayaan.

Masukan-masukan positif untuk peningkatan kualitas akademik Prodi Ilmu Komunikasi ditindaklanjuti dengan menggelar diskusi secara tatap muka di Ruang Sidang pada tanggal 18 Agustus 2021 dengan hasil sebagai berikut: diperlukan penguatan visi misi komunikasi pemberdayaan, kurikulum harus mencerminkan komunikasi pemberdayaan dengan memasukkan matakuliah baru antara lain: komunikasi kerakyatan, komunikasi desa, komunikasi pemberdayaan, literasi desa. Pada sisi profil lulusan dilakukan penambahan yaitu *content creator*. Upaya perumusan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi terus berjalan dengan dinamis namun belum menunjukkan penyelesaian, pada rapat senat tanggal 25 Agustus 2021 kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi belum bisa disetujui, hal ini disebabkan struktur kurikulum masih lemah dan masih sedikit berubah, *platform* komunikasi pemberdayaan masih lemah bicara tentang desa, sehingga sebaiknya dalam visi misi menghilangkan kata desa.



Foto 6. Diskusi Kurikulum Bersama Ketua STPMD “APMD”

Kemudian rapat senat dilanjutkan pada tanggal 31 Agustus 2021 di mana rumusan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi masih ada catatan antara lain: kajian pada kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi belum memasukkan komunikasi pemberdayaan dan komunikasi desa. Tentu saja Prodi komunikasi masih merasa kurang dan perlu berupaya lebih. Prodi Ilmu Komunikasi kemudian melakukan pertemuan khusus dengan ketua STPMD “APMD” pada tanggal 1 September 2021 di ruang sidang berhasil memutuskan hal-hal sebagai berikut: visi misi Prodi Ilmu Komunikasi perlu disempurnakan “Menjadi pusat pengembangan komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat“. Visi baru ini sejalan dengan visi baru Sekolah Tinggi yang saat ini dalam proses pembahasan di Senat akademik yaitu: “menjadi Perguruan Tinggi yang kokoh dan bermartabat yang

secara keilmuan dan idiologis mendedikasikan jiwa raga tridarma untuk perubahan kehidupan lokal, rakyat, desa dan pinggiran yang lebih maju berdaulat, bersatu dan adil makmur“. *Standing position* komunikasi pemberdayaan yang menjadi ciri khas Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” dikuatkan oleh Dr. Yuli Setyowati, M.Si (dosen Prodi Ilmu Komunikasi), menyampaikan bahwa komunikasi pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma alternatif komunikasi pembangunan dengan tujuan membawa masyarakat kepada keberdayaan dan kemandirian.



Foto 7. Dr. Yuli Setyowati, M.Si. Memaparkan Standing Position Prodi Ilmu Komunikasi

Dalam konteks pembangunan, konsep pemberdayaan memiliki perspektif lebih luas menurut Pearse dan Stiefel (1979): menghormati kebhinekaan, menghormati kekhasan lokal, dekonsentrasi kekuatan, peningkatan kemandirian, peningkatan ruang interaksi, penyediaan akses. Pemberdayaan memiliki makna membangkitkan energi



(*power*), sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk meningkatkan kapasitas dalam menentukan masa depan mereka. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Kemudian konsep pemberdayaan ketika dihubungkan dengan komunikasi mempunyai makna bahwa proses komunikasi yang memanusiasikan manusia, partisipatif dan menyuarakan pihak-pihak yang selama ini tak mampu bersuara (*voicing the voiceless*). Dibutuhkan partisipasi aktif dari seluruh warga masyarakat untuk mewujudkan cita-cita perubahan yang diinginkan. Partisipasi masyarakat sangat berpengaruh terhadap terbentuknya tindakan komunikatif yang sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Tindakan komunikatif masyarakat dalam proses pemberdayaan memperlihatkan keberadaan masyarakat dalam berkomunikasi yang menggerakkan mereka pada suatu kondisi kehidupan yang didasari oleh adanya nilai-nilai dan norma-norma. Spirit komunikasi pemberdayaan yang menghadirkan keunikan dan keragaman lokal serta memperjuangkan daulat rakyat harus melingkupi pada visi misi dan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi yang berbeda dengan Prodi Ilmu Komunikasi *mainstream* lainnya.

Ada penambahan 7 matakuliah baru *non-mainstream* yang lebih mencirikan komunikasi pemberdayaan di kurikulum 2021 yaitu: Komunikasi kerakyatan, komunikasi pemberdayaan, komunikasi dan literasi desa, sosiologi dan komunikasi politik, pemasaran sosial, komunikasi kaum marjinal dan periklanan.

Matakuliah baru yang ditawarkan Prodi Ilmu Komunikasi tentu harus memiliki *power* khususnya dari perspektif kajian keilmuan

maupun implementasinya. Berbagai matakuliah baru Prodi Ilmu Komunikasi menyajikan inisiasi dan muatan yang berfokus pada pemberdayaan dan kedaulatan rakyat. Peran utama misi komunikasi pemberdayaan yang diwujudkan melalui berbagai matakuliah yang baru betul-betul menjadi fokus Prodi Ilmu Komunikasi untuk aktif dan berkontribusi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan manfaat bagi khalayak. Pada tataran konteks komunikasi pemberdayaan, komunikasi dapat memperluas aspek pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan pada pengembangan pemberdayaan. Proses komunikasi pemberdayaan yang strategis tidak hanya terkait pada peningkatan kegiatan dalam bentuk partisipasi masyarakat, akan tetapi, berusaha untuk menghasilkan berbagai alternatif ide dan gagasan melalui penyaluran informasi yang sangat bermanfaat sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta berdampak pada aspek perubahan terutama kehidupan masyarakat tersebut. Masyarakat ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek lagi. Melalui komunikasi pemberdayaan, masyarakat difasilitasi dan diajak untuk melakukan berbagai upaya maupun perubahan demi kepentingan mereka. Masyarakat akhirnya mampu melihat masalahnya dan menyelesaikan secara mandiri tanpa adanya ketergantungan pihak lain dengan demikian masyarakat betul-betul menjadi pelaku atau subjek.

Muatan dalam komunikasi kaum marjinal pun demikian halnya menempatkan masyarakat marjinal menjadi subjek. Tidak boleh ada satu pun warga masyarakat yang ditinggalkan atau tertinggal (*no one left behind*). Fokus pada komunikasi yang berpihak pada inklusif. Komunikasi kerakyatan, komunikasi kaum marjinal,

maupun tataran komunikasi politik senantiasa memberikan ruang dan waktu untuk partisipatoris dan konektivitas. Komunikasi yang saling berhubungan, masyarakat atau warga diberi kesempatan untuk berperan penting mengambil keputusan sendiri yang berpengaruh dan bermanfaat untuk kontribusi terhadap peningkatan taraf hidup mereka. Merujuk pada istilah *Based Community Empowerment* merupakan suatu bentuk kegiatan masyarakat sebagai inisiator dan motivator dalam pengelolaan sumber daya yang mereka miliki dan bertujuan untuk melakukan pemeliharaan terhadap kondisi sosial, lingkungan, ekonomi-pariwisata, tradisi dan budaya yang menjadi ciri khas masyarakat lokal, agar taraf hidup dan kualitas masyarakat itu sendiri meningkat. Keterlibatan proses pengembangan kesejahteraan masyarakat lokal dapat diaplikasikan dengan cara pengintensifan yang dihasilkan oleh bidang kepariwisataan yang dimanfaatkan oleh masyarakat.

Muatan-muatan komunikasi pemberdayaan yang berpihak pada rakyat terutama kaum marjinal tentu harus dikuatkan. Melalui matakuliah baru tersebut para pembelajar komunikasi pemberdayaan dapat menggali, menemukan, memetakan, dan mengeksekusi kekayaan pada khazanah masyarakat terutama di desa. Pada proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, hingga pengelolaan, masyarakat seluruh elemen didukung dan difasilitasi untuk mencari dan menemukan sumber daya yang menjadi potensi mereka di tempat tersebut. Masyarakat dilibatkan secara keseluruhan, tidak hanya yang bertugas untuk mengidentifikasi potensi tersebut yaitu petugas aparat dan jajarannya. Melalui forum yang berbentuk musyawarah diharapkan masyarakat merumuskan dan menentukan

nasib mereka untuk lebih baik. Mempertimbangkan aspek asas manfaat, seluruh unsur masyarakat harus mampu berpartisipasi dan memberikan kontribusi pada proses pembangunan masyarakat lokal. Keberadaan dan peran serta pegiat, pendamping, aktivis, dan profesi lain sebagainya dalam hal ini yang berhubungan dengan komunikasi memiliki posisi yang sangat strategis dan kontributif.

Melalui pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi mutakhir, kaum muda pemerhati dan yang berkecimpung pada keterampilan tersebut akan sangat terasa keberadaan dan dukungannya contohnya dalam proses pengelolaan komunikasi informasi dan literasi desa. Pada aspek pengembangan potensi wisata lokal, tradisi dan budaya daerah atau desa, sangat mengandalkan kontribusi dari bidang komunikasi pemasaran atau pemasaran sosial, manajemen jaringan serta *creative content*. Munculnya berbagai aktivitas pariwisata, seni tradisi dan budaya dengan sendirinya membetuk interaksi dan jalinan ekonomi diberbagai sektor. Hal ini akhirnya meningkatkan taraf hidup dan memberikan manfaat bagi masyarakat lokal. Tentu saja melihat tujuan utama dari penerapan komunikasi pemberdayaan menjadikan kesejahteraan masyarakat meningkat. Niat dan usaha yang mulia melalui bidang akademik ini Prodi Ilmu Komunikasi betul-betul bertransformasi untuk mendukung dan mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat khususnya desa menjadi lebih mandiri, sejahtera dan bermartabat.

Lini akademik khususnya kurikulum dan kompetensi yang dikuasai para lulusan sarjana Ilmu Komunikasi juga menjadi perhatian yang lebih dari Prodi Ilmu Komunikasi. Mengutip dari

pesan Ketua STPMD “APMD” Yogyakarta, Dr. Sutoro Eko, menyatakan bahwa: “ kurikulum baru ini jangan hanya biasa-biasa saja namun harus mengandung Ilmu, *Jeneng*, dan *Jenang*”. Segi ilmu, Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” terus berbenah, bergaul dengan khalayak, terlibat dalam forum-forum keilmuan, dan aktif melaksanakan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat sebagai wujud Tridharma Perguruan Tinggi. Melalui berbagai matakuliah baru, tradisi keilmuan yang ada selama ini diharapkan menjadi mimbar akademik kontributif bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Peninjauan kurikulum 2021 yang menghasilkan matakuliah-matakuliah baru ini juga harus berdampak pada *Jeneng*. Bermakna pentingnya suatu upaya atau pilihan jalan untuk meraih dan menjaga reputasi, kehormatan, karakter diri (Prodi Ilmu Komunikasi STPMD”APMD”). Kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi fokus pada pemberdayaan masyarakat dan berpihak pada daulat rakyat tentu diharapkan berdampak bagi luas sehingga nama STPMD “APMD” khususnya Prodi Ilmu Komunikasi STPMD”APMD” terus bergaung dan indah dibenak masyarakat. Ada kalimat indah mengatakan, kehidupan akan menemukan jalannya sendiri, kebaikan akan menemukan nikmatnya sendiri. Prodi Ilmu Komunikasi STPMD”APMD” berikhtiar melalui ilmu pengetahuan, penelitian, pengabdian, pemberdayaan masyarakat akan bermanfaat nyata bagi masyarakat. Segala upaya diiringi dengan niat yang luhur maka boleh kiranya *Jenang* dinikmati. Niscaya, rezeki (kemakmuran) dan berbagai kemudahan akan mengikuti, terutama pada animo masyarakat yang tertarik dan ingin bergabung di Prodi Ilmu

Komunikasi STPMD”APMD Yogyakarta melalui proses promosi dan penerimaan mahasiswa baru.

Ilmu, *Jeneng*, dan *Jenang* ini haruslah diresapi, dimaknai dengan permenungan yang mendalam dan senantiasa mengiringi langkah Prodi Ilmu Komunikasi untuk terus berkembang dan meningkatkan kualitas. Pada aspek kompetensi yang dikuasai para lulusan sarjana Ilmu Komunikasi, Prodi Ilmu Komunikasi STPMD”APMD” juga menaruh perhatian yang serius. Sesuai dengan petuah Dr. Sutoro Eko selaku Ketua STPMD”APMD” pada setiap momen pertemuan menyampaikan pesan bahwa: ”kita harus menghasilkan Sarjana yang Sujana. Prodi Ilmu Komunikasi STPMD”APMD” juga berupaya bersama untuk menghasilkan para lulusan menjadi pribadi yang tidak saja pintar namun juga sujana atau budiman. Sarjana Ilmu Komunikasi harus memiliki kualitas hati nurani dan kemuliaan/keunggulan otak (inteligensi). Pendidikan merupakan hal yang penting dan fundamental bagi kehidupan setiap orang. Mendapatkan pendidikan yang baik, seseorang akan mendapatkan kehidupan yang lebih terjamin masa depannya. Melalui pendidikan juga membuat seseorang memiliki kebijaksanaan dan menjadikan lulusan SPTMD”APMD” terutama para Sarjana Ilmu Komunikasi yang berilmu amaliah dan beramal ilmiah. Ilmunya bisa diamankan tidak hanya diawang-awang saja.

Proses dialektika yang cukup panjang dan dinamis dilalui oleh Prodi Ilmu Komunikasi namun tetap mengedepankan kepentingan Sekolah Tinggi, peninjauan kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi akhirnya ditetapkan berdasarkan rapat senat akademik pada tanggal 3

September 2021. Dalam kurikulum baru 2021 terdapat 7 matakuliah baru yang selaras dengan visi baru Prodi Ilmu Komunikasi yaitu: Komunikasi kerakyatan, komunikasi pemberdayaan, komunikasi dan literasi desa, sosiologi dan komunikasi politik, pemasaran sosial, komunikasi kaum marjinal dan periklanan. Jumlah sks yang harus diselesaikan 144 sks tidak mengalami perubahan dibandingkan kurikulum lama. Disamping itu ada 4 matakuliah MBKM yang ditawarkan di semester 5 yaitu: CSR, komunikasi kerakyatan, komunikasi pemberdayaan dan pemasaran sosial. Bahan kajian kurikulum Prodi Ilmu Komunikasi dapat dirinci sebagai berikut: konsep dasar ilmu komunikasi, keterampilan dasar komunikasi, sistem informasi dan komunikasi, psikologi komunikasi, sosiologi komunikasi, teori komunikasi, komunikasi dalam kontek antar pribadi, komunikasi kelompok dan organisasi, komunikasi publik dan massa, teknologi komunikasi dan informasi, pengelolaan program komunikasi, komunikasi dan budaya, metode penelitian komunikasi, etika dan budaya komunikasi, komunikasi pemberdayaan, komunikasi kerakyatan, pemasaran sosial. Rincian alur matakuliah dalam struktur kurikulum 2021 dapat dijabarkan sebagai berikut: Semester I (21 sks): bahasa Inggris, desa dan pembaharuan, pendidikan agama, pengantar ilmu komunikasi, *public speaking*, sistem ekonomi Indonesia, sistem politik dan pemerintahan RI, sistem sosial dan budaya Indonesia. Semester II (22 sks): bahasa Indonesia, bahasa Inggris II, fotografi, humas, jurnalistik, kepemimpinan, komunikasi massa, tata kelola desa, pendidikan Pancasila. Semester III (22 sks): dasar-dasar penulisan, teori komunikasi, hukum komunikasi, analisis sosial, pendidikan

kewarganegaraan, kewirausahaan sosial, etika komunikasi, teknik fasilitasi. Semester IV (24 sks): komunikasi organisasi, komunikasi penyuluhan, sosiologi dan komunikasi politik, metode penelitian sosial, produksi siaran audio visual, psikologi komunikasi, komunikasi dan literasi desa, kajian media dan budaya. Semester V (23 sks): komunikasi kerakyatan, CSR, komunikasi pemberdayaan, teknologi komunikasi dan perkembangan masyarakat, literasi media, metode penelitian komunikasi kuantitatif, pemasaran sosial, produksi siaran radio (pilihan), produksi dokumenter (pilihan). Semester VI (23 sks): audit komunikasi, komunikasi lintas budaya, komunikasi kaum marjinal, metode penelitian komunikasi kualitatif, resolusi konflik, manajemen jaringan dan kerjasama, kuliah kerja media, periklanan (pilihan), teknik lobby dan negosiasi (pilihan), dan Semester VII (9 sks): KKN dan skripsi.



Foto 8. Rapat Senat Akademik Penetapan Kurikulum 2021



Melalui matakuliah yang disajikan diharapkan Prodi Ilmu Komunikasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjadi yang terdepan dalam menggaungkan dan menerapkan komunikasi pemberdayaan yang berpihak pada rakyat. Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” juga terus berupaya untuk berbenah meningkatkan diri seiring dengan perkembangan ilmu bidang komunikasi. Prodi Ilmu Komunikasi harus bertransformasi untuk menyesuaikan kebutuhan masyarakat dan zaman yang saat ini penuh dengan tantangan. Rangkaian kegiatan yang bersifat evaluasi diri dan pengembangan Prodi Ilmu Komunikasi seperti perubahan visi dan misi, peninjauan kurikulum, *tracer study*, forum dialogis dengan para alumni dan *stakeholder* merupakan upaya dan tekad untuk terus berinovasi yang berdampak pada kemaslahatan umat manusia.

Rangkaian kegiatan yang berupa diskusi platform Prodi Ilmu Komunikasi, *Workshop* Peninjauan Kurikulum, hingga diskusi perubahan visi dan misi merupakan bentuk formulasi Rencana Strategis Program Studi yang dimaksudkan untuk memberi arah dan pedoman pengembangan program studi untuk masa depan. Formulasi ini disusun berdasarkan *breakdown* dari visi Sekolah Tinggi yang mengandung cita-cita dan komitmen bersama tentang kondisi ideal masa depan yang ingin dicapai dengan mempertimbangkan potensi yang dimiliki, permasalahan yang dihadapi dan berbagai kecenderungan perubahan lingkungan baik internal maupun eksternal yang sedang dan akan berlangsung. Berdasarkan *input-input* tersebut, selanjutnya dirumuskan berbagai program pengembangan yang perlu ditempuh.

Perkembangan manusia, teknologi dan informasi serta perubahan kondisi kehidupan terutama sejak munculnya Pandemi Covid-19 menjadi tantangan yang besar bagi dunia pendidikan agar dapat mempersiapkan lulusan yang inovatif dan kompetitif. Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” juga bergulat untuk menghadapi berbagai tantangan terutama yang akan dihadapi oleh profesi bidang Komunikasi, salah satunya adalah perkembangan teknologi yang mulai mempengaruhi paradigma berpikir dan bertindak seseorang. Maka dari itu kebutuhan *basic* profesi komunikasi sangat diperlukan, yakni *Knowledge* (mengetahui banyak hal, mengetahui *global trend*, pengetahuan serta pendalaman tentang khasanah Desa dan pemberdayaan masyarakat), *Skill* (keterampilan menulis, *public speaking (storytelling)*, fotografi, produksi media/dokumenter, Teknik Fasilitasi, dsb), *Attitude* (memiliki integritas, kreatif, empati, disiplin, kemampuan adaptasi dengan cepat dan bertanggungjawab). Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” terus menguatkan berbagai lini terutama *Skills of Sense* bagi civitas akademika yang diharapkan dapat mewujudkan cita-cita mulia yang sudah dicanangkan melalui visi dan misi Prodi Ilmu Komunikasi maupun STPMD “APMD”.

STPMD “APMD” yang merupakan sebuah perguruan tinggi yang sejak awal berdirinya konsisten menaruh perhatian pada pembangunan masyarakat desa terutama keberpihakan melalui pemberdayaan masyarakat desa. Perhatian ini juga oleh Prodi Ilmu Komunikasi dikedepankan sebagai *standing position* serta respons akademik dan sosial masyarakat dalam menghadapi perkembangan zaman, anomali pasar, dan globalisasi. Kini Prodi Ilmu Komunikasi terus berkembang dan berperan aktif dalam mengembangkan ilmu

pengetahuan sosial transformatif, mempunyai andil ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa, mengatasi berbagai persoalan masalah komunikasi dan pemberdayaan masyarakat, serta mengangkat nilai-nilai luhur dan martabat desa.

Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” terus berkomitmen menyelenggarakan pendidikan Ilmu Komunikasi yang inovatif, profesional, berkualitas, dan berpihak pada daulat rakyat. Tentu hal ini tidak mudah, komitmen Prodi Ilmu Komunikasi diwujudkan pada tindakan-tindakan sederhana namun berdampak salah satunya adalah dengan cara mengelola pendidikan Ilmu Komunikasi secara transparan dan bertanggung jawab. Prodi Ilmu Komunikasi terus memutakhirkan kajian-kajian keilmuan dengan menyelenggarakan penelitian dasar dan terapan untuk pengembangan Ilmu Komunikasi terutama yang bernapaskan komunikasi pemberdayaan. Hal ini adalah salah satu langkah mendarmabaktikan pengetahuan dan keahlian dalam bidang komunikasi untuk kepentingan masyarakat, hal ini telah diwujudkan oleh Prodi Komunikasi dengan melakukan penandatanganan kerjasama (MOU) dengan Desa Gilangharjo Kapanewon Pandak Kabupaten Bantul dan KKPA (Komite Kesejahteraan dan Perlindungan Anak) Desa Gilangharjo pada tanggal 11 Agustus 2020 dalam bidang Tridharma Perguruan Tinggi. Atas kerjasama tersebut Prodi komunikasi secara aktif melakukan pelatihan, penelitian dan pengabdian masyarakat di Desa Gilangharjo. Karya keilmuan juga diwujudkan oleh Prodi komunikasi adalah terbitnya dua buku di tahun 2020 dalam rangka memperkuat khasanah komunikasi pemberdayaan hasil tulisan dosen dan alumni Prodi komunikasi dengan judul: Komunikasi Pemberdayaan di Era

#### 4.0 dan Komunikasi, Media dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Pandemi Covid-19.

Komunikasi Pemberdayaan sebagai isu penting yang diangkat dan menjadi kekhasan Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” ini semakin menguat seiring dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk lebih berperan pada setiap aspek pembangunan. Sebagai upaya alternatif pembangunan, pemberdayaan masyarakat atau pembangunan berbasis komunitas menjadi bagian dari strategi untuk mengembangkan, merekonstruksi serta memperbaiki struktur masyarakat agar lebih berdaya. Dengan demikian, pembangunan berbasis masyarakat menjadi alternatif pembangunan dalam rangka meningkatkan kualitas dan taraf hidup seluruh lapisan masyarakat serta meneguhkan daulat rakyat yang menjadi cita-cita luhur. Oleh karena itu, pembangunan berbasis manusia atau dikenal dengan pembangunan berbasis masyarakat menjadi konsep yang “wajib” direalisasikan dan Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” menjadi yang terdepan untuk meneguhkan dan mengawalinya.

Kurikulum baru Prodi Ilmu Komunikasi 2021 akhirnya bisa dirumuskan dengan baik, hal ini tidak lepas dari peran serta dan dukungan semua pihak baik di lingkup Sekolah Tinggi maupun luar Sekolah Tinggi. Tiada gading yang tak retak kami menyadari bahwa rumusan kurikulum 2021 ini jauh dari kata sempurna dan masih perlu dilakukan peninjauan kembali untuk waktu-waktu yang akan datang agar Prodi Ilmu Komunikasi STPMD “APMD” terus berkembang lebih baik. Pencapaian itu tidak akan terwujud kalau masing-masing pihak lebih mengedepankan “ego” dari pada kepentingan yang lebih besar Sekolah Tinggi. Tentu yang kita pilih

adalah kepentingan bersama demi kemajuan STPMD “APMD”. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan. Tak lupa dalam kesempatan ini kami juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Yayasan Pengembangan Pendidikan Tujuh Belas Yogyakarta, Ketua STPMD “APMD” beserta para wakil ketua yang terus mendorong Prodi Komunikasi untuk terus maju. Kepada rekan-rekan sejawat dosen Prodi Komunikasi STPMD “APMD” sungguh luar biasa pemikiran dan kekompakan kita selama ini. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu anggota senat, para alumni yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu, para mahasiswa yang hebat yang telah mensupport atas peninjauan kurikulum 2021 ini dan para relasi pengurus Prodi komunikasi yang tergabung di ASPIKOM. Akhirnya dirgahayu STPMD “APMD” yang ke-56 meneguhkan martabat meraih kemajuan semoga STPMD “APMD” tetap JAYA. Amin.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Pearse, Andrew dan Michael Stiefel. 1979. *Inquality Into Participation: A Research Approach*. Geneva: UNRISD
- ASPIKOM. 2010. *Kompetensi Utama Lulusan Prodi Jenjang Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana Rumpun Ilmu Komunikasi*. Jakarta: ASPIKOM
- ASPIKOM. 2010. *Capaian Pembelajaran Lulusan Prodi-Prodi Bidang Ilmu Komunikasi*. Jakarta: ASPIKOM
- Statuta STPMD “APMD” 2014.

## Pantun

*Kalau hendak berlayar sampai ketepian  
Hari ini cuacanya berawan  
Dinamika silih berganti penuh perjuangan  
Semoga kelak Prodi Ilmu Komunikasi menjadi andalan*

*Elang terbang jauh melayang,  
Hinggap sebentar di atas tiang.  
Prodi Ilmu Komunikasi terus berkembang,  
Demi STPMD”APMD” yang kian cemerlang.*

*Pohon Jati tumbuh berjajar lima,  
Sudah tinggi setinggi Cendana.  
Ilmu pengetahuan bertiang dharma,  
Menjadikan insan Sarjana yang Sujana.*

## **BAB VI**

### **MENGHADIRKAN *GOVERNMENT* DAN *CITIZEN MAKING***

**Guno Tri Tjahjoko dan Utami Sulistyana**

“Kita tidak boleh menjadi pengikut, memperoleh inspirasi dari mana pun boleh, tapi kita tidak boleh hanya menjadi pengikut.

Kita harus menjadi contender, harus menjadi penantang dan pejuang, semua prodi harus bersikap begitu. Ini bagian dari spirit postkolonial, spirit post-structural, spirit postmodernism. Jadi, kita yakin pada kekuatan kita. Ini bagian dari kita itu membajak kesempatan, membajak momentum untuk meraih kesempatan yang lebih besar.”

**(Sutoro Eko Yunanto, 2021)**

#### **A. KRISIS ILMU PEMERINTAHAN**

Tidak bisa disangkal bahwa praktik pengajaran ilmu pemerintahan di Indonesia dipengaruhi oleh dua mazhab, yakni: Mazhab Bulaksumur (Universitas Gadjah Mada) dan Mazhab Bandung (Universitas Padjajaran) dan Jatinangor (Institut Pemerintahan Dalam Negeri). Ironinya dua mazhab ilmu pemerintahan tersebut tercerabut dari keberpihakan pada hajat hidup orang banyak. Mazhab Bulaksumur mengembangkan ilmu pemerintahan sebagai *beesturkunde* (birokrasi) yang berevolusi menjadi administrasi publik. *Beesturkunde* berawal dari Hukum Administrasi, kemudian

berevolusi menjadi Administrasi Publik, selanjutnya menjadi Manajemen Publik, dan berevolusi menjadi *governance* (tata kelola).

Pada tahun 1990 hadir para doktor ilmu politik di Universitas Gadjah Mada dan mensubversi ilmu pemerintahan yang bercitarasa administrasi publik menjadi politik pemerintahan. Ilmu pemerintahan dimaknai sebagai bagian dari ilmu politik. Mazhab Bulaksumur (UGM) tidak berhasil membentuk ilmu pemerintahan secara utuh, yakni setelah tahun 1990-an Ilmu Pemerintahan terbelah, tergantung orang dalam menentukan pilihan dan preferensi (Yunanto, “*Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*” <http://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/view/109/> diakses 3 November 2021).

Sebaliknya Mazhab Bandung dan Jatinangor mengembangkan ilmu pemerintahan yang diidentikkan dengan hal ihwal administrasi. Mazhab ini mengembangkan warisan Belanda, bahwa ilmu pemerintahan identik dengan ilmu perkantoran. Mazhab Bandung dan Jatinangor dalam perkembangannya juga mengalami krisis keilmuan. Mazhab ini mencoba merekonstruksi ilmu pemerintahan yang dikembangkan oleh Taliziduhu Ndraha (2011). Ndraha mengembangkan konsep *kybernologi* yang mencoba membuat Ilmu Pemerintahan baru seperti yang telah diklaim, tetapi menggunakan konsep manajemen publik baru, di mana terdapat paradigma baru dalam Administrasi Publik yaitu konsep Manajemen Publik baru, tetapi digunakan untuk mengklaim Ilmu Pemerintahan baru. *Kybernologi* tidak membahas paradigma tentang Ilmu Pemerintahan, tetapi justru seperti Ilmu Mengemudi, di mana berbicara tentang Ilmu



Pemerintahan itu tidak gampang karena terkait dengan pemerintah aktivitas dan arenanya sangat kompleks (Yunanto, “*Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*” <http://jurnal.apmd.ac.id/index.php/governabilitas/article/view/109/> diakses 3 November 2021).

Memperhatikan dua mazhab tersebut yang telah gagal merekonstruksi ilmu pemerintahan sebagai ilmu, maka perlu dilakukan riset dan kajian mendalam tentang ilmu pemerintahan yang berpihak pada hajat



hidup orang banyak. Untuk menjawab tantangan tersebut, Program Studi (Prodi) Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD”, Yogyakarta bekerjasama dengan Kesatuan Program Studi Ilmu Pemerintahan Indonesia (KAPSIPI) dan Asosiasi Dosen Ilmu Pemerintahan Seluruh Indonesia (ADIPSI), mengadakan Webinar Mazhab Timoho dengan topik “*Government Making: Membuat Ulang Ilmu Pemerintahan*” secara daring pada 22 Juli 2021. Webinar Mazhab Timoho diikuti 251 dosen dan mahasiswa dari seluruh Indonesia (<https://www.kompas.com/edu/read/2021/08/02/095729771/krisis-ilmu-pemerintahan-stpmd-apmd-yogyakarta-gelar-webinar-mazhab-timoho?page=all> / diakses 3 November 2021).

## B. ILMU PEMERINTAHAN SEBAGAI PERSPEKTIF

Pergulatan pemikiran dan dinamika keilmuan yang dirajut dalam diskusi Mazhab Timoho telah menghasilkan pemikiran yang mencerahkan. “Pemerintahan sebagai suatu lembaga dan proses sebenarnya sudah diselenggarakan sejak ribuan tahun yang silam. Semoga Webinar Mazhab Timoho ini menghasilkan pengetahuan dan gagasan baru tentang ilmu pemerintahan,” ungkap Prof. Dr. Utang Suwaryo, Ketua Umum KAPSIPI. Memang ilmu pemerintahan sebagai suatu ilmu masih *prematuur* dan membutuhkan kajian dan penelitian yang mendalam.

Adapun hasil Webinar Mazhab Timoho disarikan dalam tiga hal, *pertama*, secara ontologi ilmu pemerintahan dalam konteks Indonesia didasarkan pada sila ke empat “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan”. Artinya ilmu pemerintahan harus berorientasi pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat selaku pemilik kedaulatan.

*Kedua*, secara epistemologi ilmu pemerintahan yang dikembangkan Mazhab Timoho memiliki lima paradigma (perspektif). Artinya dalam pandangan mazhab Timoho fenomena pemerintahan dalam masyarakat – kita kaji dan bingkai dengan perspektif ilmu pemerintahan. Ringkasnya ilmu pemerintahan sebagai perspektif. *pertama*, perspektif *government* (pemerintah) yang mengkaji tentang isu-isu negara, rakyat, partai politik, demokrasi, pemerintah desa, relasi legislatif, eksekutif dan yudikatif, konstitusi, partisipasi dan kekuasaan. *Kedua*, perspektif *governing* (perbuatan pemerintah) mengkaji isu-isu aktivitas pemerintah, teknologi pemerintah,

peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. *Ketiga*, perspektif *governability* (otoritas dan kapasitas pemerintah), yang mengkaji isu-isu otoritas pemerintah, orang kuat, negara bangkrut, negara bayangan, *local bossism*, *devided government* dan kapasitas pemerintah. *Keempat*, perspektif *governance* (tatakelola pemerintah) yang mengkaji isu-isu tentang *good governance*, tipe pengelolaan pemerintah, model *governance*, desentralisasi, sentralisasi dan interaksi pemerintah dengan non pemerintah. *Kelima*, perspektif *governmentality* (mentalitas pemerintah), yang mengkaji isu-isu membongkar tindakan pemerintah, strategi rasional pemerintah, taktik pemerintah dan strategi pemerintah.

*Ketiga*, secara aksiologi ilmu pemerintahan berpihak pada rakyat sesuai sila ke lima “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Artinya Ilmu pemerintahan tidak melayani elite politik atau birokrat, melainkan untuk kesejahteraan masyarakat.

### **C. EVALUASI KURIKULUM 2016: MELEMBAGAKAN MAZHAB TIMOHO**

Gayung bersambut seiring dengan adanya peninjauan kurikulum 2016, program studi ilmu pemerintahan memiliki agenda untuk melembagakan Mazhab Timoho (5 G) ke dalam kurikulum 2021. Langkah awal yang dilakukan ialah mengevaluasi kurikulum program studi Ilmu Pemerintahan 2016, konteks pengembangan kurikulum dimana posisi “*link and match*” dapat dimulai dan dikembangkan. Apa saja perangkat pembelajaran yang diperlukan selain deskripsi matakuliah yang kemudian diterjemahkan secara detil dalam rancangan pembelajaran semester (RPS). Permasalahan

tersebut di atas tentu perlu eksekusi dari program studi, agar perubahan kurikulum 2021 dapat terwujud.

Evaluasi kurikulum setiap lima tahun penting dilakukan, agar semua *civitas academica* dapat menerima perubahan, paradigma baru dan secara periodik dilakukan audit. Demikian pula dalam menjalankan tridarma (pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat) dan membangun teori (*theory building 5G: complex problem solving*). Program studi harus memiliki sumber daya dosen yang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas untuk memfasilitasi dan menginspirasi mahasiswa belajar, karena dosen adalah penggerak proses pendidikan. Selain itu perlu ketersediaan dan kecukupan materi dan media belajar yang terbuka dengan perkembangan zaman. Artinya ada materi yang dapat digunakan bersama dan dijamin bersama kebaharuannya. Perubahan jaman memerlukan digital teknologi, data pendukung pengetahuan yang *up to date* mengikuti perkembangan zaman.

Selaras dengan adanya evaluasi kurikulum 2016, dilakukan juga sinkronisasi dengan kurikulum Nasional KAPSIPI. Diskusi kurikulum dilakukan oleh pengurus program studi bersama para dosen, mahasiswa dan alumni.



Dalam mendiskusikan kurikulum ada beberapa matakuliah yang mengacu pada kekhasan keAPMDan yang berciri kedesaan

yang dipadukan dengan Mazhab Timoho (5G). Namun ada juga beberapa matakuliah yang diambil dari kurikulum KAPSIPI dengan konten yang disesuaikan dengan visi dan misi kelembagaan. Dalam meninjau kurikulum 2021 dimasukkan tiga muatan: *pertama ilmu* (ilmu guru, ilmu buku dan ilmu laku), *kedua platform* institusi terutama program studi *positioning* penting untuk *novelty*, identitas, arah, *tagline*, bendera program studi Ilmu Pemerintahan dan *ketiga, instrumen akademik* karena kurikulum adalah pengetahuan yang diinstrumentasi (SKS), namun harus menjabarkan ilmu dan *platform*.

Setelah mendiskusikan dan meninjau kurikulum 2016 dan memperhatikan perkembangan jaman dan perubahan visi dan misi lembaga, maka langkah awal yang dilakukan ialah meninjau visi, misi, tujuan, profil lulusan, capaian pembelajaran lulusan dan kompetensi. Visi merupakan arah yang akan diwujudkan oleh program studi ke depan. Visi program studi menjadi landasan institusi keilmuan dan komunitas yang kokoh dalam memperjuangkan terwujudnya kedaulatan rakyat serta menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun misi program studi ialah memperkuat dan meneguhkan keilmuan pemerintahan untuk pembentukan pemerintah (*government making*) dan pembentukan warga (*citizen making*). Selain itu program studi ilmu pemerintahan mencerahkan praktik pemerintahan Nasional, Daerah, dan Desa. Menghasilkan Sarjana Sujana yang berpihak kepada daulat rakyat dan martabat warga.

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, maka dirumuskan tujuan program studi sebagai institusi dan komunitas epistemik yang terbuka, dinamis dan kredibel. Program studi ilmu pemerintahan

menghasilkan keilmuan yang tegas dan jelas dalam kerangka 5 G (*Government, Governing, Governability, Governance* dan *Governmentality*). Dosen dan mahasiswa menghasilkan karya-karya keilmuan pemerintahan yang khas, *novelty* dan kritis. Program studi menyelenggarakan pendidikan pemerintahan dengan pendekatan *ilmu guru, ilmu buku* dan *ilmu laku*. Berkontribusi dalam memperkuat praktik pemerintahan yang berpihak kepada rakyat. Menghasilkan lulusan yang mandiri, berwawasan luas, berintegritas, dan responsif.

Berdasarkan visi, misi dan tujuan yang baru, maka diskusi selanjutnya menentukan profil lulusan program studi ilmu pemerintahan. Adapun profil lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan ialah menjadi pemerintah (eksekutif dan legislatif), menjadi pengelola negara: Aparatur Sipil Negara (analisis kebijakan, analisis anggaran, analisis pembangunan, analisis legislasi, analisis regulasi), Komisioner KPU, Komisioner Bawaslu dan Komisioner Komisi Nasional Hak Azasi Manusia. Selain itu profil lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan menjadi masyarakat sipil profesional (*civil society*): guru, peneliti, konsultan, pendamping desa, aktivis, pegiat desa (*social entrepreneurship*) dan alumni yang bergerak menjadi wiraswasta.

Adapun capaian pembelajaran lulusan Sarjana Ilmu Pemerintahan ialah mempunyai pengetahuan, sikap (nilai) dan ketrampilan dalam hal berpikir (*thinking*), berbicara (*talking*) dan bekerja (*working*) dalam dunia pemerintahan. Sarjana Ilmu Pemerintahan harus mampu memetakan dan menganalisis hajat hidup orang banyak dan kepentingan rakyat sebagai basis input kebijakan. Mampu berbicara dan menyampaikan pendapat dalam aktivitas pemerintahan di

berbagai forum. Mampu melayani warga yang berkaitan dengan pemerintahan. Mampu menghubungkan (*connecting*) relasi para pihak dalam dunia pemerintahan. Mampu menemukan resolusi atas masalah yang dihadapi oleh warga.

Ringkasnya kompetensi ontologis menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan mempunyai kemampuan memahami dan menghayati hakekat pemerintahan dari rakyat oleh pemerintah dan parlemen untuk warga. Kompetensi epistemologis menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang mempunyai kemampuan memahami pembentukan pemerintah (*government making*) dan pembentukan warga (*citizen making*) dengan kerangka 5 konsep besar (*government, governing, governability, governance* dan *governmentality*). Kompetensi aksiologis menjadi Sarjana Ilmu Pemerintahan yang mampu dan terampil dalam membuat produk-produk pemerintah yang berpihak pada kepentingan rakyat banyak, antara lain: kebijakan (ekstraksi, stabilisasi, (re)distribusi, proteksi dan koersi), legislasi (Undang-Undang, Perda, Perdes), regulasi (Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Kepala Daerah, Peraturan Kepala Desa), perencanaan (RPJMD, RKPD, RPJMDes, RKPDDes), anggaran (APBD, APBDes).

Hasil diskusi para dosen menyepakati daftar matakuliah dielaborasi dengan 5 G dan terbagi dalam matakuliah institusi (Ilmu Sosial Humaniora dan ke-APMD-an), matakuliah Nasional dan matakuliah Program studi. Matakuliah institusi, untuk ilmu Sosial Humaniora mencakup matakuliah teori sosial, teori ekonomi dan teori politik. Sedangkan matakuliah ke- APMD-an mencakup matakuliah Kemasyarakatan dan Kedesaan, Tata Kelola Desa,

*Public Speaking*, Teknik Fasilitasi serta Kepemimpinan. Matakuliah Nasional meliputi matakuliah Bahasa Indonesia, Pendidikan Pancasila, Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan dan Bahasa Inggris. Selebihnya adalah matakuliah dari KAPSIPI dan Prodi Ilmu Pemerintahan. Adapun kurikulum 2021 berisi 144 sks termasuk KKN dan skripsi.

Kurikulum 2021 diterapkan untuk mahasiswa baru angkatan 2021. Dalam kurikulum 2021 terdapat 7 (tujuh) matakuliah baru, berjumlah 21 SKS. Matakuliah baru tersebut merupakan pewujudan dari dimasukkannya Mazhab Timoho (5 G) ke dalam kurikulum. Sesungguhnya kurikulum 2021 adalah siasat terhadap kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Konten dari kurikulum 2021 adalah kurikulum keAPMDan yang digabung dengan Mazhab Timoho. Adapun materi kuliah baru dalam kurikulum 2021 ialah teori pemerintahan yang mengkaji tentang 5 G (Mazhab Timoho) dan pendekatan dalam ilmu pemerintahan. Matakuliah Kepemerintahan mengkaji tentang kapasitas pemerintah (*governability*) dan mentalitas pemerintah (*governmentality*). Teknologi dan Informasi Pemerintah mengkaji tentang praktik penggunaan aplikasi dalam pemerintahan serta pelayanan terhadap masyarakat. Matakuliah Konstitusi, Legislasi dan Regulasi mengkaji tentang penerapan hukum dalam pemerintahan. Penganggaran dan Keuangan mengkaji tentang teori pembuatan anggaran baik secara Nasional maupun Daerah. Matakuliah Perencanaan Pemerintah 1 mengkaji proses pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Adapun matakuliah Perencanaan Pemerintah 2 mengkaji proses pembuatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).



Setelah mengelaborasi kurikulum Nasional yang disandingkan dengan Mazhab Timoho dan materi kuliah ke-APMD-an, maka langkah selanjutnya ialah memilah-milah matakuliah, menetapkan bobot SKS, menyusun peta kurikulum, merancang pembelajaran dan menyusun RPS, menyusun mekanisme, prosedur dan instrumen penilaian dan evaluasi (formatif dan sumatif).

Diskusi-diskusi panjang seharian dari pagi, siang sampai sore dilakukan dalam rangka merumuskan struktur kurikulum 2021 - materi kurikulum harus sesuai dengan visi dan misi program studi. Setelah kurikulum sudah baku dan mendapatkan penetapan dari Senat Akademik, langkah selanjutnya secara formal dimasukkan ke Sistem Informasi Akademik Sekolah Tinggi. Proses ini dilalui dengan banyak koreksi dan revisi, karena terkait dengan instrumen kurikulum 2021 (MBKM) berbeda dengan kurikulum 2016. Hal ini berdampak pada persoalan teknis dalam input materi kuliah dalam Sistem Informasi Akademik.

Namun kendala teknis tersebut dapat teratasi dan program studi Ilmu Pemerintahan sudah dapat menyikapi dengan kurikulum MBKM. Semester 1-4 kurikulum 2021 diisi dengan matakuliah inti program studi, kemudian di semester 5 sudah menggunakan format sesuai MBKM. Semua matakuliah di semester 5 sebanyak 4 matakuliah dapat dipilih oleh mahasiswa baru dari program studi lain dalam perguruan tinggi yang sama (Sekolah Tinggi) yang sejak awal kuliah sudah memilih MBKM. Sedangkan di semester 6, mahasiswa peserta MBKM kuliah di perguruan tinggi yang lain/dari perguruan tinggi lain boleh dari program studi yang sama atau program studi

yang lain. Sedangkan di semester 7 mahasiswa diperbolehkan mengikuti magang sesuai dengan kompetensi program studi, yakni: di desa, perusahaan, pemerintah daerah atau Lembaga Swadaya Masyarakat selama 1 semester atau setara dengan 23 sks. Total jumlah SKS kurikulum dengan basis MBKM sebanyak 60 SKS.

Dalam praktiknya ada kendala yang harus kita perhatikan dalam penerapan kurikulum 2021, karena mahasiswa lama akan menggunakan kurikulum yang lama (2016). Jadi angkatan 2020 dan sebelumnya akan menggunakan kurikulum yang lama, kemudian kurikulum yang baru itu akan diikuti oleh mahasiswa angkatan baru (2021). Memang harus ada kesepakatan, karena ada beberapa mahasiswa yang pembaharuan NIM. Ada pindahan mahasiswa baru yang pindah jalur dari program studi lain, maupun dari institusi atau perguruan tinggi lain ke STPMD APMD. Tentunya kurikulum 2021 ini akan mempengaruhi konversi terhadap mahasiswa pindahan dari program studi lain tersebut.

Kurikulum prodi Ilmu Pemerintahan memang belum berubah secara maksimal 100%, karena baru ada 7 matakuliah baru yang menjadi bagian dari peninjauan dan perubahan kurikulum 2016-selebihnya adalah matakuliah yang namanya sama dengan matakuliah kurikulum lama, namun isi dari matakuliah tersebut sudah diperbaharui. Hal ini terlihat dari deskripsi masing-masing matakuliah yang ada di kurikulum 2021. Proses menyusun deskripsi matakuliah ini juga melalui proses diskusi panjang secara daring beberapa kali. Menjabarkan Capaian Pembelajaran Lulusan program studi pada tingkat Matakuliah (MK) menjadi CPMK, sub-CPMK

dan tahapan belajar bersifat lebih spesifik. Setelah masing-masing tim dosen presentasi matakuliah yang menjadi bagiannya para dosen memberikan komentar dan masukan terkait matakuliah, agar ada perbaikan dalam isi materi yang di sampaikan kepada mahasiswa. Ini adalah bagian dari kewajiban untuk mengembangkan bahan ajar dan perangkat pembelajaran.

#### **D. KURIKULUM MERDEKA APMD**

Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi kemungkinan masalah yang menghambat implementasi kurikulum, melakukan sosialisasi, workshop dan bimbingan teknis kepada mahasiswa, dosen dan tenaga pendidik di program studi Ilmu Pemerintahan, agar dapat melaksanakan kurikulum dan monitoring. Tampaknya masih banyak *civitas akademika* program studi yang belum sepenuhnya paham dengan mekanisme format MBKM ini, sehingga perlu sosialisasi yang intens kepada seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik. Hal ini terkait dengan perencanaan proses pembelajaran mahasiswa di setiap semester sejak awal perkuliahan. Dalam penyusunan Kartu Rencana Studi (KRS), baik dosen pembimbing akademik maupun mahasiswa harus paham mekanisme dari kurikulum 2021 ini. Mulai semester gasal tahun akademik 2021/2022 kurikulum 2021 ini sudah diberlakukan.

Momentum perubahan kurikulum 2021 ini memberikan kepada kita banyak pembelajaran perubahan untuk kemajuan. Kita semua menyadari bahwa kekuatan *civitas akademika* program studi pada saat itu luar biasa kompak dan solid. Tidak mudah menyatukan seluruh *civitas akademika* dalam diskusi panjang dan melelahkan

untuk membahas kurikulum program studi. Pengurus Program Studi Ilmu Pemerintahan mengapresiasi para dosen, mahasiswa dan tenaga pendidik untuk kerja keras tersebut. Dr.Sutoro Eko Yunanto selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa dalam diskusi dengan para dosen berkata:

“Kita harus optimis, sesuai dengan semangat *posmo* itu. Kita punya kekuatan. Apapunlah, entah itu *raw material* kita yang terbatas, kemudian mungkin doa, dana, orang, alat, yang terbatas, tapi kita harus meletakkan bahwa kita punya kekuatan, kita punya banyak hal untuk kita lepas landas. Kita harus berubah. Jadi, momentumnya disitu. Kita harus berubah. Kita menyelenggarakan diskusi yang panjang, kalau soal rapat kita sudah sering, kita rapatkan 6 kali, diskusinya satu kali. Jadi harus sama kalau rapat 6 kali, diskusinya juga 6 kali. Kalau diskusinya 6 kali, rapatnya juga 6 kali. Rapat itu adalah *exercising power*, tapi kalau diskusi itu adalah *exercising knowledge*. Jadi kalau diskusi berguna untuk memperkuat misi, terutama misi-misi keilmuan.”

Inti yang disampaikan Sutoro ialah kurikulum harus diletakkan pada kepentingan APMD. Ringkasnya kita sedang membangun kurikulum Merdeka APMD. Secara faktual program studi ilmu pemerintahan, jumlah mahasiswanya paling banyak, kekuatannya banyak, tapi berarti masalahnya juga bisa banyak. Tantangannya ialah membumikan Mazhab Timoho (5 G) dalam pelaksanaan tridarma dosen dan mahasiswa (skripsi).

Selanjutnya Sutoro melipat diskusi dengan menekankan bahwa kita harus membajak momentum perubahan kurikulum. Salah satu catatan penting pelipatan kurikulum oleh Ketua adalah pemerintahan

itu *Republican government*. *Republican* itu artinya memuliakan daulat rakyat dan harkat warga negara. Arah perubahan kurikulum program studi ilmu pemerintahan harus berfokus pada memuliakan rakyat selaku pemilik kedaulatan. Ilmu pemerintahan harus berpihak pada rakyat yang berdaulat, bukan pada elite politik.

Sementara itu perlu terus menerus diupayakan untuk mempengaruhi, memenangkan cara pandang, memenangkan pengetahuan pada perguruan tinggi lain dan yang tidak kalah penting tetap menjaga dan meningkatkan animo calon mahasiswa baru mendaftar. Kita sebagai PTS tidak mungkin hanya mengedepankan ilmu saja, tapi ilmu juga harus jadi 'jualan' - hal ini sekaligus sebagai *academic enterprise*. Ini adalah tantangan untuk program studi ilmu pemerintahan. Selanjutnya Sutoro mengatakan, sebagai berikut:

“.....*spirit yo ngelmu*, kelembagaan, ya kemakmuran. Kemakmuran adalah animo. Ini yang harus berjalan secara bersama-sama. Artinya ya medan ilmu pengetahuan kita tundukkan, medan pasar ini juga wajib kita raih, *ora mung asyik kita ngelmu*, tapi juga bagaimana *ngelmu* itu kita masukkan dalam dunia pasar. Memang ada beberapa kesamaan, antara prodi ilmu pemerintahan S1 dan S2 Magister Ilmu Pemerintahan (MIP). Ada perbedaan pada sisi epistemologinya. Kalau mahasiswa S1 itu *telling, understanding government, using the theory*, termasuk nanti *working* yang berkaitan dengan *governing* juga. Tapi kalau S2 itu memang harus maju, naik kelas, dibanding dengan *telling*, dengan *understanding*, tapi *discoursing* atau menyampaikan gagasan dan seterusnya. *Transforming*, pilahnya sudah jelas, satu untuk semua itu artinya ilmu pemerintahan itu untuk berbagai latar belakang dan profesi yang begitu beragam, dan semua untuk satu itu ya tentunya untuk kepentingan APMD.”

Tahapan berikutnya adalah program studi ilmu pemerintahan harus berani dan siap melakukan evaluasi formatif dan evaluasi sumatif terhadap implementasi kurikulum. Setelah ini masuk ke tahap *continuous improvement*, evaluasi dan pemutakhiran kurikulum secara berkala setiap 4 tahun atau 5 tahun yang melibatkan pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, serta dikaji (*review*) oleh pakar bidang ilmu pemerintahan. Tahap terakhir dalam peninjauan kurikulum ialah tersusunnya dokumen perubahan kurikulum prodi ilmu pemerintahan 2021. Oleh karena itu program studi ilmu pemerintahan perlu mendokumentasikan identitas program studi, evaluasi kurikulum secara berkala dan *tracer study*, landasan perancangan dan pengembangan kurikulum, rumusan visi, misi, tujuan, strategi dan nilai-nilai Sekolah Tinggi, profil lulusan, rumusan standar kompetensi lulusan, penetapan bahan kajian matakuliah, pembentukan matakuliah dan penentuan bobot SKS, matriks dan peta kurikulum, Rencana Pembelajaran Semester (RPS), rencana implementasi hak belajar di luar prodi (terkait MBKM) dan manajemen dan mekanisme pelaksanaan kurikulum.

Masih banyak pekerjaan pasca tersusunnya kurikulum 2021 yang harus diselesaikan oleh program studi. Tentu program studi masih sangat berharap adanya dukungan dari seluruh *civitas* akademika, agar tugas ini bisa selesai dengan tuntas. Terima kasih untuk seluruh *civitas* akademik prodi ilmu pemerintahan, Unit Jaminan Mutu dan Pimpinan atas tersusunnya kurikulum 2021 (MBKM). Kurikulum 2021 dengan ciri kemerdekaan APMD menjadi ciri kita. Ilmu Pemerintahan dengan mengusung Mazhab Timoho mengembalikan kedaulatan pada rakyat. Ilmu Pemerintahan yang benar-benar merdeka haruslah berorientasi pada hajat dan kepentingan rakyat.

# **BAB VII**

## **ILMU PEMERINTAHAN BERPIHAK PADA RAKYAT**

**Supardal dan R. Widodo Triputro**

### **A. PENGANTAR**

Pemerintahan sebagai ilmu pengetahuan mengalami perkembangan yang cukup dinamis baik itu dilihat dari azas ontologis, epistemologis dan aksiologis, sehingga ilmu pemerintahan sudah bisa disejajarkan dengan ilmu-ilmu lain termasuk ilmu sosial dan ilmu politik yang jauh lebih tua usianya. Secara ontologis ilmu pemerintahan pada awalnya berorientasi pada institusi Negara dan hubungannya dengan warga, sehingga terkungkung dalam tugas formal pemerintah dalam melayani warga. Dalam konteks ini hubungan lebih didominasi oleh pemerintah, dan warga harus mengikuti prosedur yang ditetapkan berdasarkan regulasi secara kaku, sehingga warga tidak memenuhi posisi tawar dalam relasi pemerintah dengan yang diperintah/warga. Kini objek ilmu pemerintahan lebih luas lagi, menyangkut kedaulatan rakyat, hajat hidup orang, relasi berbagai pihak yang berpihak rakyat, sampai pemerintah sebagai pedagang, yang jelas pemerintah tidak berada di ruang kosong, sehingga secara ontologis ilmu pemerintahan mempunyai objek yang dinamis dan terus berkembang. Secara epistemologis ilmu pemerintahan mempunyai metodologi yang lebih luas mengikuti perkembangan objek ilmu pemerintahan. Secara aksiologis ilmu

pemerintahan memberikan kontribusi dalam mewujudkan kedaulatan rakyat dan kemaslahatan umat atau mewujudkan hajat hidup orang banyak. Terjadi pergeseran paradigma dari pemerintahan yang lebih berorientasi pada lembaga Negara yang statis bergeser pada dinamika relasi antar aktor yang menempatkan kepentingan rakyat pada posisi yang tinggi, dan tercermin dalam keterlibatan rakyat dalam setiap agenda pemerintah.

Kajian ini bertujuan menarasikan perkembangan ilmu pemerintahan dari pendekatan kelembagaan dengan menekankan lembaga-lembaga pemerintah dengan segala fungsinya sampai pendekatan pemerintahan berpihak pada kedaulatan rakyat yang berorientasi pada hajat hidup orang banyak dan relasi antar aktor dalam bingkai pemerintahan yang demokratis. Program Studi Ilmu Pemerintahan yang mempunyai konsentrasi pada kajian ilmu pemerintahan juga harus merespon pergeseran paradigma dan pendekatan pemerintahan berbasis pada kedaulatan rakyat berorientasi kemaslahatan umat atau kepentingan hajat hidup orang banyak. Perubahan kurikulum merupakan jawaban atas kebutuhan pergeseran paradigma ilmu pemerintahan yang berpihak pada rakyat. Kurikulum baru Magister Ilmu Pemerintahan bisa memberikan wawasan dan keilmuan peserta didik, selanjutnya bisa menerapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berpihak rakyat.

## **B. PERKEMBANGAN ILMU PEMERINTAHAN**

Secara etimologis kata pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang berarti melakukan pekerjaan menyuruh (2 pihak yaitu ada yang memerintah dan ada yang diperintah). Dengan demikian Pemerintah



(Pe) berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Dari kata pemerintah menjadi pemerintahan (tambahan akhiran an) berarti perbuatan, fungsi, cara atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. Berdasarkan aspek statistika, “pemerintah” adalah lembaga atau badan-badan publik yang mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan negara. Dalam aspek dinamika, pemerintahan adalah kegiatan dari lembaga atau badan-badan publik tersebut dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara, salah satunya kesejahteraan masyarakat. Berpemerintahan hakekatnya memuliakan dan mendaulatkan rakyat, bukan membelenggu rakyat.

Menurut Van Vollen Haven, dalam arti sempit “pemerintahan” meliputi kegiatan pemerintah yang hanya menyangkut bidang eksekutif atau *bestuur*, yakni menjalankan tugas memerintah saja, artinya menjalankan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pembuat kebijakan. Dalam arti luas, pemerintahan adalah seluruh kegiatan pemerintah, baik menyangkut bidang legislatif, eksekutif, maupun yudikatif yang bertujuan untuk mewujudkan tujuan negara. Meriam Budiarjo (2003:21) berpendapat bahwa “pemerintah” adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah suatu negara dan memiliki tujuan untuk mewujudkan negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut. Pemerintahan dalam arti luas adalah segala fungsi yang dijalankan pemerintah dalam mencapai tujuan negara, dalam hal ini pemerintah terdiri dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif dengan segala fungsinya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Artinya apapun yang dilakukan oleh lembaga-lembaga negara harus

bisa menjunjung harkat dan martabat rakyat, karena kedaulatan milik rakyat.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan kewajiban memperoleh pelayanan sipil bagi setiap orang yang melakukan hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan sesuai dengan tuntutan yang diperintah (Talizidhuhu Ndraha, 2003:6). Peran ini melekat kewajiban pemerintah untuk memberikan pelayanan publik, baik pelayanan administratif maupun pelayanan substansial yang menjadi kebutuhan warga negara. Jadi tugas utama pemerintah adalah memberikan pelayanan publik pada warganya. Muhadam Labolo berpendapat bahwa pemerintahan sesungguhnya merupakan upaya mengelola kehidupan bersama secara baik dan benar guna mencapai tujuan yang disepakati atau diinginkan bersama.

Pemerintahan dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan (dinamika), struktur fungsional, maupun tugas dan kewenangan (Muhadam Labolo, 2007:24). Tugas pemerintah yang utama adalah mencapai tujuan bersama yang telah menjadi kesepakatan bersama yang umumnya tertuang dalam konstitusi suatu negara. Diantaranya memberi perlindungan masyarakat (*to protect*), kesejahteraan masyarakat (*welfare*), dan kecerdasan/ pemberdayaan warga masyarakat.

Tujuan utama dibentuk pemerintahan adalah menjaga suatu sistem ketertiban di dalam masyarakat, sehingga bisa menjalankan kehidupan secara wajar. Pemerintah modern pada hakekatnya adalah

pelayanan masyarakat, menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreatifitasnya demi kemajuan bersama (Riyaas Rasyid, 2002:14). Pemerintah dalam menjalankan tugas pelayanan harus memberdayakan warga masyarakat dan memberikan ruang yang terbuka untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Jadi pemerintah berkewajiban untuk memfasilitasi warga untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tugas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik dan pembangunan kepada warga, maka menurut Max Weber (dalam Etzioni. 1985), pemerintah sebagai birokrasi menentukan norma-normanya sendiri yang harus dilaksanakan. Organisasi akan berjalan dengan efektif apabila semua peraturan ditaati oleh anggota. Organisasi dapat menggunakan kekuasaannya yang dimiliki dengan memberikan ganjaran bagi yang taat atau hukuman bagi yang membangkang agar para anggota menaati peraturan yang ada. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya juga diberi kewenangan untuk membuat kebijakan sebagai aturan main (*role of the game*), sekaligus dalam pelaksanaannya bisa memberi sanksi dan juga ganjaran kepada warganya. Untuk itu lah organisasi pemerintah dilengkapi dengan lembaga penegakan aturan yang mempunyai sifat memaksa. Jadi tugas pokok birokrasi adalah secara profesional menindaklanjuti keputusan politik yang diambil pemerintah dan mewujudkan pemerintahan yang efektif dan efisien. Pemerintah dalam menjalankan tugasnya tidak boleh menempatkan regulasi

sebagai tujuan, tetapi regulasi dilaksanakan untuk mendukung peran pemerintah dalam melayani rakyat.

Menurut Pasalong dalam Supiyadi (2009:12), birokrasi adalah organisasi yang dipimpin oleh pejabat pemerintah dibawah menteri yang memiliki tugas utama sebagai pemberi pelayanan. Birokrasi yang dimaksudkan untuk penyelenggaraan bernegara, penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya penyelenggaraan pelayanan umum dan pembangunan, seringkali oleh masyarakat diartikan dalam konotasi yang berbeda. Birokrasi pemerintah menjadi ujung tombak pelayanan kepada warga negara, sehingga baik buruknya citra pemerintah sangat tergantung pada pelayanan pemerintah yang diberikan oleh birokrasi. Bahkan pada masa kekinian pelayanan publik dijadikan komoditas politik untuk meraih karir politik lanjutan dari elit untuk menduduki jabatan bupati/walikota, gubernur sampai presiden.

Tugas pemerintah menurut Kaufman (dalam Thoha, 2003) adalah melayani dan mengatur masyarakat. Tugas pelayanan lebih menekankan upaya mendahulukan kepentingan umum, mempermudah urusan publik, mempersingkat waktu proses pelaksanaan urusan publik, dan memberikan kepuasan kepada publik, sedangkan tugas mengatur lebih menekankan kekuasaan atau power yang melekat pada posisi jabatan birokrasi. Hakekat dari tugas pokok pemerintahan dapat diringkas menjadi tiga fungsi yang hakiki, yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong

kemandirian dalam masyarakat dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran masyarakat

Berbicara tentang Ilmu Pemerintahan, tidak bisa dilepaskan dengan azas ontologi, epistemologi dan aksiologi. Ontologi adalah *subject matter*, *focus interest*, hakekat yang dikaji. Artinya apa sebenarnya yang dikaji oleh ilmu pemerintahan itu. Untuk menjawab pertanyaan ini kita harus mengetahui definisi, batasan atau ruang lingkup ilmu pemerintahan itu sendiri. Sedangkan epistemologi adalah bagaimana ilmu pemerintahan itu didapat, metode apa yang digunakan. Ilmu pemerintahan didapat dari data-data empiris lapangan berupa fakta-fakta pemerintahan mulai dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Metode penelitian yang digunakan dapat metode deduktif, induktif, deskriptif, historis atau eksperimen. Pendekatan analisisnya dapat berupa pendekatan kelembagaan atau perilaku. Akhirnya, aksiologi berbicara penerapan ilmu, manfaat ilmu, kegunaan ilmu pemerintahan. Penerapan ilmu pemerintahan itu dapat dari tingkat bawah sampai tingkat atas. Manfaatnya dapat berupa kognitif yaitu meningkatnya nalar dan gagasan pemerintahan dan psikomotorik yaitu dapat meningkatkan keterampilan birokrat dalam pelayanan publik, sementara afektif dapat meningkatkan penghayatan dan kesadaran berpemerintahan.

Magister Ilmu Pemerintahan harus memenuhi tiga landasan keilmuan tersebut untuk bisa eksis dalam kancah ilmu pemerintahan. Dalam visi, misi dan tujuan serta kurikulum yang disusun harus menjawab tiga landasan ilmu pemerintahan. Matakuliah yang disusun harus tegak berdiri dan fokus pada ruang lingkup pemerintahan,

sehingga program studi Magister Ilmu Pemerintahan tidak lagi “*minggrang-minggring*” (ragu-ragu) berbicara ilmu pemerintahan. Sebaliknya, Ilmu Pemerintahan harus bersikap tegas terkait dengan fokus dan kajian ilmu pemerintahan harus sesuai dengan ranah keilmuan ilmu pemerintahan, dan tidak lagi dicampuri orientasi keilmuan lain yang kurang relevan dengan kajian ilmu pemerintahan.

Berbicara tentang ilmu pemerintahan, maka dapat dipaparkan sebagai berikut: Ilmu pemerintahan tersusun secara sistematis karena ilmu pemerintahan terdiri dari konsep-konsep dimana konsep yang satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Konsep-konsep yang diambil dari lapangan empirik ini telah tersusun, oleh karena itu ilmu pemerintahan mempunyai sistematika sendiri. Herman Finer mendefinisikan pemerintahan sebagai berikut: *what is government? government is politics plus administration*, pemerintahan adalah politik tambah administrasi (Herman Finer, 1949:7). Artinya fokus ilmu pemerintahan lebih luas dibandingkan ilmu politik, sekalipun pada awalnya ilmu politik merupakan induk ilmu pemerintahan atau bahkan ada yang menyebut bahwa ilmu pemerintahan sebagai bagian dari ilmu politik, sebagaimana menurut Finer bahwa pemerintahan adalah politik ditambah administrasi. Dengan demikian dalam ilmu pemerintahan terkandung dimensi politik atau kewenangan dan dimensi administrasi untuk menjalankan kewenangan tersebut.

Untuk itu lingkup ilmu pemerintahan meliputi pemerintahan terkait dengan proses politik, yakni menyangkut pembuatan kebijakan dan perumusan keputusan politik dalam rangka mencapai tujuan bernegara yang mencakup kegiatan-kegiatan politik. Pemerintahan

terkait dengan kemampuan melaksanakan keputusan politik dengan menggunakan cara kerja manajemen pemerintahan yang efektif dan dinamakan administrasi. Konsekuensinya dalam pembelajaran ilmu pemerintahan juga diwarnai dengan proses politik dan proses administrasi dalam menjalankan keputusan politik tersebut.

Menurut C. F. Strong, (1960:6) *Government is there fore, that organization in which is vested the right to exercise sovereign powers. Government in the broad sense, is something bigger than a special body of ministers a sense in which we colloquially use it to day, when ... Govenment, in the broader sense, is charged with and without. Is must, there fore, have, first military power, or the control of making laws; thirdly, financial power, or the ability to extract sufficient money from the community to defray the cost of defending the state and of enforcing the law it makes on the state's behalf.* Pengertian ilmu pemerintahan adalah organisasi dalam mana diletakan hak untuk melaksanakan kekuasaan berdaulat atau tertinggi, pemerintahan dalam arti luas mencakup seluruh cabang kekuasaan pemerintahan negara (legislatif, eksekutif, yudikatif, atau keseluruhan lembaga negara), dan pemerintahan dalam arti sempit hanya badan eksekutif. Dari pendapat ini jelas bahwa pemerintahan dalam ranah politik yakni pemerintahan dalam arti luas: berbicara tentang legislatif, eksekutif dan yudikatif. sedangkan lingkup kajian pemerintahan proses administrasi yakni dimensi pemerintahan dalam arti sempit yakni kewenangan eksekutif saja.

Menurut Samuel Edward Finer (1974:3-4) ada empat makna pemerintahan: (1) *the activity or the process of*

*governing* (menunjukkan kegiatan atau proses memerintah yaitu menyelenggarakan pemerintahan); (2) *state of affairs* (menunjukkan masalah-masalah/hal ihkwal negara dalam mana kegiatan dan proses di atas dijumpai dan diselenggarakan); (3) *people charged with the duty of government* (menunjukkan orang-orang maksudnya pejabat-pejabat) yang memiliki tugas-tugas untuk memerintah); dan (4) *the manner, method or system by which a particular society is governed* (menunjukkan cara, metode atau sistem dengan mana suatu masyarakat tertentu diperintah). Dari pendapat ini menunjukkan objek ilmu pemerintahan sebagai: proses pemerintahan, hal-hal terkait negara, pemerintah menjalankan kewenangan, dan warga masyarakat yang diperintah.

### **C. PEMERINTAHAN BERBASIS KEDAULATAN RAKYAT**

Pemerintah adalah kekuasaan memerintah suatu negara (daerah negara) atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara (seperti kabinet merupakan suatu pemerintah). Pemerintahan adalah perbuatan (cara, hal urusan dan sebagainya) memerintah. Menurut Bayu Surianingrat (1980) pemerintahan adalah orang atau badan atau perangkat yang menyelenggarakan pemerintahan atau yang memerintah. Adapun tugas pemerintah: (1) menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat (*public welfare*); (2) melindungi dan mengayomi masyarakat; (3) mewujudkan ketertiban dan ketenteraman masyarakat; (4) pengendalian atas keseluruhan tindakan warga (WNI dan WNA); dan (5) mengatur kehidupan bersama warga agar tercipta keteraturan.



Fungsi pokok pemerintah: (1) pengaturan (*regulation*) yakni melakukan perumusan dan implementasi kebijakan (peraturan perundang-undangan) agar tercipta keteraturan dalam masyarakat; (2) pembangunan (*development*) yakni fungsi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan agar tercipta suatu kondisi masyarakat yang sejahtera; (3) pemberdayaan (*empowerment*) yakni fungsi merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat agar tercipta suatu kondisi masyarakat yang mandiri; dan (4) pelayanan (*services*) yakni merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat agar tercipta keadilan dalam masyarakat.

Secara tegas Tamin (2004), berpendapat ada empat fungsi yang diemban sebuah birokrasi negara, yaitu: *Pertama*, fungsi instrumental yaitu menjabarkan kebijakan perundang-undangan dan kebijaksanaan publik dalam kegiatan-kegiatan rutin untuk memproduksi jasa, pelayanan, komoditi, atau mewujudkan situasi tertentu. *Kedua*, fungsi politik yaitu memberi input berupa saran, informasi, fisik, dan profesionalisme untuk mempengaruhi sosok kebijaksanaan. *Ketiga*, fungsi katalis *public interest* yaitu mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan publik dan mengintegrasikan ke dalam kebijaksanaan dan keputusan pemerintah. *Keempat*, fungsi *entrepreneurial* yaitu memberikan inspirasi bagi kegiatan-kegiatan inovatif, mengaktifkan sumber-sumber potensial yang ideal dan menciptakan *resource-mix* yang optimal untuk mencapai tujuan. Dalam perkembangannya terjadi tuntutan peran birokrasi sebagai paradigma baru, dimana birokrasi memiliki ciri-ciri tambahan, yaitu mengarahkan, memberdayakan, dan menciptakan persaingan dalam pelayanan publik, artinya

ada keberpihakan birokrasi pemerintah pada kebutuhan warga masyarakat.

Tugas Pemerintah Republik Indonesia adalah mewujudkan tujuan pemerintahan Negara Indonesia menurut Pembukaan UUD 1945, yakni: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia (*national protection*: urusan perlindungan); (2) memajukan kesejahteraan umum (*public welfare*: urusan menyejahterakan); (3) mencerdaskan kehidupan bangsa (*nation education*: urusan pendidikan); dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial (*international relationship free*: urusan internasional).

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, di era sekarang ini harus dilakukan dengan menempatkan rakyat sebagai aktor dan pemain utama, dalam hal ini pemerintah sebagai mempermudah (*enabling*) dan fasilitator. Negara atau pemerintah tidak bisa mendominasi konteks relasi, akan tetapi harus memberikan ruang yang luas, karena rakyat yang lebih mengetahui kebutuhan yang paling mendesak dalam mencapai kesejahteraan. Dalam pelaksanaan tugas pemerintah harus banyak melakukan desentralisasi luas dan demokratisasi, dengan memberdayakan masyarakat dalam proses pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik. Dalam hal pelayanan publik pemerintah harus banyak melakukan debirokratisasi dan deregulasi, sehingga warga memperoleh kemudahan akses.

Pada teori kedaulatan rakyat, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, maka dari itu legitimasi kekuasaan pemerintah adalah berasal dari rakyat. Teori kedaulatan rakyat menganggap

kehendak rakyat adalah satu-satunya sumber kekuasaan bagi pemerintah. Rakyat memberikan kekuasaan pada wakil rakyat yang menduduki lembaga legislatif maupun eksekutif untuk melaksanakan keinginan rakyat. (<https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/130000669> diunduh 5 November 2021). Dalam pemerintahan berbasis kedaulatan rakyat, maka pemerintah harus tunduk dan melayani rakyat berdasarkan kebijakan yang dirancang rakyat melalui wakil-wakilnya di lembaga perwakilan rakyat. Konteks relasi rakyat dan wakil rakyat harus didasarkan mandat yang diberikan rakyat. Faktanya sekarang ini banyak wakil rakyat setelah bertugas justru lebih memperjuangkan kepentingan kelompok atau golongan, termasuk partai politik yang ikut mengendalikan lewat fraksi. Banyak kebijakan mengatas-namakan rakyat tetapi untuk kepentingan kelompok elite, karena tidak jarang wakil rakyat atau elit birokrat juga sebagai pedagang. Akibatnya orientasi kebijakan yang dibuat harus menguntungkan kelompok elit tersebut sebagai pertukaran sosial politik. Jadi kepentingan elit birokrat maupun parlemen menyebabkan kebijakan mengarah ke politik dagang sapi, bukan berorientasi pada kepentingan rakyat. Kenyataan ini harus didobrak oleh rakyat sebagai pemilik kedaulatan.

Untuk dapat melaksanakan demokrasi dengan baik, maka terlebih dahulu rakyat, terutama para pelaksana kekuasaan harus mengetahui dan memahami dengan baik mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem telah dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas masyarakat dan bernegara di berbagai Negara, seperti dikutip Muh. Mahfud MD ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai bermasyarakat dan bernegara.

*Pertama*, hampir semua Negara di dunia ini telah menjadikan demokrasi sebagai asas yang fundamental; *Kedua*, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk penyelenggaraan Negara sebagai organisasi tertingginya. Karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat tentang demokrasi (Mahfud, 2021).

Pada hakekatnya pemilik negara adalah rakyat, sehingga otoritas rakyat lah yang memiliki kekuasaan tertinggi. Oleh karena itu setiap warga negara memiliki hak untuk turut serta memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di parlemen sebagai anggota legislatif dalam memegang kekuasaan yang tertinggi. Para pejabat Negara harus terdiri dari orang-orang yang representatif mewakili sebanyak mungkin golongan masyarakat dan/atau partai politik; jadi tidak boleh hanya berasal dari satu golongan atau satu partai saja (mayoritas tunggal) karena akan menjadi suatu kekuasaan absolut dan selanjutnya akan menjadi kekuasaan otoriter yang merupakan sumber timbulnya kehancuran bangsa seperti yang selalu menjadi slogan (Kolusi, Korupsi dan Nipotisme/KKN) lebih dari mayoritas tunggal merupakan doktrin komunisme dan fasisme.

Untuk mewujudkan pemerintahan yang berkedaulatan rakyat, maka pemerintah harus dibentuk dan dikontrol oleh rakyat, pemerintah merupakan dari, oleh dan untuk rakyat. Pengendalian pemerintah oleh rakyat sangat penting karena pemerintah setelah memperoleh mandat bisa melakukan apa saja yang dikehendakinya dalam segala bidang. Pemerintah mencakup segala bidang yang merupakan hajat hidup orang banyak, sehingga elit pemimpin pemerintah bisa

bertindak sebagai komprador, pebisnis, pemborong, entrepreneur dan aktor-aktor lain sesuai kepentingannya, yang berujung untuk mengoptimalkan bisnisnya. Untuk memahami perilaku pemerintah yang multifungsi ini, maka tidak cukup pengetahuan dan pendekatan institusi pemerintahan semata. Pendekatan sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum menjadi kebutuhan penting dalam ilmu pemerintahan ke depan.

#### **D. VISI-MISI PROGRAM STUDI TAHUN 2022-2026**

Untuk menjawab kebutuhan pengembangan ilmu pemerintahan, Prodi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” mempunyai **Visi** “Menjadi Institusi Pendidikan dan Komunitas Keilmuan yang Kokoh dalam Memperjuangkan dan Mendorong Pemerintahan Berkedaulatan Rakyat Guna Mendukung Terwujudnya Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”. Visi tersebut berawal dari gagasan bahwa pemerintahan bukan sekedar pembahasan mengenai aspek kelembagaan pemerintahan dan hubungannya, hierarki pemerintahan, kebijakan atau regulasi yang ditetapkan, dan aspek administrasi-manajemen pemerintahan. Pemerintahan erat kaitannya dengan rakyat dan warga sebagai pemilik kedaulatan sekaligus subyek penyelenggaraan pemerintahan yang harus melibatkan rakyat, sekaligus berorientasi pada pelayanan kepada rakyat dan warga negara. Adapun mandat yang dijalankan oleh negara dan pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan sebagaimana telah digariskan dalam konstitusi. Oleh karena itu fokus dan lokus Ilmu pemerintahan perlu diluruskan atau dikembalikan pada jati diri sebagai bidang keilmuan yang menggerakkan kajian ke arah

perilaku dan tata pemerintahan yang mengedepankan kedaulatan rakyat dan berorientasi kepada pelayanan publik untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan.

Untuk mewujudkan visi tersebut Prodi Magister Ilmu Pemerintahan mempunyai beberapa misi sebagai berikut:

1. Memperkuat dan meneguhkan keilmuan pemerintahan untuk pembentukan pemerintah (*government making*) dan pembentukan warga (*citizen making*).
2. Mencerahkan ilmu dan praktik pemerintahan nasional, daerah, dan desa.
3. Menghasilkan para lulusan sebagai sarjana sujana yang berpihak kepada daulat rakyat dan martabat warga.

Penjelasan: **Misi pertama** merupakan upaya program studi untuk memperjelas *standing position* ilmu pemerintahan di tengah perdebatan, ketidak-jelasan, dan dikotomi antara ilmu pemerintahan dengan bidang ilmu lain dalam rumpun keilmuan sosial humaniora. Dengan harapan besar menjadi basis epistemologi terbentuknya pemerintahan dan pemerintah yang berorientasi kepada kepentingan rakyat; **Misi kedua** merupakan langkah program studi untuk memperkuat *standing position* ilmu pemerintahan secara keilmuan berbasis metodologi ilmu pemerintahan. Sekaligus memperkuat aksiologi ilmu pemerintahan dalam praktek penyelenggaraan pemerintahan baik nasional maupun lokal; **Misi ketiga**, dilaksanakan dengan mengembangkan pemahaman dan memperteguh sisi kognitif para peserta didik mengenai kehadiran negara dan posisi pemerintah dalam relasinya dengan rakyat (sebagai pemilik kedaulatan),

sehingga menghasilkan para lulusan yang berpihak kepada warga negara dan berorientasi kepada pelayanan publik.

#### **E. PROFIL PRODI, KOMPETENSI DAN PROFIL LULUSAN.**

Dalam rangka penguatan pemerintah yang berdaulat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pengembangan pemerintah yang profesional, maka perlunya penguatan segenap sumber daya manusia baik di lembaga pemerintahan (organisasi publik) maupun lembaga non pemerintahan (NGO). Hal ini merupakan potensi dan peluang bagi Prodi Magister Ilmu Pemerintahan untuk ikut berkiprah dalam proses penguatan kapasitas segenap sumber daya manusia untuk mendukung peran pemerintah dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan memproteksi kepentingan warga.

Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan menjawab tantangan dan peluang tersebut, dengan membuat struktur kurikulum yang relevan dengan kebutuhan penguatan kapasitas untuk mampu menjalankan peran sesuai jenjang pekerjaan. Prodi Magister Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” selalu berusaha mengembangkan kurikulum pembelajaran sesuai dinamika dan perkembangan ilmu pemerintahan, kebutuhan dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, serta kebutuhan masyarakat. Proses pembelajaran didukung staf pengajar dengan jenjang pendidikan S3 (doktoral) dengan berbagai latar belakang pengalaman yang menunjang proses pembelajaran dalam rangka penguatan aksiologi, tanpa mengabaikan aspek ontologi dan epistemologi.

Dengan profil program studi tersebut di atas, diharapkan - disertai dengan usaha yang kuat - menghasilkan para lulusan (sebagai

magister yang sujana) dengan kompetensi sebagai berikut: pertama, mampu melakukan pendekatan dan analisis berbagai permasalahan organisasi sektor publik. Kedua, mampu mengaplikasikan berbagai teori dan konsep dalam memecahkan fenomena dan permasalahan dalam penyelenggaraan organisasi sektor publik, khususnya lingkup pemerintahan daerah dan desa. Ketiga, mampu mengambil keputusan dalam rangka penyelesaian berbagai permasalahan pemerintahan. Keempat, melakukan riset secara komprehensif dan mendalam dengan pendekatan pemerintahan. Kelima, mampu mendesain dan menjadi manajer organisasi sektor publik dengan pendekatan kesejahteraan warga masyarakat. Keenam, mampu melakukan analisis kebijakan publik secara komprehensif dan merumuskan kebijakan publik secara inovatif. Ketujuh, mampu menjadi negosiator yang tangguh dan mengelola kerjasama baik secara internal maupun eksternal.

Dari kompetensi tersebut, maka para lulusan sangat berpotensi untuk berkiprah dan berprofesi sebagai: (1) politisi yang cakap; (2) birokrat yang profesional di berbagai lembaga pemerintahan; (3) ahli dalam perencanaan dan penganggaran khususnya sektor publik; (4) aktivis NGO; (5) pemimpin organisasi pemerintah dan lembaga non pemerintah; (6) peneliti yang ulung baik secara kolektif maupun individual; (7) negosiator yang ulet baik di lingkup internal maupun eksternal; (8) manajer/koordinator proyek dan penggerak masyarakat.



## F. KURIKULUM PERUBAHAN 2021

Pendidikan idealnya menjadi jalan terindah untuk membangun peradaban bangsa dan masyarakat. Sehubungan dengan hal itu, kurikulum menjadi rambu-rambu yang akan membantu dan memudahkan kita mencapai tujuan. Sejatinya kurikulum itu sederhana, memuat apa yang akan kita lakukan agar peserta didik yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, tidak bisa menjadi bisa, malas menjadi rajin, sembrono menjadi disiplin, egois menjadi peduli, destruktif menjadi konstruktif, tidak literat menjadi literat, dan seterusnya (<https://jendela.kemdikbud.go.id>, diakses 23 Oktober 2021). Oleh karena itu, kurikulum yang dirancang harus siap mengantisipasi kebutuhan mereka, baik kebutuhan saat belajar maupun kebutuhan mereka di masa yang akan datang.

Dengan berbagai proses persiapan yang telah dilaksanakan oleh Prodi Magister Ilmu Pemerintahan, maka tahun 2021 dilakukan perubahan kurikulum guna menyesuaikan dengan kebutuhan pengembangan ilmu pemerintahan. Perubahan yang dimaksud meliputi kurang lebih 42% (empat puluh dua persen) konten kurikulum sebelumnya, sehingga lahir beberapa matakuliah baru hasil workshop kurikulum (September 2021) sebagai berikut:

*Pertama*, Relasi Daerah dan Desa menjadi Pemerintahan dan Negara. Perubahan dengan argumen bahwa pembahasan relasi daerah dan desa perlu diperluas ke lingkup pemerintahan dan negara, adapun relasi daerah dan desa bisa menjadi sebagian topik bahasan.

*Kedua*, Manajemen Pemerintahan Desa menjadi Teori dan Praktik Tata Pemerintahan. Pembahasan dan pemahaman lebih

komprehensif mengenai teori dan praktek tata pemerintahan merupakan basis epistemologi dan aksiologi, termasuk di dalamnya mendasari topik pembahasan mengenai manajemen pemerintahan desa.

*Ketiga*, Politik Lokal dan Otonomi Daerah menjadi Pemerintahan dan tata pemerintahan. Pembahasan spesifik mengenai politik lokal dan otonomi daerah dianggap hanya sebagai bagian dari lingkup pembahasan yang lebih luas tentang pemerintahan dan tata pemerintahan.

*Keempat*, Perencanaan Pembangunan Daerah dan Desa menjadi Sosiologi dan Ekonomi Politik Pemerintahan. Selama ini perencanaan pemerintahan (sektor publik) dianggap sektoral dan elitis, maka lingkup bahasan perlu diperluas untuk memahami relasi negara/pemerintah dengan rakyat dan relasinya dengan berbagai komponen (dari *stakeholders* berkembang menjadi *shareholders*).

*Kelima*, Manajemen Aparatur Sipil Daerah menjadi Teknologi Informasi Pemerintahan. Perubahan ini sangat dibutuhkan seiring dengan perkembangan dan kebutuhan mengenai pemahaman dan praktik pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi, termasuk di dalamnya kebutuhan untuk pengelolaan atau penataan aparatur sipil negara.

Demikian sekilas mengenai perkembangan ilmu pemerintahan dan penjelasan mengenai perubahan kurikulum tahun 2021. Meskipun demikian pembahasan tentang kurikulum tentu tidak sesederhana dan semudah mendefinisikannya. Dalam pembahasan tentang kurikulum tentu tidak hanya menyangkut persoalan konten atau

substansi dan tidak pula hanya bersandar kepada idealisme satuan/ lembaga pendidikan atas nama pengembangan ilmu atau pemurnian kajian, karena kurikulum juga melibatkan banyak kepentingan.

Setiap lembaga pendidikan sangat berkepentingan membetuk kurikulum guna pengembangan keilmuan sesuai bidang ilmu masing-masing, namun berbagai kepentingan, situasi, dan kebutuhan di luar lembaga pendidikan juga perlu dipertimbangan. Kurikulum berkaitan dengan relasi sosial berbagai agen yang terlibat dan berkepentingan di belakang penyelenggaraan pendidikan. *Pertama*, ada kepentingan politik penguasa (melalui kementerian pendidikan) yang berkepentingan dengan relasi antara negara dengan lembaga pendidikan dan relasi lembaga pendidikan dengan peserta didik sekolah; *Kedua*, relasi sosial antara lembaga pendidikan dengan masyarakat; *Ketiga*, relasi ekonomi-politik dengan user/pasar.

Adalah hal yang sangat diperlukan jika perubahan kurikulum mempertimbangkan berbagai aspek dan kepentingan, meskipun kepentingan lembaga pendidikan dalam pengembangan ilmu merupakan basis pertimbangannya. Seluruh aspek internal dan eksternal perlu dikaji secara matang dan komprehensif guna memetakan sebuah medan laga yang melahirkan medan juang (*road map*) melalui kurikulum pendidikan. Dengan demikian strategi perjuangan di medan pendidikan menjadi jelas dan terukur (strategis) untuk melahirkan anak-anak bangsa yang merdeka, berguna bagi dirinya sendiri, masyarakat dan bangsanya.

Berkaitan dengan tidak dimunculkannya konsentrasi secara formal bukan berarti konsentrasi program studi itu tidak ada. Karena

pada hakekatnya konsentrasi pemerintah daerah dan pemerintahan desa ini ditempatkan pada kerangka substansial, dimana konsentrasi itu termuat dalam setiap diskusi dengan mengambil kasus pemerintahan daerah dan desa dari semua matakuliah pada kurikulum baru. Dengan demikian kajian konsentrasi justru lebih luas dan komprehensif daripada dieksplisitkan dalam 2 (dua) matakuliah konsentrasi. Dengan sistem ini mahasiswa peserta bisa mengeksplor berbagai permasalahan pemerintahan daerah dan desa, selanjutnya didiskusikan untuk mencari solusi dalam kerangka konseptual dari masing-masing matakuliah baru yang ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Budiarjo, Miriam. 2003. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Braasz, H.A. Cs. 1962. *Inleiding tot de Bestuurwetenschap*. Den Haag.
- Finer, Herman. 1949. *Theory and Practice of Modern Government*, Henry Holt and Company. New York.
- Finer, Samuel Edward. 1974. *Comparative Government*. Penguin Books, Ltd., Harmonds Worth, Middlesex. England.
- Hoogerwerf. 1987. *A De Beleidstheori*. P.B. Lehning and J.B.D. Simonis Handboek beleidswethenschap. Amsterdam.
- Muh. Mahfud MD. 2011. *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Press, Jakarta.
- McIver, Robert M.. 1947. *The Web of Government*, The Macmillan Company.
- Ndraha, Taliziduhu. 2000. *Ilmu Pemerintahan Jilid I*, BKU Ilmu Pemerintahan Kerjasama IIP-UNPAD. Jakarta.
- . 2003, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Rineka Cipta. Jakarta.

- Ningrat, Bayu Surya. 1992. *Mengenal Ilmu Pemerintahan*. Rineka Cipta. Jakarta.
- Labolo, Muhadam. 2007. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Kelapa Gading Permai. Jakarta.
- Legino, Supriadi. 2009. *Menjawab Tantangan Reformasi Birokrasi: Kepemimpinan Transformasional dan Organisasi Lateral*. Indonesia Press. Jakarta.
- Poelje, CH, Van. 1942. *Algemene Inleiding tot de Bestuurkunde*. Alphen aan de Rijn N. Samson.
- Rasyid, M. Riyaas. 1996. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- , 2000. *Kajian Awal Birokrasi Pemerintahan Politik Orde Baru*. Yarsif Watampone. Jakarta.
- , 2001. *Makna Pemerintahan Tinjauan dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. PT. Mutiara Sumber Widia. Jakarta.
- Rosenthal U., Schendelen, M.P.C.M. Van. 1987. *Rengeling, H.B. Openbaar Bestuur: Alphen aan de Rijn N. Samson*.
- Strong, C. F. 1960. *Modern Political Constitutional*. Sidgwick and Jackson, Ltd., London.
- Syafie, Inu Kencana. 2011. *Sistem Pemerintahan Indonesia, 2011*. Rineka Cipta. Jakarta.
- S. Pamudji. 1983. *Kepemimpinan Pemerintahan di Indonesia*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- Soewargono. 1996. *Jatidiri Ilmu Pemerintahan*, IIP Pres.
- Thoha, Miftah, 2003. *Birokrasi dan Politik di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Tamin, F. 2004, *Reformasi Birokrasi : Analisis Pendayagunaan Aparatur Negara*, Belantika. Jakarta.
- <https://jendela.kemdikbud.go.id>, diunduh 23 Oktober 2021
- <https://www.kompas.com/skola/read/2020/02/07/130000669> diunduh 5 November 2021

# PENUTUP

## KITA BISA BERUBAH!

**Sutoro Eko Yunanto**

Kami menempatkan perubahan kurikulum sebagai momentum penting untuk perubahan institusi, yakni kebangkitan ilmu, reputasi, dan kepercayaan. Kebajikan ilmu akan membentuk kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka, yang *beyond* kurikulum MBKM, adalah sebuah fitur utama kampus merdeka. Jika mau merdeka maka tradisi lama birokratik-teknokratik maupun *steering* MBKM harus kita bajak, seperti petani membajak sawah dengan kerbau.

Kita bisa! Kita bisa berubah! APMD bisa berubah! Perubahan lebih penting ketimbang pengayoman. Itulah keyakinan dan prinsip yang saya pegang dan kedepankan. Kita harus yakin dengan kekuatan kita, tidak perlu silau dengan nama besar perguruan tinggi lain, tidak perlu takut dengan rezim standarisasi. Kita bisa melampaui mereka.

Kita bisa, berarti kita tidak menyerah dengan keadaan, tidak merasa cukup dengan kemapanan. Kita bisa berarti kita berjuang untuk kepentingan institusi. Kita bisa juga berarti berpikir idealis dan bertindak realis. Idealis, yang dibimbing dengan “gagasan sebagai panglima” berbicara tentang “apa yang sebaiknya”, sebagai cita-cita abadi institusi. Tetapi idealis bukan idealisme teknokratik, melainkan idealisme kepentingan institusi. Semua hal yang kita lakukan harus bersandar dan berjuang untuk kepentingan institusi, sebagai pemerintah berjuang untuk kepentingan rakyat. Idealisme

dalam praktik dikerjakan dengan realisme, sebuah seni kemungkinan, atau apa yang mungkin bisa dilakukan. Realisme bukan pragmatis, sebuah tindakan “apa yang mudah dikerjakan”.

Kita bisa berubah tidak mungkin bisa dicapai dengan pragmatis, dengan cara rutinitas yang rutin, seperti kantor-kantor negara yang sibuk dengan dirinya sendiri. Dialektika kritis dalam membaca, mendengarkan, membicarakan, meneliti, menulis, dan menceritakan adalah jalan realis yang bisa kita tempuh untuk menerobos rutinitas, sekaligus meraih perubahan dan kemajuan. Panggung dan ruang-ruang alternatif bagi mahasiswa adalah arena realis yang bisa digunakan untuk menyemai dialektika ilmu guru, ilmu buku, dan ilmu laku, sebagai jalan untuk membentuk kampus merdeka dan memperjuangkan kepentingan APMD.

Kita bisa! Kita bisa berubah!

# Dialektika Perubahan Kurikulum STPMD “APMD”



APMD Press

**Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD**

Jl. Timoho 317 Yogyakarta Telp. (0274) 561971



: [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)



: [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id)

ISBN: 978-623-98584-1-4



9

786239

858414